

- POLITICS ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

- WORLD POLITICS

BC

**UPAYA PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR
DALAM MENGHADAPI TEKANAN
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Fis HI 38 016

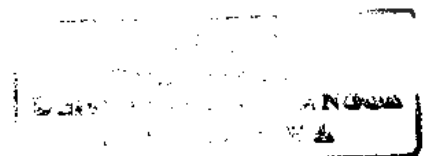
Les

U



YENI KURNIA PUJI LESTARI
NIM 070116560

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



HALAMAN PERSETUJUAN

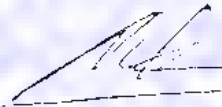
SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR DALAM
MENGHADAPI TEKANAN INTERNASIONAL**

Telah Disetujui Untuk Diujikan
Di Depan Komisi Penguji Tanggal 22 Mei 2006

Setuju Untuk Diujikan
Surbaya, 10 Mei 2006

Dosen Pembimbing



Drs. I. Basis Susilo, MA.
NIP 130 937 977

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR DALAM MENGHADAPI TEKANAN INTERNASIONAL

Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 22 Mei 2006, Pukul 10.00-12.00 WIB Di Ruang 220
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Komisi Penguji

Ketua



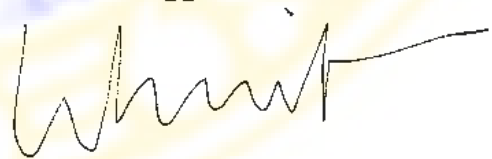
Drs. Djoko Sulistyo, MS.
NIP 131 453 807

Anggota




Dra. Suhartati Hidayat, MA.
NIP 130 531 812

Anggota




I Gede Wahyu W., S.IP, M.Si.
NIP 139 050 635



Dipersembahkan sebagai tanda baktiku kepada:

Bapak dan Ibu

*Untuk doa dan kasih sayang
yang tak pernah pulus...*



Try to Love and Love to Try

karena

*"Perjuangan, Sesungguhnya
adalah Pelaksanaan Kata-kata"*

(W. S. Rendra)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah S.W.T, karena atas rahmat dan ridho-Nya segala hambatan dan kesulitan dapat dilalui sehingga skripsi ini dapat dirampungkan meski membutuhkan waktu sepanjang dua semester. Beban berat skripsi akhirnya melebur ketika keluar dari ruang sidang, tidak peduli berapapun hasilnya. Seperti yang dikatakan oleh teman-teman, *I've finished the hardest job*, yang penting lulus! Karena itu, penulis merasa patut mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan kepada penulis selama menyusun skripsi ini hingga mempertahankannya di depan Komisi Penguji. Ucapan terimakasih tentunya penulis sampaikan kepada:

- ✧ Bapak dan Ibu, terimakasih untuk kesabaran ekstra yang telah diberikan, mengingat skripsi ini membutuhkan waktu dua semester dan tidak memberikan hasil yang cukup memuaskan.
- ✧ Pak Basis, selaku dosen pembimbing. Terimakasih karena tidak pernah capek membimbing pemikiran-pemikiran penulis yang semrawut.
- ✧ Para Komisi Penguji, Pak Djoko yang kadang-kadang membuka benak penulis lewat pertanyaan-pertanyaan sederhana hingga mengarah ke diskusi informal, Mas Wahyu, yang memberikan kritik dan sumbangan-sumbangan idenya untuk penulis, Bu Tatie, terimakasih atas kritik-kritiknya yang sangat membantu.
- ✧ Dua dosen wali penulis, Bu Sartika yang sedang menyelesaikan studi di Australia, dan penggantinya, Mas Yunus yang rajin menanyakan kabar skripsi penulis tiap kali menyerahkan KRS serta seluruh dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Pak Sudjadino yang sedang menikmati masa pensiun, Bu Liliek, Bu Ani, Bu Irma, Mas Joko (KP jadi sepi gosip ne ga ada Mas Joko!!), Pak Muttaqien yang juga sedang menuntut ilmu, Pak Dugis yang akan segera kembali dari Australia, terima kasih untuk ilmu yang telah dibagikan.
- ✧ Mas Wawan, kakakku yang memiliki kakakter unik untuk ukuran seorang 'kakak'. Terimakasih untuk dukungan finansialnya (yang akhir-akhir ini sudah tidak begitu lancar lagi!) juga untuk bantuan-bantuan lainnya yang dapat memperlancar proses penyusunan skripsi ini. Yang sabar ya punya adik kaya aku! Hehehe.....
- ✧ Agustin, Asri dan Bayu, teman-teman yang sudah lama tidak ditemui, tapi tetap memberi *support*. *Thanks guys!!*
- ✧ *Special thanks to* HI 2001 yang sudah berbagi banyak pengalaman seru. Teman-teman diskusiku: Dyah (*thanks* udah bantuin aku mikir!! Cepet cari kerja ya, *don't give up!!*Gak usah mikirin stempel lagi), Anggie (pas pengen pingsan kok mesti sama kamu ya?! *Thanks for everything*. Cepetan kerjain skripsimu!!), Nanang (tunggu aku, kita akan segera bersaing di dunia 'cari kerja'), Lana (sampai ketemu di Pejaten), Jufri (aku belajar banyak dari kamu, Jup!*Thanks* ya!), I'ok (masih tetep pengen yang September ya?!), Su"Britney"Gianni "Versace" (ga penting kok terus-terusan, Brit..Brit!!hehe..), Ferry (susah banget nyaingin nilai *excellent*-mu?1), Wiwied (akhirnya aku

bisa mengejarmu, kita lulus bareng!!), Silvana (*thanks* buat *supportnya* di detik terakhir, *but, have I really done the hardest job?*), Widy (*club* kita sudah hampir berkurang neh!!Makasih udah ngasih *support* terus), Hani (kenapa baru kemarin kita dekat?!Sabar, Han, tinggal berapa hari aja kok!!). Temen hura-hura: Fani (kapan berangkat?Aku bantuin pindahan ya?!hehe...), Anggun (jadi malu ne, ingat waktu mau pingsan dulu..), Devy (hoi, sejak kapan ada yang namanya 'internal', kok aku gak tau sama sekali?!), Udien 'mantan joki motorku' (buru-buru banget sih balik Jakarta?), DJ Titi (udah lama ne gak pernah denger suaramu di radio), Pinky (makasih buat dvd, buku, *and nice trip to Jakarta*). Begundals: Hendra (giliranku doain kamu biar cepet lulus ne!!), Juned (lebarkan sayap bisnismu, tapi inget skripsimu!!), Roys (peringatan pemerintah: rokok bisa menyebabkan penyakit paru-paru, gangguan kehamilan dan janin. Ok!!), Bimo (*I really admire your patience, but beware of it!!!*), Repsy (nortonmu merusak komputerku! Tapi makasih udah ngilangin virusnya), Tito (jangan menyerah, Pak Djoko tiap hari ke kampus kok!), Dimas (*keep on walking!!*). Temen lainnya yang sudah jarang kelihatan, mbak Nita (terus berjuang ya, Mbak. Tinggal dikit lagi kok!), Ché-Ché (sukses ya di Jakarta!!), Hughes (yang rukun ya di kos sama Anggie), Irma (pengalaman kita membuat pikiranku jadi lebih terbuka), Ulfa (nunggu apa lagi?), Luki (enak ga di Maospati?), Desi (idem sama Dyah), Manto (piye kabare?), Dina, Icha, (ayo, cepetan!!), Angger (aku tunggu undangannya!!).

- ❖ *All Hlers*, mbak-mbak, mas-mas dan adik-adik rekan HI yang sudah memadati HI News Corner dan secara tidak langsung memberi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi dan keluar dari kampus. *Well, you gave me no choice!!*
- ❖ Mbak Pri, terimakasih sudah memperkenankan ikoma menjadi *base camp* kedua HI 2001. Mbak Fitri dan Mbak Endah di rujukan serta Mbak Renny di akademik yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis di tengah-tengah tugas yang ruwet.
- ❖ *Last but not least*, untuk seluruh keluarga besarku, termasuk adik-adik kecilku (Abel, Bahrum dan Galih), yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan kuliah. Terima kasih untuk semua doa dan dukungannya.

Terakhir, penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang belum penulis sebutkan karena ketidaksengajaan dan keterbatasan tempat untuk menyampaikan apresiasi yang sangat besar. Sekali lagi, penulis sampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sidoarjo, 24 Mei 2006

inyu simuk

... terkadang kita perlu melihat ke belakang sejenak
untuk dapat berjalan lebih jauh ke depan ...

KATA PENGANTAR

Tidak banyak orang yang menyadari bahwa pada dasarnya kondisi politik di Myanmar saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia berada di bawah kekuasaan militer. Kekuasaan militer ini kemudian semakin meluas ke segala penjuru hingga ke dalam parlemen. Kebebasan pers saat itu juga berada dalam kontrol pemerintah. Situasi yang sama juga sedang terjadi di Myanmar. Than Shwe, pemimpin tertinggi junta militer, berusaha membangun sebuah dinasti militer. Melalui SPDC (State Peace and Development Council), junta militer menguasai pemerintahan di Myanmar. Intrusi militer dilakukan hampir di setiap lini. Pemerintah junta militer akan segera “membungkam” opini dan kritik tajam terhadap pemerintahan yang dijalankan oleh junta militer. Demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah junta militer semakin menekan hak asasi dan kebebasan sosial-politik masyarakat Myanmar.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga nilai-nilai demokrasi mencapai puncaknya ketika pemerintah junta militer menganulir hasil pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis pada tanggal 27 Mei 1990. Dalam pemilihan umum tersebut, NLD (National League of Democracy)-partai oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyii-berhasil memenangkan 392 kursi dari 485 kursi yang tersedia di parlemen. Tidak lama kemudian, pemerintah junta militer membubarkan NLD dan beberapa partai oposisi lainnya serta mulai menahan tokoh-tokoh oposisi, termasuk salah satunya adalah Aung San Suu Kyii.

Dalam suatu kesempatan, Soe Win-yang saat itu menjabat sebagai salah satu petinggi USDA-menyatakan bahwa junta militer tidak hanya tidak akan berdialog dengan NLD, tetapi juga tidak akan pernah menyerahkan kekuasaan kepada NLD. Ucapannya itulah yang kemudian membawa Soe Win menjadi Sekretaris 2 dalam hirarki junta militer. Situasi dan kondisi yang terjadi di Myanmar ini kemudian mendapat perhatian besar dari masyarakat internasional.

Namun demikian, tidak cukup banyak pula literatur yang mengupas persoalan di Myanmar ini. Cukup mengherankan juga, mengingat begitu banyak tulisan-tulisan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia, permasalahan Myanmar luput begitu saja untuk dijadikan wacana, padahal permasalahan di Myanmar ini menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi tidak hanya satu atau dua tahun saja, tetapi telah berlangsung selama setengah abad. Selain itu, permasalahan Myanmar juga telah menjadi permasalahan internasional karena menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan juga pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Masyarakat internasional juga telah memberikan perhatiannya dengan menjatuhkan kecaman, sanksi dan ancaman dengan tujuan untuk menekan pemerintah junta militer Myanmar untuk segera melakukan perubahan. Permasalahan Myanmar ini tentunya akan menjadi wacana yang cukup menarik bila dikupas lebih mendalam seiring dengan perkembangan wacana demokrasi dan hak asasi manusia. Kurangnya ruang diskusi mengenai Myanmar itulah yang menjadi motivasi untuk tetap bertahan dengan judul ini.

Ide awal penelitian ini muncul pertama kali ketika sebuah surat kabar memuat berita tentang sanksi baru yang dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada

Myanmar. Beberapa hari berikutnya, surat kabar tersebut menulis berita bahwa junta militer Myanmar memecat perdana menteri yang baru menjabat selama 14 bulan. Berita tersebut memunculkan pertanyaan apakah pemecatan tersebut merupakan dampak dari sanksi yang baru saja dijatuhkan oleh Uni Eropa atau pemecatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah junta militer dalam menghadapi sanksi yang ternyata telah banyak diberikan. Pertanyaan yang muncul berikutnya adalah bagaimana pemerintah junta militer dapat bertahan dan tetap mempertahankan kekuasaannya dari berbagai tekanan internasional. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian menjadi landasan dari penelitian ini.

Berbagai keterbatasan yang ada, membuat tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan belum layak untuk disebut sebagai sebuah penelitian ilmiah yang sebenarnya. Namun, penulis berharap dengan adanya tulisan ini beserta berbagai kekurangannya, dapat memberikan wacana baru mengenai apa dan bagaimana Myanmar sehingga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional ke depan.

*"History was a sequence of cause and effect
which could only be appreciated by intellectual effort ."*
(Scott Burchill)

Sidoarjo, 8 Mei 2006

y.k

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| UCAPAN TERIMAKASIH | vi |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| I. 1. Latar Belakang | 1 |
| I. 2. Rumusan Masalah | 9 |
| I. 3. Tujuan Penelitian | 10 |
| I. 4. Kerangka Analisis | 10 |
| A. Level Analisis | 11 |
| B. Kerangka Pemikiran | 11 |
| 1. Kebijakan Luar Negeri dan Proses Pengambilan Keputusan | 11 |
| 2. Pertahanan Diri | 18 |
| 3. Strategi | 22 |
| 4. Politik Birokrasi | 25 |
| 5. Aliansi | 30 |
| I. 5. Argumen | 33 |
| I. 6. Metodologi | 34 |
| A. Konseptualisasi dan Operasionalisasi Konsep | 34 |
| 1. Pemerintahan Junta Militer | 34 |
| 2. Tekanan Internasional | 37 |
| 3. Konsolidasi | 38 |
| B. Tipe Penelitian | 40 |
| C. Ruang Lingkup Penelitian | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| E. Teknik Analisis Data | 41 |
| F. Sistematika Penulisan | 41 |

| | |
|---|-----|
| BAB II. LANGKAH INTERNAL PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR: UPAYA MENUJU KONSOLIDASI | 42 |
| II. 1. Kontrol Arus Informasi: Tekanan Terhadap Kebebasan Pers, Kebebasan Beropini dan Kebebasan Berekspresi | 43 |
| Implikasi Pembatasan Kebebasan Pers, Kebebasan Beropini dan Kebebasan Berekspresi | 52 |
| II. 2. Kebijakan Pendidikan Pemerintah Junta Militer: Kontrol Terhadap Universitas | 58 |
| II. 3. Kontrol Birokrasi: Sebuah Permainan Kekuasaan | 64 |
| A. <i>Reshuffle</i> : Bagian dari Permainan Kekuasaan | 66 |
| B. Pertimbangan di balik <i>Reshuffle</i> | 70 |
| BAB III. LANGKAH EKSTERNAL PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR: <i>QUID PRO QUO</i> | 76 |
| III. 1. Enam Negara Anggota ASEAN | 78 |
| A. Thailand | 78 |
| B. Singapura | 82 |
| C. Malaysia | 85 |
| D. Vietnam, Laos, Kamboja | 87 |
| III. 2. China | 88 |
| III. 3. India | 97 |
| III. 4. Bangladesh | 107 |
| III. 5. Rusia | 109 |
| III. 6. Korea Selatan | 111 |
| BAB IV. KONSOLIDASI DAN KERJASAMA: SUATU STRATEGI UNTUK BERTAHAN | 113 |
| IV. 1. Langkah Internal | 119 |
| IV. 2. Langkah Eksternal | 126 |
| BAB V. KESIMPULAN | 130 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|--|-----|
| Tabel II. 1 | Daftar Jurnalis, Penulis dan Puitikus yang ditangkap oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar (1988-2003) | 55 |
| Tabel II. 2 | <i>Reshuffle</i> September 2004 | 66 |
| Tabel II. 3 | <i>Reshuffle</i> Februari 2003 | 68 |
| Tabel II. 4 | <i>Reshuffle</i> 25 Agustus 2003 | 69 |
| Tabel III. 1 | Perusahaan Konsorsium Eksplorasi Gas Alam di Blok A-1 | 112 |
| Tabel IV. 1 | Upaya Internal dan Eksternal Pemerintah Junta Militer Myanmar | 114 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions
- Lampiran 2. The Computer Science Development Law
- Lampiran 3. Foreign Investment of Permitted Enterprises up to November 1999
- Lampiran 4. Foreign Investment of Permitted Enterprises up to November 1999

ABSTRAK

Kondisi politik serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar mulai mendapatkan respon dari masyarakat internasional melalui beragam tekanan internasional, terutama setelah pemerintah junta militer menolak hasil pemilihan umum yang telah dilaksanakan secara demokratis pada 27 Mei 1990 dan menangkap beberapa tokoh oposisi, salah satunya adalah Aung San Suu Kyii. Tekanan-tekanan tersebut tidak hanya berupa kecaman, tetapi juga berupa sanksi dan ancaman-ancaman politik dan ekonomi. Namun demikian, meski berbagai tekanan internasional berjatuh, pemerintah junta militer Myanmar masih tetap dapat mempertahankan kekuasaannya hingga saat ini. Dari latar belakang tersebut, muncul pertanyaan bagaimana pemerintah junta militer Myanmar dapat bertahan di tengah tekanan-tekanan yang diterimanya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan unit analisis kelompok individu dan dua unit eksplanasi yang berada pada peringkat negara-bangsa dan sistem internasional. Sedang kerangka pemikiran yang digunakan dalam menjawab permasalahan, dibangun melalui teori kebijakan luar negeri dan proses perumusan kebijakan yang dipakai untuk menggambarkan bahwa birokrasi sangat berpengaruh dalam proses perumusannya kebijakan luar negeri; konsep pertahanan diri yang menjadi landasan utama kebijakan luar negeri yang dibuat; konsep strategi untuk menjelaskan sarana-sarana yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan politik; teori politik birokrasi yang menggambarkan *power struggle* dan upaya saling mengontrol antar anggota dalam suatu birokrasi demi mendapatkan pengaruh lebih besar dalam proses pengambilan keputusan; serta konsep aliansi yang menjelaskan aliansi sebagai salah satu alat pertahanan diri melalui mobilisasi kapabilitas.

Dari latar belakang masalah dan kerangka analisis tersebut, argumen yang diajukan adalah bahwa pemerintah junta militer Myanmar dapat bertahan di tengah berbagai tekanan yang diterimanya dengan melakukan dua langkah, yaitu langkah internal, merupakan upaya menuju konsolidasi, serta langkah eksternal dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Berdasarkan kerangka pemikiran dan didukung dengan data dan fakta yang ditemukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah junta militer Myanmar melakukan upaya konsolidasi kekuasaan dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa negara membantu pemerintah junta militer Myanmar untuk bertahan meski mendapat beragam tekanan.

Kata kunci: Myanmar, Junta Militer, Tekanan Internasional, Konsolidasi dan Aliansi.

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Setelah berhasil merebut kemerdekaan dari Inggris dan kemudian memproklamasikannya pada tanggal 4 Januari 1948, Burma berupaya meniti jalan ke arah demokrasi. Antara tahun 1948 hingga tahun 1962, pemerintahan Burma berada di jalur demokrasi, akan tetapi kudeta tahun 1962 telah mengakhiri pemerintahan demokratis pimpinan U Nu dan membawa Burma dalam pemerintahan junta militer di bawah pimpinan Jenderal Ne Win.¹ Sejak saat itu, kondisi politik Burma menunjukkan kondisi yang memprihatinkan di mana rezim militer yang berkuasa memerintah masyarakat Burma dengan tekanan, kekerasan, perkosaan, penganiayaan dan eksploitasi. Bahkan, bentuk kekerasan semacam itu juga ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.²

Akibat yang muncul dari keadaan tersebut adalah arus pengungsi masyarakat Burma yang semakin banyak ke negara-negara tetangga, khususnya masyarakat dari kalangan etnis minoritas. Eksodus tersebut juga dilatarbelakangi oleh program *Burmanisation* oleh junta militer Burma, karena sebagian besar anggota militer dan pemerintahan Burma adalah dari kelompok etnis 'Burma', yang juga merupakan kelompok etnis mayoritas di Burma. Selain mempraktekkan kekerasan terhadap hak-hak politik, ekonomi dan sosial kalangan etnis minoritas,

¹ Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2004.

² Anais Tamen, *The European Union's Sanctions Related to Human Rights: The Case of Burma/Myanmar* (Disertasi Pasca Sarjana Politik Internasional Universitas Libre de Bruxelles, Belgia, 2002-2003), hal. 5. Diakses dari www.ibiblio.org tanggal 28 Oktober 2004.

program *Burmanisation* tersebut berubah menjadi *ethnic cleansing* yang dijalankan oleh angkatan bersenjata Burma (Tatmadaw) dan ditujukan kepada etnis minoritas.³ Beberapa di antara kelompok etnis minoritas yang menjadi sasaran *Burmanisation* Tatmadaw adalah etnis Chin, Kachin, Karen, dan Arakan.

Kebangkitan gerakan massa sebagai respon atas ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan yang tersentralisir, penuh dengan tekanan dan pengelolaan ekonomi yang buruk, diawali pada tahun 1988. Pada tahun yang sama, setelah terjadi demonstrasi massa yang berakhir dengan represi berdarah, Ne Win yang telah berkuasa selama 26 tahun akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden, dan mengusulkan adanya pemerintahan dengan sistem multipartai. Dalam masa transisi tersebut, untuk sementara Burma berada di bawah pemerintahan sipil, namun kemudian pemerintahan diambil alih oleh militer melalui kudeta berdarah pada 18 September 1988.⁴ Sejak saat itu, Burma berada di bawah pemerintahan junta militer dengan bendera SLORC (State Law and Order Restoration Council), dengan Jenderal Saw Maung sebagai pemimpin tertinggi. Dalam periode ini pula, nama Burma dirubah menjadi Myanmar oleh pemerintah junta militer Myanmar.⁵

Tahun 1990, SLORC mengadakan pemilihan umum dalam skala nasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan setelah sekian lama Myanmar berada di bawah pemerintahan junta militer yang otoriter. Penyelenggaraan pemilihan umum 1990 tersebut dimaksudkan untuk mengakhiri kekacauan politik Myanmar, dan menjadi langkah awal menuju sistem multi

³ *Ibid.*

⁴ "Ambisi Sang Putri Jungkalkan Dinasti Ne Win: Kisah Tragis Mantan Orang Terkuat Myanmar," *Kompas*, 29 September, 2002, diakses dari www.kompas.com tanggal 22 November 2005.

⁵ *Ibid.*

partai serta untuk memilih anggota parlemen nasional (Pyithu Hluttaw). Namun, sebelum pemilihan umum diadakan, pemerintah SLORC menahan tokoh-tokoh dan aktivis dari partai oposisi, NLD (National League for Democracy), di antaranya adalah Aung San Suu Kyii dan Jenderal Tin U, keduanya merupakan pemimpin NLD.

Pemilihan umum yang diadakan tanggal 27 Mei 1990 tersebut ternyata memberikan hasil yang tidak memuaskan bagi pemerintah saat itu, karena National Unity Party (NUP) – partai rezim saat itu – mengalami kalah mutlak dari partai oposisi pimpinan Aung San Suu Kyii, NLD (National League for Democracy). NLD berhasil memenangkan 392 kursi dari 485 kursi yang tersedia di parlemen, sedangkan NUP hanya memperoleh 3% dari kursi parlemen.⁶ Akan tetapi, pemerintah junta tidak mengakui hasil pemilihan umum tersebut dan membubarkan NLD secara unilateral. Akhirnya, Myanmar kembali berada di bawah kekuasaan rezim militer yang menamakan diri SLORC dan kekuasaan junta militer tersebut semakin terjustifikasi dengan ketiadaan konstitusi nasional.

Tahun 1992, kedudukan Jenderal Saw Maung sebagai petinggi junta militer saat itu digantikan oleh Jenderal Than Shwe.⁷ Pada tahun 1993, SLORC mencoba menyelenggarakan Konvensi Nasional untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar rancangan konstitusi baru, untuk menggantikan Konstitusi 1974 yang merupakan dasar dari terbentuknya Socialist Republic of the Union of Burma.⁸ Konvensi ini terlaksana berkat dukungan PBB terhadap upaya dan proses

⁶ Tamen, *Op. Cit.*, hal. 22.

⁷ *Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe*, 2004, *Loc. Cit.*

⁸ Tamen, *Op. Cit.*, hal. 23. Burma yang sebelumnya memiliki nama resmi Union of Burma, berubah menjadi Socialist Republic of the Union Burma setelah terbentuk konstitusi 1974.

demokratisasi di Myanmar. Konvensi Nasional tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 15% dari keseluruhan perwakilan yang terpilih dalam pemilu 1990.⁹ Di samping itu, prinsip-prinsip yang dibicarakan dalam konvensi harus disesuaikan dengan tujuan diadakannya konvensi yang telah ditentukan oleh junta (SLORC). Secara khusus, dalam perumusan konstitusi tersebut junta memusatkan perhatian besar pada peran politik Tatmadaw. Meski tampaknya pemerintah junta berupaya menjalankan proses demokratisasi, dan meskipun PBB telah mengeluarkan begitu banyak resolusi untuk mendorong junta agar membuat semacam *time table* agar tujuan-tujuan dalam konvensi tersebut dapat dicapai, namun konvensi tersebut tidak memberikan perubahan signifikan ke arah demokrasi.¹⁰

Di penghujung tahun 1997, SLORC membubarkan diri dan digantikan oleh SPDC (State Peace and Development Council). Akan tetapi, perubahan SLORC menjadi SPDC hanya sebuah perubahan 'cover' karena sistem dan kepemimpinan di dalamnya masih tetap sama. Perubahan tersebut oleh pemerintah junta dimaksudkan agar dunia internasional mempercayai itikad baik pemerintah junta yang berupaya memberikan perubahan bagi proses demokratisasi di Myanmar.¹¹ SPDC tidak membawa perbedaan apapun dalam upaya menuju demokratisasi. Bahkan, tekanan terhadap hak-hak politik semakin dipertajam dengan menahan kembali sejumlah aktivis dan tokoh pro-demokrasi dari partai NLD, termasuk salah satu di antaranya adalah Aung San Suu Kyii.

Dunia internasional mulai menunjukkan respon terhadap permasalahan yang terjadi di Myanmar ketika menerima laporan dari Perserikatan Bangsa-

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Bangsa (PBB) mengenai pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah junta militer Myanmar. Dari Barat, tekanan terhadap pemerintah junta militer Myanmar diwujudkan dalam bentuk penetapan sanksi-sanksi dan penundaan pemberian bantuan bilateral. Beberapa negara yang secara intensif melihat perubahan di Myanmar adalah Amerika Serikat dan European Community. Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pertama kalinya terhadap Myanmar tahun 1989. Pada akhir dekade 1980an, negara-negara anggota European Community secara individual menunda pemberian *non-humanitarian aid*, kemudian dilanjutkan tahun 1990, European Community mengadopsi embargo senjata dan penundaaan kerja sama pertahanan pada tahun 1991.¹² Eropa tidak mengambil tindakan supranasional hingga tahun 1996. Tekanan dari dunia internasional ini semakin intensif ketika Aung San Suu Kyi mendapat penghargaan Nobel pada Oktober 1991 atas komitmennya untuk melakukan perubahan dengan cara damai.

Tekanan-tekanan politik yang menguat, *drugs issues*, dan peristiwa tewasnya duta besar Eropa untuk Myanmar pada tahun 1996 sebagai peristiwa kunci, semakin memperkuat alasan bagi Amerika Serikat dan Eropa untuk menjatuhkan sanksi dan menekan pemerintah junta militer Myanmar. Akhirnya, pada tahun tersebut, Uni Eropa mengambil tindakan supranasional untuk pertama kalinya dengan menerapkan kebijakan Common Position di Myanmar.¹³ Kebijakan Common Position tersebut meliputi embargo senjata dan penundaan kerjasama pertahanan. Sedang Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Common Position merupakan salah satu instrument dari EU Common Foreign and Security Policy (CFSP). Dua instrument CFSP lainnya, yaitu Common Strategy dan Joint Action, tidak digunakan oleh Uni Eropa dalam kasus Myanmar ini.

sangat tegas terhadap pemerintah junta militer Myanmar sehubungan dengan peran Myanmar sebagai produsen obat-obatan terlarang terbesar kedua di dunia. Dan Amerika Serikat merupakan sasaran konsumen terbesar obat-obatan terlarang yang berasal dari Myanmar. Bila sebelumnya pada tahun 1989, Amerika Serikat menghapus Myanmar dari daftar “*cooperating States in Counter Narcotics Programs*” dan menghentikan bantuan serta menunda kesepakatan mengenai tekstil, maka pada tahun 1994 Amerika Serikat menempatkan Myanmar sejajar dengan Libya, Korea Utara dan Iraq sebagai negara yang melanggar hukum (*outlaw states*), dan pada tahun 1996 Amerika Serikat menetapkan larangan visa bagi pejabat-pejabat Myanmar.¹⁴

Tahun 1997, Amerika Serikat kembali memperkuat sanksinya terhadap Myanmar. Penguatan sanksi tersebut juga diikuti oleh negara-negara anggota Uni Eropa pada bulan April 2000.¹⁵ Selanjutnya, pada bulan Juli 2003, Amerika Serikat juga menetapkan sanksi barunya kepada Myanmar. Amerika Serikat melarang Myanmar menggunakan mata uang dollar AS sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasionalnya.¹⁶ Respon internasional terhadap masalah HAM dan demokrasi di Myanmar ini semakin menguat ketika junta militer Myanmar kembali memicu terjadinya bentrokan massal pada akhir Mei 2003, dikenal dengan peristiwa Black Friday, yang diikuti dengan penangkapan kembali Aung San Suu Kyii. Pada bulan Oktober 2004, Uni Eropa menetapkan beberapa sanksi baru kepada pemerintah junta militer Myanmar, di samping

¹⁴ *Ibid.*, hal. 40

¹⁵ *Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe*, 2004. *Loc Cit.*

¹⁶ *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 35, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

memperpanjang sanksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Keputusan untuk menetapkan sanksi tersebut disampaikan oleh Uni Eropa pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Eropa (Asian-Europe Meeting – ASEM) yang berlangsung di Hanoi tanggal 8–9 Oktober 2004.

Tekanan-tekanan internasional terhadap Myanmar tidak hanya datang dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Beberapa negara lain yang juga menunjukkan respon terhadap permasalahan di Myanmar ini antara lain, Jepang, India dan negara-negara anggota ASEAN. Jepang dan India melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih lunak, dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa, dalam menekan pemerintah junta militer Myanmar untuk segera menegakkan HAM dan melaksanakan demokratisasi. Bila Jepang lebih cenderung terkonsentrasi pada aspek ekonomi, maka India melakukan *'two track approach'*, yaitu menjalin hubungan dengan pemerintah junta di samping memberikan keleluasaan terhadap individu dan organisasi-organisasi untuk mengkritik rezim yang berkuasa serta memberikan dukungan kepada komunitas yang ditekan oleh junta.¹⁷

Sedangkan ASEAN, organisasi regional yang menerima Myanmar sebagai anggotanya pada tahun 1997, masih berada dalam dilema prinsip non-intervensi yang dipegang sejak awal berdirinya tahun 1967. Bahkan, Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, menentang sanksi yang telah dijatuhkan oleh Uni Eropa kepada Myanmar. Menurut Indonesia, sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa tersebut dinilai *counter-productive*, dan membuat Myanmar semakin jauh

¹⁷ Tamen, *Op. Cit.*, hal. 42

mengasingkan diri. ASEAN lebih memilih untuk menerapkan kebijakan *constructive engagement*, karena dinilai sesuai dengan apa yang dinamakan “The ASEAN Way” dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN.¹⁸ Atas kebijakan tersebut, ASEAN memilih jalur pendekatan dialogis dan persuasif. Sikap ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Treaty of Amity (TAC) yang ditandatangani di Bali tahun 1976. Hal tersebut juga ditegaskan oleh utusan khusus Indonesia untuk Myanmar, Ali Alatas, kepada Radio Free Asia tanggal 20 September 2004, bahwa ASEAN memiliki cara yang lebih baik daripada menjatuhkan sanksi.¹⁹

Kasus pelanggaran HAM dan demokrasi di Myanmar ini tidak hanya mendatangkan respon dari negara-negara di dunia, tetapi juga dari organisasi-organisasi internasional, baik organisasi pemerintah, maupun non-pemerintah. Organisasi-organisasi internasional ini berperan dalam upaya mengurangi dampak krisis kemanusiaan terhadap masyarakat Myanmar, yang berada di dalam Myanmar maupun di negara-negara perbatasan. Isu atau agenda yang diangkat oleh organisasi-organisasi internasional ini meliputi penggunaan *forced labour*, eksploitasi anak, diskriminasi dan represi yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar. Selain itu, organisasi internasional ini juga melakukan lobi-lobi kepada pemerintah-pemerintah yang berpengaruh, termasuk pemerintahan junta itu sendiri. Beberapa di antara organisasi-organisasi internasional tersebut antara lain United Nations (UN), International Labour Organization (ILO), International

¹⁸ Faustinus Andrea, “ASEAN Way dan Masalah Myanmar,” *Kompas*, 6 September, 2003, diakses dari www.kompas.com tanggal 28 Oktober 2004.

¹⁹ Sai Wansai, *ASEAN, EU and Dual Track Policy*, diakses dari www.iblibio.org tanggal 28 Oktober 2004.

Confederation Free Trade Union (ICFTU), European Trade Union Confederation (ETUC), Amnesty International, dan World Trade Organization (WTO).²⁰ Keseluruhan organisasi internasional tersebut memberikan kecaman yang diwujudkan dalam bentuk resolusi, sanksi dan boikot agar rezim militer Myanmar segera melakukan perubahan ke arah penegakan HAM dan demokrasi.

Tekanan-tekanan internasional tersebut merupakan respon atas pelanggaran HAM dan demokrasi yang terjadi di Myanmar hingga saat ini. Melalui tekanan-tekanan tersebut, dunia internasional berharap agar pemerintah junta militer Myanmar segera melakukan upaya perubahan untuk menghormati hak asasi manusia serta segera membebaskan Aung San Suu Kyii, yang merupakan simbol demokrasi di Myanmar. Patut menjadi bahan kajian bagaimana pemerintah junta militer Myanmar dapat bertahan di tengah tekanan-tekanan internasional yang semakin deras. Langkah-langkah yang dijalankan oleh pemerintah junta militer Myanmar untuk dapat mempertahankan kekuasaannya di tengah beragam tekanan yang diterimanya tersebut menjadi pondasi penelitian ini.

I. 2. RUMUSAN MASALAH

Kasus pelanggaran HAM dan demokrasi di Myanmar telah mengundang banyak respon dari masyarakat internasional. Sampai saat ini, kecaman dan sanksi atas permasalahan yang terjadi di Myanmar terus bergulir, dan Myanmar tidak bisa lepas dari tekanan-tekanan internasional selama Myanmar tidak menunjukkan perubahan signifikan ke arah demokrasi. Namun

²⁰ Tamen, *Op. Cit.*, hal. 38

demikian, pemerintah junta militer Myanmar masih tetap dapat bertahan. Berangkat dari fenomena tersebut, maka permasalahan yang diajukan adalah: bagaimana pemerintah junta militer Myanmar dapat bertahan di tengah tekanan-tekanan yang diterimanya?

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

Di tengah derasnya gelombang ketiga demokrasi di antara negara-negara dunia ketiga, cukup mencengangkan melihat pemerintah junta militer dapat bertahan selama hampir setengah abad. Kecaman, ancaman, sanksi dan berbagai upaya dari masyarakat internasional untuk menekan pemerintah junta militer Myanmar telah dikeluarkan, namun kondisi dalam negeri Myanmar belum menunjukkan perubahan. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar untuk dapat bertahan di tengah berbagai tekanan yang diterimanya.

I. 4. KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar dalam bertahan di tengah berbagai tekanan-tekanan internasional, serta tekanan-tekanan internal. Agar diperoleh hasil yang akurat, perlu ditetapkan unit analisis dengan peringkat analisis yang sesuai serta menggunakan kerangka pemikiran yang sesuai untuk menjawab permasalahan.

A. Level Analisis

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah perilaku yang ditunjukkan oleh pemerintah junta militer Myanmar dalam menghadapi tekanan-tekanan internasional. Unit analisis ini berada pada level kelompok individu, karena permasalahan difokuskan pada upaya pemerintah junta militer Myanmar untuk mempertahankan kekuasaan.

A. Kerangka Pemikiran

1. KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN

Setiap negara di dunia ini tentu memiliki ambisi untuk dapat mencapai kepentingan nasional yang tertuang dalam politik luar negeri mereka, dan perilaku tiap negara dalam upaya mencapai kepentingan nasional tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, karena itu diperlukan sebuah instrumen untuk mencapai kepentingan nasional tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai pedoman negara untuk melakukan sebuah tindakan yang berkaitan dengan upaya pencapaian kepentingan nasional. Dalam hal ini, negara perlu untuk merumuskan kebijakan luar negeri (*foreign policy*). Russett menyatakan bahwa kebijakan luar negeri adalah: *a set of guides to choice being made about people, places, and things beyond the boundaries of state*.²¹ Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas proses perumusan kebijakan luar negeri, perlu dijelaskan hubungan antara politik luar negeri dan kebijakan luar negeri.

²¹ Bruce Russett, Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W.H. Freeman and Company, 1985), hal. 191.

Di atas telah dikatakan bahwa kebijakan luar negeri merupakan serangkaian pedoman untuk membuat keputusan mengenai segala permasalahan yang menentukan perilaku negara di luar batas wilayahnya. Selain itu, menurut Plano dan Olton, kebijakan luar negeri adalah suatu strategi atau sekumpulan tindakan yang direncanakan, yang dikembangkan oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau entitas internasional yang ditujukan pada pencapaian tujuan tertentu berdasarkan kepentingan nasional yang telah ditentukan.²² Sedangkan secara umum, politik luar negeri merupakan serangkaian proses pembuatan kebijakan untuk menanggapi situasi internasional. Atau dengan kata lain, politik luar negeri adalah upaya untuk mendefinisikan kepentingan nasional dan menetapkan tujuan nasional. Jadi, kebijakan luar negeri merupakan instrumen untuk melaksanakan politik luar negeri.

Michael Mendlebaum menyebutkan dua dimensi kebijakan luar negeri, yang pertama adalah *inside-out* dan kedua adalah *outside-in*. Dimensi pertama, *inside-out*, melihat kebijakan luar negeri sebagai perpanjangan tangan dari politik domestik suatu negara. Seperti yang digambarkan oleh pemikiran realis yang menyebutkan bahwa tujuan utama perumusan kebijakan luar negeri adalah untuk melindungi eksistensi negara, dan lingkungan internasional menjadi penentu utama bagi tindakan negara. Dimensi kebijakan seperti ini menjadi karakteristik kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh negara-negara besar yang memiliki pengaruh kuat dalam sistem internasional. Sedang dimensi kedua, *outside-in*, banyak ditemui di negara-negara berkembang, khususnya negara dunia ketiga

²² Jack C. Plano, Roy Olton, *International Relation Dictionary* (California: ABC-Clia Inc., 1982), hal. 7.

yang tidak memiliki pengaruh besar dalam dinamika internasional. Dimensi kebijakan ini memandang bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara adalah sebagai respon terhadap dinamika eksternal. Kebijakan luar negeri tersebut menjadi sebuah *structural adjustment* bagi kondisi domestik negara.

Namun, terlepas dari kedua dimensi kebijakan luar negeri tersebut, proses perumusan kebijakan tidak bisa lepas dari peran para pembuat kebijakan (*decisions makers*) di mana para pembuat kebijakan ini dapat bertindak sebagai individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok (grup). Dalam merumuskan kebijakan, *decision maker* dikelilingi oleh berbagai faktor dan tiap-tiap faktor tersebut mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam tulisan Kegley dan Wittkopf, secara umum dikatakan bahwa proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh situasi domestik negara tersebut serta situasi internasional saat itu.²³ Lebih luas lagi, menurut Snyder, Bruck dan Sapin, perumusan kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh 5 (lima) determinan, yaitu:²⁴

- a. *Variabel Ideosinkretik (Ideosyncracy)*, berkaitan dengan persepsi, *image*, dan karakteristik pribadi pembuat keputusan. Variabel ini sangat sulit diukur, karena berkaitan dengan aspek psikologis dan predeliksi individu.

²³ Charles W. Kegley, Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation* (6th ed., London: Macmillan Press Ltd., 1997), hal. 40-41.

²⁴ Richard C. Snyder, H. W. Bruck and Burton Sapin, "The Decision Making Approach to the Study of International Politics," *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory* ed., James N. Rosenau (New York: The Free Press, 1969), hal.199-206.

- b. *Variabel Peranan (Elit Birokrasi)*, didefinisikan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan. Definisi peranan ini lebih mempengaruhi variabel-variabel politik dan *societal*.
- c. *Variabel Birokratis (Interdepartment Competition)*, menyangkut struktur dan proses pemerintah serta efeknya terhadap politik luar negeri. Variabel birokratis ini meliputi struktur organisasi pemerintah, standar prosedur pelaksanaan perwakilan-perwakilan birokratis yang besar, proses pembuatan keputusan pada berbagai peringkat perumusan kebijakan, berbagai teknik implementasi keputusan-keputusan politik, dan sikap para pejabat yang menyangkut dampak politik luar negeri terhadap politik domestik dan kesejahteraan umum negara.
- d. *Variabel Nasional (National Millieu)*, mencakup berbagai atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri, termasuk variabel lingkungan, seperti luas wilayah, lokasi geografis, tipe daerah, iklim dan sumber-sumber alam negara.
- e. *Variabel Sistemik (International Millieu)*, meliputi sejumlah besar variabel eksternal negara, termasuk kebijakan-kebijakan dan tindakan negara lain yang bisa merangsang respon politik suatu negara.

Berbicara tentang pengambilan keputusan (*decision making*) berarti berbicara mengenai orang-orang yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan luar negeri (*foreign policy*) dan di dalam bagian dari proses tersebut yang berhubungan dengan tindakan memilih di antara sekian banyak alternatif pilihan

(*choice*). Keputusan untuk tidak memilih sebuah keputusan juga merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut harus dipandang sebagai sebuah proses dan hasil dari proses tersebut adalah sebuah pilihan atas beberapa tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan dari pembuat keputusan tersebut.²⁵

Terdapat tiga model proses pengambilan keputusan, yaitu *rational model* atau disebut juga *intellectual processes*, *mechanical processes* dan *social processes*.²⁶ Model pertama, *intellectual processes*, berangkat dari asumsi bahwa pembuat kebijakan bersifat rasional, dan keputusan yang diambil dibuat secara rasional pula. Rasional berarti koherensi antara alat dan tujuan, dengan kata lain terdapat kontinuitas antara tujuan yang dicapai dan alat untuk mencapai tujuan tersebut. Rasional dapat pula diartikan sebagai daya kalkulasi untuk memperhitungkan untung dan rugi.

Dalam model pertama ini, negara dianggap sebagai aktor tunggal (*state as unitary actor*), sehingga mereka berbicara dengan satu suara (*speaks with one voice*). Negara dipandang sebagai sebuah unit monolitik, unit yang homogen dengan sedikit atau tanpa perbedaan dalam unit-unit negara tersebut yang dapat mempengaruhi keputusannya. Model intelektual ini menyebutkan bahwa untuk mencapai suatu keputusan, terlebih dahulu harus melalui beberapa langkah intelektual. Wittkopf dan Kegley merumuskan empat langkah intelektual tersebut, yaitu:²⁷

²⁵ Russett and Starr, *Op. Cit.*, hal. 271.

²⁶ *Ibid.*, hal. 274.

²⁷ Kegley and Wittkopf, *Op. Cit.*, hal. 51.

1. *Problem Recognition and Definition*

Tahap awal pengambilan keputusan adalah objektifitas permasalahan. Tahap ini memerlukan aliran informasi seluas-luasnya mengenai tindakan, motivasi dan kapabilitas yang dimiliki oleh aktor lain.

2. *Goal Selection*

Sebelum keputusan dibuat, para pembuat keputusan perlu untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai dari yang paling diinginkan hingga ke yang paling tidak diinginkan.

3. *Identification of Alternatif*

Rasionalitas juga memerlukan sederet daftar opsi-opsi kebijakan yang ada serta perkiraan biaya dari setiap alternatif tindakan tersebut.

4. *Choice*

Tahap terakhir adalah penyeleksian antara tiap alternatif pilihan dengan peluang terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam tahap ini, para pembuat kebijakan harus menunjukkan koherensi antara alat dan tujuan, analisis untung-rugi melalui prediksi yang akurat tentang kemungkinan keberhasilan setiap alternatif pilihan tersebut.

Keputusan juga dapat dibuat melalui rujukan keputusan, preseden, rutinitas yang berlangsung sebelumnya. Proses semacam inilah yang dijelaskan oleh model kedua dalam proses pembuatan kebijakan, yaitu *mechanical processes*, atau disebut juga *quasi –mechanical processes*.²⁸ Model ini berangkat dari asumsi bahwa pada dasarnya organisasi bersifat konservatif dan jarang

²⁸ Russett and Starr, *Op. Cit.*, hal. 281-282.

mencoba sesuatu hal yang baru. Sebuah organisasi biasanya cukup puas dengan suatu perubahan yang didasarkan pada keputusan dan perilaku di masa lampau. *Quasi-mechanical processes* mempengaruhi tidak hanya keputusan yang dibuat, tetapi juga implementasi keputusan tersebut.

Model ketiga, *social processes*, berasumsi bahwa dalam setiap proses pembuatan kebijakan terdapat interaksi sosial yang aktif di antara beberapa pembuat kebijakan sehingga menghasilkan keputusan, karena *foreign policy* itu sendiri berawal dari proses politik normal atas *bargaining, compromise, adjustment, arm twisting, trading favor* dan sebagainya. Aktivitas itulah yang menjadi inti dari proses sosial dalam pembuatan kebijakan. Dalam proses sosial tersebut, tiap aktor—presiden, perdana menteri, menteri luar negeri dan lainnya—berusaha untuk membuat pilihan-pilihan melalui proses intelektual, namun beberapa dari aktor tersebut mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut bukan permasalahan krusial karena masih terdapat aktor lain yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Partisipasi tiap aktor itulah yang akhirnya mengarah pada terbentuknya sebuah keputusan.²⁹

Dari ketiga model proses perumusan kebijakan tersebut, Allison menyatakan bahwa model rasional harus dikombinasikan dengan kedua model lainnya, yaitu *quasi-mechanical* dan *social processes*. Alasan dari pernyataan Allison tersebut adalah karena pemerintah sendiri terdiri dari individu-individu dan organisasi-organisasi dengan pandangan, nilai dan tujuan yang berbeda-beda.

²⁹ Pembahasan lebih jelas mengenai ketiga model proses pengambilan keputusan lihat dalam Graham T. Allison, *The Essence of Decision* (Boston: Little Brown, 1971); Russett and Starr. *Op. Cit.*, hal. 270-282.

Organisasi birokratis bersifat parokial dan setiap unit administratif di dalamnya berupaya untuk mencapai kekuasaan dan kepentingannya. Kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan organisasi tersebut bukan karena keegoisan untuk mengejar kepentingannya terlebih dulu di atas kepentingan nasional, tetapi karena organisasi birokratis tersebut melihat kepentingan organisasinya sebagai kepentingan negara. Allison mengemukakan dua elemen penting dalam pola politik birokratis ini. Elemen pertama adalah *Organizational Process*, mencerminkan posisi organisasi dalam pilihan-pilihan dari para pembuat kebijakan. Elemen kedua adalah *Governmental Politics*, berkaitan dengan karakter organisasi terhadap pembuatan kebijakan di dalam masyarakat yang kompleks.³⁰

Teori mengenai proses perumusan kebijakan ini dapat dipakai untuk menganalisis perilaku pemerintah junta militer Myanmar dalam mempertahankan kekuasaannya yang merupakan bagian dari kebijakan yang diambil oleh junta militer. Hal tersebut dikarenakan bahwa junta militer adalah satu-satunya birokrasi pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri yang dijalankan.

2. PERTAHANAN DIRI

Kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok dan membentuk sebuah komunitas didasarkan pada kebutuhan jaminan keamanan atas dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keamanan merupakan kebutuhan psikologis

³⁰ Graham T. Allison dikutip oleh Kegley and Wittkopf, *Op. Cit.*, hal. 56.

manusia yang paling mendasar. Kondisi serupa juga dialami oleh negara yang merupakan bagian dari sistem internasional. Negara berusaha untuk menjamin keamanan teritori serta termasuk warga negara yang berada dalam wilayahnya. Keamanan menjadi salah satu nilai dan kepentingan utama yang harus dicapai oleh setiap negara, karena keamanan merupakan salah satu nilai yang paling mendasar dari hubungan internasional.

Meski terdapat hukum, norma-norma dan konsensus internasional yang mengatur perilaku negara-negara dalam pergaulan internasional, kondisi alamiah sistem internasional yang anarki membuat keamanan suatu negara tidak dapat terjamin secara mutlak, sehingga untuk mendapatkan jaminan atas keamanan dan eksistensinya, negara tidak dapat mempercayakannya begitu saja kepada sistem internasional, melainkan harus dapat mengupayakannya sendiri. Seperti halnya ketika seseorang merasa bahwa keamanan dirinya terancam, maka secara naluriah ia melakukan segala macam upaya untuk mempertahankan dirinya dan memperoleh rasa amannya kembali. Logika pertahanan diri inipun juga berlaku bagi negara. Ketika suatu negara merasa bahwa dirinya terancam, maka ia segera melakukan upaya pertahanan diri untuk melindungi kedaulatan dan eksistensinya.

Usaha pertahanan diri merupakan tujuan jangka pendek suatu negara.³¹ Bila kepentingan pertahanan diri ini tidak dapat dipenuhi, maka tujuan-tujuan lainnya tidak dapat tercapai karena kepentingan pertahanan diri menjadi dasar dari

³¹ K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Analisa, terj.* Efin Sudrajat, *et.all.* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hal. 183.

eksistensi sebuah negara. Morgenthau menyebutkan bahwa kepentingan nasional dapat diukur melalui dua kerangka, yaitu:³²

- a. dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional
- b. dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa;

di mana kedua hal tersebut berkaitan dengan kepentingan nasional yang paling mendasar, yaitu *national survival value*.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan pertahanan diri menjadi salah satu kategori sasaran yang tidak bisa disisihkan dari perumusan politik luar negeri suatu negara. Secara konseptual, sedikitnya terdapat enam jenis kategori sasaran politik luar negeri setiap negara.³³ Keenam kategori sasaran politik luar negeri tersebut adalah:

1. Pertahanan Diri

Pertahanan diri merupakan kebaikan utama. Negara biasanya bertindak untuk memaksimalkan kemungkinan tetap eksis selama di dunia, yang merupakan tujuan utama dan tertinggi dalam politik luar negeri. Dan yang dimaksud dengan 'diri' di sini adalah kesatuan kolektif antara negara dan manifestasi manusia serta teritorialnya.

2. Keamanan

Karena sifat sistem internasional tidak memberikan kepastian keberlangsungan kehidupan negara, maka setiap negara harus mengatur hubungannya dengan dunia sedemikian rupa agar dapat menjamin keberadaannya. Akan tetapi, dengan kondisi sistem internasional yang

³²Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations* (New York: Alfred A. Knopf, 1948), hal. 103.

³³Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hal. 9-10.

anarki, keamanan sejati tidak mungkin dapat diperoleh. Maka, apa yang dimaksudkan mencari keamanan di sini adalah mengurangi bahaya ancaman seminimal mungkin.

3. Kesejahteraan

Dengan adanya jaminan atas keamanan melalui upaya pertahanan diri, maka negara dapat berusaha untuk mencapai kepentingan lainnya, yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan negara dapat dilihat melalui ukuran GNP dan laju pertumbuhan perekonomian negara.

4. Prestise

Selain berupaya untuk mengejar *primary interest*, negara juga berusaha untuk memperoleh prestise sehingga mendapat konsesi status dari negara lain.

5. Ideologi

Tidak sedikit negara yang menganggap bahwa perlindungan ideologi merupakan unsur penting dalam politik luar negeri, karena ideologi merupakan salah satu cermin eksistensi dan kedaulatan negara.

6. Kekuatan

Kekuatan menjadi sasaran bersama dari negara-negara. Setiap negara bersaing untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, karena kekuatan bisa dipakai sebagai sarana pertahanan diri dan juga sebagai prestise. Selain itu, kekuatan menjadi salah satu jalan untuk memperoleh kekuatan yang lebih besar.

Upaya pertahanan diri dalam pandangan para pembuat kebijakan pada umumnya ditujukan untuk meningkatkan pertahanan baik di wilayahnya sendiri maupun kestabilan daerah sekitarnya; serta mempertahankan keadaan politik, ekonomi dan sosial di dalam wilayah kekuasaannya. Beberapa negara meyakini pula bahwa pertahanan wilayah masing-masing dapat ditunjang melalui kerjasama dengan negara-negara tetangga.³⁴ Dukungan dan bantuan dari negara-negara sekitar dapat membantu mengoptimalkan upaya pertahanan diri yang dilakukan oleh suatu negara.

Dalam penelitian ini, konsep pertahanan diri menjadi argumen dasar dalam menganalisis tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional dan mengaitkannya dengan konsep-konsep tentang aliansi, proses perumusan kebijakan dan politik birokratis, sehingga dapat dianalisis jenis pertahanan diri apa saja yang diambil oleh pemerintah junta militer Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional.

3. STRATEGI

Strategi merupakan suatu seni untuk meraih tujuan politik dengan penggunaan alat-alat militer.³⁵ Lebih lanjut mengenai strategi ini, Neild menyatakan: "In formulating strategy, the first step is to decide on political aims. Without political aims, war is mindless destruction and the possession of military means in peacetime is mindless waste. Once political aims are specified, the

³⁴ Holsti, *Ibid*, hal. 184.

³⁵ Robert Neild, *An Essay on Strategy: as it Affects the Achievement of Peace in a Nuclear Setting* (London: The Macmillan Press Ltd, 1990), hal. 1.

military means must be selected and tolerated to fit those aims.”³⁶ Dari pernyataan Neild tersebut, tercermin bahwa strategi menjadi sarana implementasi tujuan politik. Penentuan tujuan politik menjadi langkah utama dalam memformulasikan strategi. Tanpa tujuan politik, semua upaya yang telah dilakukan menjadi sebuah upaya yang sia-sia, begitu juga dengan perangkat militer yang dimiliki. Setelah tujuan politik ditentukan, sarana militer yang dimiliki harus disesuaikan pula dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Cathal J. Nolan mendefinisikan strategi sebagai suatu “*grand plan*”, sebuah rencana utama yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan politik/militer tertinggi melalui beragam cara, baik politik, ekonomi, militer ataupun cara diplomatik.³⁷ Strategi juga menggambarkan rencana operasional terpadu dari pemerintah suatu negara dengan memanipulasi semua instrumen yang ada, baik militer maupun non-militer, dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh negara tersebut atas negara lain, baik itu sekutu, negara netral, dan musuh mereka yang potensial maupun aktual.³⁸ Tidak berbeda dengan tiga pengertian diatas, Hadi Soesastro mendefinisikan strategi ke dalam dua pengertian:³⁹

- secara sempit

strategi adalah kiat atau seni dengan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh politik.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Cathal J. Nolan, *The Greenwood Encyclopedia of International Relation* (London: Greenwood Press, 2002), IV, hal. 1602.

³⁸ J. Harould, Margareth Sprouch, *Fondation of International Politics* (New Jersey: D. Van Nostrad Company Inc., 1962), hal. 58.

³⁹ Hadi Soesastro, *Strategi Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik* (Jakarta: CSIS, 1988), hal. 171.

- secara luas

strategi adalah kiat untuk menggunakan semua jenis kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh politik.

Asumsi dasar strategi menurut Mochtar Mas'oeed berangkat dari asumsi bahwa perilaku pembuat kebijakan/keputusan luar negeri adalah rasional, maka pemilihan suatu strategi benar-benar didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian tujuan yang jelas.⁴⁰ Beberapa asumsi lain mengenai strategi dapat dibandingkan dengan asumsi dasar strategi yang dirumuskan oleh Patrick Morgan, yaitu:⁴¹

1. perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan rasional. Setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan ke arah pencapaian tujuan tersebut.
2. para pembuat keputusan selalu berusaha untuk memaksimalkan perolehan bagi negaranya. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, masing-masing dinilai berdasarkan analisis biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah memenuhi kriteria efisiensi.
3. dalam dunia yang interdependensi, ini berarti bahwa para pembuat keputusan harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi negara-negara lain. Dengan demikian, pilihan-pilihan tindakan strategis seringkali didasarkan pada penilaian tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan oleh pembuat keputusan.

⁴⁰ Mochtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 246.

⁴¹ Patrick Morgan, *Theories and Approaches to International Politics* (Transaction Publisher, 1982), hal. 90-91.

Bersama dengan kerangka pemikiran mengenai pertahanan diri, aliansi, pengambilan keputusan dan politik birokrasi, konsep strategi ini dapat membantu untuk menemukan strategi yang digunakan oleh pemerintah junta militer Myanmar sebagai suatu upaya yang dapat membantunya bertahan dari beragam tekanan.

4. POLITIK BIROKRASI

Dalam sebuah sistem politik, dalam hal ini negara, perumus kebijakan resmi yang aktif hanya meliputi sebagian kecil penduduk dewasa. Wewenang kontrol terhadap kebijakan menjadi dasar bagi para perumus kebijakan tersebut untuk membentuk suatu kelompok elit (politik), salah satunya adalah birokrasi. Birokrasi menjadi sebuah kelompok kecil para perumus kebijakan (*small group decision making*).

Selanjutnya, keseluruhan elit tersebut terlibat dalam apa yang disebut dengan permainan kekuasaan, sebuah interaksi politis di mana terdapat keterkaitan yang pelik di antara para elit politik tersebut dalam berbagai situasi; tentang siapa yang memegang kekuasaan, adu strategi untuk dapat mempertahankan posisi mereka masing-masing. Seperti yang dikatakan oleh Rosenau, birokrasi menjadi salah satu variabel penting yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan.⁴² Namun, apakah birokrasi itu? Menurut Robert L.

⁴² Rosenau, *Op. Cit.*

Wendzel, birokrasi adalah sebuah organisasi formal yang besar dengan karakteristik sebagai berikut:⁴³

- memiliki pola otoritas dan komunikasi yang hirarkis dengan hubungan superior-subordinat yang spesifik.
- memiliki spesialisasi peranan dan fungsi.
- memiliki pembagian tenaga kerja yang kompleks.
- memiliki operasi internal yang berlangsung melalui suatu prosedur yang menekankan peraturan dan regulasi.

Birokrasi merupakan suatu arena permainan yang di dalamnya terdapat upaya saling mengontrol antara masing-masing elit politik. Metode kontrol yang berkembang dalam birokrasi dimaksudkan untuk memenangkan suatu kebijakan.⁴⁴ Dengan kata lain, metode kontrol tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan birokratis mereka karena pada umumnya para elit birokrasi tersebut melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan negara mereka. Menurut Lindblom, beberapa metode kontrol tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah dengan memejarkan dan mengintimidasi lawan, bahkan dengan mencelakai atau menghancurkan reputasi lawan. Metode kontrol yang lebih lunak dapat dilakukan dengan cara persuasi, mengelabui untuk dapat menarik sekutu atau membungkam kritik. Salah satu metoda kontrol yang paling efektif adalah melalui kewenangan, karena

⁴³ Robert L. Wendzel, *International Relations: A Policy Maker Focus* (2nd ed., Toronto: John Wiley & Sons, Inc, 1980), hal. 240.

⁴⁴ Charles E. Lindblom, *Proses Penetapan Kebijakan*, terj. Ardian Syamsudin (2nd ed., Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986), hal. 54.

kewenangan menjadi landasan bagi persuasi. Melalui kewenangan, seorang elit dapat membujuk orang-orang di sekitarnya untuk patuh terhadap segala peraturan dan keputusan yang ditetapkannya. Kombinasi antara kewenangan dan beberapa metode kontrol lainnya sangat membantu seorang pemimpin untuk dapat mengkonsolidasikan organisasinya. Kepala pemerintahan dan pemimpin yang memiliki kewenangan besar dapat dengan mudah memerintah khalayak melalui media.

Dalam beberapa sistem pemerintahan, kewenangan dan persuasi sebagai sarana kontrol tercermin pada larangan untuk menghimpun khalayak yang terlalu besar, bagi siapapun selain mereka yang memiliki kewenangan. Tidak mengherankan bila pada suatu ketika seorang pemimpin melakukan tindakan ekstrim dengan tujuan untuk memperkuat konsolidasi dan mencapai kepentingannya yang dipandang sebagai kepentingan negara. Konsep ini tidak jauh berbeda dengan konsep kekuasaan seorang pemimpin yang dikembangkan pada sekitar abad 17 oleh Machiavelli. Konsep kekuasaan ini sering disebut sebagai “*extreme power*”. Machiavelli menyusun kekuasaan politik (*political power*) yang begitu kuat sehingga penguasa (*rulers*) dapat menggunakan segala cara untuk mengontrol para pengikutnya.⁴⁵ Pemimpin dapat menyusun struktur organisasi dalam proses perumusan kebijakan. Pemimpin juga dapat memilih tim anggota perumus kebijakan. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat menentukan siapa saja yang berhak terlibat dalam proses perumusan kebijakan, sebagaimana seorang presiden dapat memecat anggota kabinetnya bila presiden

⁴⁵ B. Aubrey Fisher, *Small Group Decision Making* (2nd ed., New York: McGraw-Hill, Inc., 1981), hal. 192.

tidak menyukainya. Presiden menentukan siapa yang harus didengarkan dan siapa yang harus dijauhkan dari lingkaran perumusan kebijakan.⁴⁶ Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Fisher: "A small group head would determine the goal of the group, give direction that must be obeyed willingly or unwillingly, and levy direct sanction against non-followers."⁴⁷

Menurut Wendzel, tujuan dari birokrasi politik luar negeri (*foreign policy bureaucracy*) adalah untuk membantu pembuat kebijakan utama dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan optimum.⁴⁸ Birokrasi kebijakan luar negeri dirancang untuk merefleksikan kebutuhan spesialisasi dan ekspertasi dalam pelaksanaan hubungan internasional, dan untuk menyediakan pengumpulan, penginterpretasian dan pentransmisi informasi yang akurat sesegera mungkin kepada pihak-pihak yang dianggap tepat. Penguasaan terhadap arus komunikasi dan informasi dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi sebuah birokrasi.⁴⁹

Salah satu hambatan dalam proses kerja birokrasi adalah kurangnya inisiatif dan inovasi. Kebijakan cenderung diarahkan ke arah kebijakan yang aman sehingga kebijakan yang diambil selalu didasarkan pada prosedur-prosedur dan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, sehingga kebijakan yang dibentuk atas dasar kondisi demikian melibatkan sedikit ide-ide baru. Dengan kondisi demikian, maka para pembuat kebijakan tidak pernah mendapat kesempatan untuk

⁴⁶ John Spanier, *Games Nations Play* (7th ed., Washington D.C.: Congressional Quarterly, Inc., 1990), hal. 301-302.

⁴⁷ Fisher, *Ibid.*, hal. 192.

⁴⁸ Wendzel, *Op. Cit.*, hal. 240-241.

⁴⁹ Gordon Tullock, *The Politics of Bureaucracy* (Public Affairs Press, 1965), hal. 167-170 dalam Little & Smith, eds., *Perspectives on World Politics* (2nd ed., New York: Routledge, 1994), hal. 195.

mempertimbangkan ide-ide baru. Faktor-faktor yang menghalangi munculnya inisiatif dan inovasi dalam birokrasi antara lain:⁵⁰

- individu yang memiliki pandangan berbeda dari kebijakan organisasional cenderung untuk menyesuaikan pandangannya atau pandangannya tersebut ditolak.⁵¹ Bila individu tersebut tidak dapat diyakinkan untuk merubah pandangannya, maka ide-ide yang dimilikinya memberi pengaruh sangat kecil dalam proses perumusan kebijakan.
- Adanya kecenderungan alami di mana bawahan tunduk dan patuh terhadap pandangan atasan mereka. Hubungan superior-subordinat ini menghalangi munculnya ide/inisiatif baru karena dibatasi oleh adanya sanksi atau koersi informal.
- Fakta bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil harus melalui berbagai lapisan horisontal di dalam birokrasi. Ketika ide-ide baru tersebut sampai di lapisan puncak, ide-ide tersebut dikatakan sebagai ide-ide yang kurang inovatif dan tidak mewakili pandangan organisasi.
- Beragam spesialis dengan pandangan, perspektif dan sumber informasi yang berbeda mengharuskan adanya kompromi dalam perumusan kebijakan. Dan kompromi tersebut biasanya melibatkan penolakan secara radikal dan bahkan larangan untuk terlibat dalam perumusan kebijakan.

⁵⁰ Wendzel, *Ibid.*, hal. 242-243.

⁵¹ Joseph D. Rivera, *The Psychological Dimension in Foreign Policy* (Ohio: Charles E. Merrill, 1968), hal. 209-211, dalam Robert L. Wendzel, *International Relations: A Policy Maker Focus* (2nd ed., Toronto: John Wiley & Sons, Inc, 1980), hal. 242.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh para perumus kebijakan tersebut - baik itu upaya persuasi, ancaman dan imbalan - menunjukkan bahwa perumusan kebijakan sangat bergantung pada birokrasi dan permainan kekuasaan di dalamnya. Dalam politik-politik birokrasi, birokrat bekerja melalui metode-metode kontrol seperti yang telah dijelaskan di atas, terutama metode kewenangan, persuasi dan analisis. Semua kontrol tersebut digunakan baik secara individu maupun secara kerjasama dengan elit birokrat lain yang menemukan kesepakatan dalam beberapa persoalan yang menjadi landasan dari kebijakan yang diambil.

Penelitian ini menjadikan birokrasi sebagai titik berat penelitian di mana di dalam sebuah organisasi birokrasi terdapat permainan-permainan kekuasaan yang melibatkan individu-individu di dalamnya. Dengan mengkaitkan pada politik birokrasi, dapat dianalisis tindakan pemerintah junta militer Myanmar untuk memperkuat organisasinya dalam upaya menghadapi tekanan internasional.

5. ALIANSI

Manusia sejak awal memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok dan membentuk sebuah komunitas. Melalui komunitas tersebut, manusia mendapatkan jaminan keamanan atas dirinya. Demikian pula halnya dengan negara. Kondisi alamiah sistem internasional yang anarki disertai dengan distribusi kekuatan yang tidak merata dalam sistem internasional tersebut menjadi suatu ancaman tersendiri bagi sebuah negara, terutama negara yang tergolong dalam kategori negara minor. Kenyataan tersebut mendorong negara-negara di

dunia untuk berkelompok dan membentuk aliansi dengan tujuan untuk mendapatkan jaminan keamanan wilayah dan integritas negaranya. Dalam hal ini, keamanan merupakan kepentingan dasar setiap negara dan keamanan tersebut menjadi bagian dari kepentingan nasional yang menjadi agenda utama tiap negara. Thomas W. Robinson menyatakan bahwa kepentingan nasional tersebut dapat dicapai melalui pembentukan aliansi.⁵²

Menurut Norman Hill, aliansi merupakan sebuah instrumen dari politik kekuasaan (*power politics*) di mana melalui aliansi, suatu negara dapat menambahkan kekuatan negara kawan ke dalam kekuatannya sendiri.⁵³ Isu utama dalam pembentukan aliansi adalah seputar kekuatan (*power*), karena hubungan internasional sendiri juga tidak dapat lepas dari konsep *power*. Mengutip pernyataan Hill: "Power of a man is his present means to obtain some future apparent goal".⁵⁴ Pernyataan ini tidak berbeda jauh jika diterapkan pada negara. Bagi negara, *power* dapat menjadi tujuan dan sekaligus alat/sarana untuk mendapatkan *power* yang lebih besar. Dan salah satu cara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar adalah dengan bergabung ke dalam suatu aliansi. Dengan demikian, tujuan pembentukan aliansi pada dasarnya adalah untuk mempertahankan *balance of power* dan *status quo*.⁵⁵

Perkembangan politik internasional dewasa ini memaksa pendefinisian kembali term aliansi. Aliansi untuk saat ini tidak hanya berarti penggabungan

⁵² Thomas W. Robinson, "National Interest," *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*, ed. James N. Rosenau (New York: The Free Press, 1969), hal.182-190.

⁵³ Norman Hill, *International Relations: Documents and Readings* (New York: Oxford University Press, 1950), hal.189.

⁵⁴ *Ibid.*, p.185.

⁵⁵ *Ibid.*

kekuatan secara militer, atau lazim disebut aliansi militer, tetapi meluas ke arah kerjasama politik dan bahkan ekonomi antara negara-negara yang merasa membutuhkan dukungan kekuatan dari negara lain. Pembentukan aliansi militer ataupun koalisi diplomatik mencerminkan bahwa negara-negara yang tergabung dalam aliansi tersebut berusaha untuk mencapai tujuan negara, membela kepentingan ataupun mencegah ancaman dengan cara memobilisasi kapabilitas mereka sendiri.⁵⁶ Menurut Edwin H. Fedder, tujuan pembentukan aliansi adalah:⁵⁷

1. *Augmentative*

A bersekutu dengan B untuk menambahkan kekuatan B terhadap A untuk menghadapi kekuatan lawan.

2. *Pre-emptive*

A bersekutu dengan B untuk memisahkan B dari kubu lawan (C) atau untuk mengurangi kekuatan C.

3. *Strategic*

A bersekutu dengan B untuk dapat memanfaatkan wilayah dan sarana yang dimiliki B bagi tujuan strateginya.

Dari sedikit penjelasan di atas tercermin bahwa strategi aliansi berkaitan erat dengan kebutuhan domestik suatu negara. Dalam hal ini, bila negara memiliki masalah ekonomi serupa maka mereka membentuk blok ekonomi, kelompok perdagangan ataupun koalisi diplomatik yang menjaga

⁵⁶ Holsti, *Ibid.*, p.150.

⁵⁷ Edwin H. Fedder. "Alliance," *Handbook of World History*, ed., Joseph Dunner (New York: Philosophical Libra, 1967), hal.27, dalam Teuku May Rudy. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hal. 35.

solidaritas mereka dalam isu-isu perdagangan. Negara membentuk aliansi (baik militer, ekonomi atau pertahanan) secara temporer sebagai alat penangkal terhadap pihak-pihak yang melakukan tuntutan terhadap kepentingan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Holsti, dewasa ini aliansi mempunyai fungsi *deterrence* (penangkal) yang lebih luas, di mana tujuan pembentukan aliansi tidak hanya untuk berperang, tetapi juga untuk mencegah krisis dan meningkatkan pengaruh diplomatik.⁵⁸

Dalam penelitian ini, konsep aliansi menjadi sebuah rujukan untuk menganalisis berbagai hubungan kerjasama yang dijalin oleh pemerintah junta militer Myanmar dengan negara-negara lain. Dengan penggunaan konsep ini, dapat dianalisis pola-pola hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah junta militer Myanmar sebagai suatu upaya dalam menghadapi tekanan internasional.

I. 5. ARGUMEN

Berdasarkan uraian latar belakang dan kerangka analisis di atas, maka untuk menjawab permasalahan yang diajukan, peneliti berpendapat bahwa pemerintah junta militer Myanmar melakukan beberapa langkah internal dan eksternal sebagai upaya untuk menghadapi tekanan-tekanan internasional yang dijatuhkan kepadanya untuk mempertahankan kekuasaannya. Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah junta militer Myanmar dalam menghadapi tekanan internasional tersebut adalah:

⁵⁸ Holsti, *Op.Cit.*, hal. 156.

1. Langkah Internal

- ♦ Pemerintah junta militer Myanmar melakukan upaya konsolidasi dengan menyingkirkan pihak-pihak yang dianggap membahayakan posisi junta militer Myanmar sebagai organisasi/birokrasi penguasa pemerintahan.

2. Langkah Eksternal

- ♦ Pemerintah junta militer Myanmar mencari dukungan dari negara lain dengan menjalin kerjasama sehingga dapat membantu pemerintah junta militer dalam menghadapi tekanan internasional untuk mempertahankan kekuasaannya.

I. 6. METODOLOGI

A. Konseptualisasi dan Operasionalisasi Konsep

1. Pemerintahan Junta Militer

Sebelum mengetahui apa dan bagaimana pemerintahan junta militer yang dimaksud dalam penelitian ini, perlu adanya untuk mengetahui akar dari konsep tersebut. Menurut asal katanya, kata '*junta*' diadopsi dari bahasa Spanyol yang berarti "bergabung" (*joined*). Sedang dalam bahasa latin dikenal pula kata '*junctus*', bentuk lampau dari '*jungere*', yang juga berarti 'bergabung' (*to join*). Dari situ, '*junta*' dapat diartikan sebagai suatu kelompok individu yang bergabung demi tujuan yang sama.⁵⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, kata '*junta*' diartikan sebagai 'dewan pemerintahan'. Sedangkan '*junta militer*' berarti dewan pemerintahan yang dikuasai oleh militer setelah melalui

⁵⁹ www.dictionary.reference.com, diakses tanggal 26 Juli 2005.

suatu kudeta.⁶⁰ Definisi ini tidak berbeda dengan definisi dari Wikipedia. Dalam Wikipedia, junta militer disamakan dengan kediktatoran militer (*military dictatorship*), yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh militer.⁶¹

Sebagian besar pemerintah junta militer terbentuk setelah melalui suatu kudeta untuk menyingkirkan pemerintahan sebelumnya. Dahulu, junta militer dibentuk dengan tujuan untuk membawa stabilitas politik bagi bangsa atau untuk menyelamatkannya dari 'ideologi yang berbahaya'.⁶² Rezim militer tersebut cenderung untuk menggambarkan dirinya sebagai non-partisan, atau sebagai partai yang netral yang dapat memberikan pemerintahan sementara di tengah situasi krisis. Selain itu, rezim tersebut juga cenderung mengidentikkan politisi sipil dengan korupsi dan ketidakefektifan.

Salah satu karakteristik umum dari pemerintahan junta militer adalah institusi *martial law* atau pemerintahan darurat permanen (*permanent state of emergency*). Di luar beberapa pengecualian, sebagian besar rezim militer tidak begitu menghormati hak asasi dan menggunakan berbagai macam cara untuk membungkam lawan politiknya. Selain itu, rezim militer juga jarang meninggalkan kekuasaannya kecuali melalui revolusi massa. Namun fakta menyebutkan bahwa militer memiliki struktur institusional yang lebih kohesif dibandingkan dengan institusi sipil. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa rezim militer cenderung dapat bertahan lama dalam suatu negara.

⁶⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2nd ed., Jakarta: Balai Pustaka, 1989), XIX, hal. 369.

⁶¹ www.wikipedia.org, diakses tanggal 26 Juli 2005.

⁶² *Ibid.*

Pemerintahan militer, menurut ensiklopedi Wikipedia, memiliki beberapa makna dalam term modern, di antaranya adalah.⁶³

- suatu negara atau area yang ditaklukkan melalui invasi dan diduduki oleh kekuatan pemberontak (*belligerent*), kondisi ini dapat juga disebut sebagai pendudukan militer.
- Suatu negara atau wilayah yang ditempatkan di bawah *martial law*.
- Suatu negara yang diinvasi atau ditempatkan di bawah hukum militer.
- Suatu negara yang diperintah oleh kediktatoran militer.
- Suatu negara atau wilayah diadili oleh pengadilan militer (*military tribunal*).
- Suatu militer yang menjalankan hukuman *court-martial* dan non-judisial.
- Keadaan di mana hukum-hukum tertentu (*specific laws*) dijalankan dalam suatu konteks militer.

Dari uraian di atas, apa yang dimaksud dengan pemerintah junta militer secara operasional adalah pemerintahan darurat, yang awalnya bersifat sementara selama masa transisi berlangsung, yang dikuasai oleh sekelompok militer dan memerintah melalui kediktatoran dan berusaha mempertahankan kekuasaannya selama mungkin melalui segala macam cara.

⁶³*Ibid.*

2. Tekanan Internasional

Berbicara tentang internasional berarti berkaitan dengan segala sesuatu di dunia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata internasional berarti menyangkut bangsa-bangsa dan negeri-negeri di seluruh dunia; antar-bangsa. Sesuatu dikatakan bersifat internasional bila melibatkan tidak hanya satu negara, tetapi melibatkan banyak negara di dunia, terdapat partisipasi dari negara-negara tersebut.

Sedangkan tekanan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai:⁶⁴

- ♦ keadaan (hasil) kekuatan menekan
- ♦ desakan yang kuat; paksaan
- ♦ ucapan yang ditekankan pada suku kata atau kata sehingga bagian itu lebih jelas (tinggi) ucapannya daripada bagian yang lain; aksen
- ♦ sesuatu yang dipentingkan (diutamakan); titik berat
- ♦ keadaan tidak menyenangkan yang umumnya merupakan beban batin

Jadi, tekanan internasional adalah suatu keadaan yang datang dari desakan, paksaan negara-negara di dunia tentang sesuatu hal yang diutamakan oleh masyarakat internasional dengan tujuan agar sesuatu tersebut menjadi lebih jelas bagi pihak di mana tekanan tersebut ditujukan, dan bagi pihak yang mengalami tekanan, tekanan internasional tersebut menjadi kondisi yang tidak menyenangkan yang dapat mengancam keberadaannya sehingga mengharuskan dia untuk memberikan respon terhadap tekanan-tekanan tersebut.

⁶⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hal. 914.

Tekanan-tekanan internasional terhadap suatu negara dapat berupa berupa ancaman, sanksi, embargo, penarikan investasi, penundaan pemberian bantuan bilateral, penundaan kerjasama, dan larangan-larangan.

3. Konsolidasi

Konsolidasi merupakan kata turunan dari bahasa Inggris, *consolidation*. Akar kata *consolidation* ini berasal dari bahasa Latin '*consolidat*' yang merupakan bentuk lampau dari '*consolidare*'. '*Consolidare*' ini sendiri memiliki makna 'membuat sesuatu yang ada menjadi lebih kuat' (*to make solid*). Sedangkan '*solid*' dalam bahasa Latin (*solidus*) yaitu kokoh; keseluruhan/keutuhan (*firm; whole*).⁶⁵

Bentuk verba dari *consolidation* adalah *consolidate*, yang dapat diartikan sebagai:⁶⁶

- mempersatukan aktivitas bisnis: menggabungkan beberapa bisnis ataupun aktivitas bisnis menjadi satu unit tunggal (*to bring businesses or business activities together, or come together, into a single unit*)
- memperkuat posisi: meningkatkan kekuatan, stabilitas atau memperbesar kesuksesan dan posisi (*to increase the strength, stability, or depth of your success or position*)
- menggabungkan sesuatu ke dalam satu massa: menggabungkan item-item yang terpisah atau materi-materi yang berserakan menjadi satu

⁶⁵ www.encyarta.msn.com, diakses tanggal 22 November 2005

⁶⁶ *Ibid.*

kesatuan (*to combine separate items or scattered material into a single whole or mass*)

- menggabungkan sumber-sumber keuangan: menggabungkan beberapa sumber keuangan ke dalam satu set sumber (*to combine several sets of financial accounts in a single set of accounts*)

Definisi umum tentang konsolidasi disebutkan oleh wikipedia sebagai suatu tindakan untuk menggabungkan segala sesuatu menjadi satu kesatuan (*the act of merging many things into one*).⁶⁷ Definisi ini juga tidak berbeda dengan definisi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan bahwa konsolidasi adalah perbuatan (hal, dsb.) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dsb.).⁶⁸

Secara operasional, konsolidasi yang dimaksud lebih diarahkan pada bentuk konsolidasi di dalam tubuh sebuah organisasi/birokrasi. Konsolidasi ini dapat berupa pembatasan akses terhadap informasi dan komunikasi baik dari luar ke dalam atau sebaliknya, dari dalam ke luar. Pembatasan arus informasi ini dapat dilakukan melalui pembatasan peran media massa, melalui undang-undang dan juga pembatasan secara langsung seperti larangan dan ancaman hukuman bagi jurnalis yang mencari, menerima, atau mendistribusikan berita. Sedang konsolidasi di dalam birokrasi, dapat berupa ancaman, hukuman, pengucilan, dan pemecatan terhadap anggota organisasi yang tidak memiliki tujuan yang sama dengan organisasi.

⁶⁷ www.wikipedia.org. *Loc. Cit.*, diakses tanggal 17 November 2005

⁶⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op. Cit.*, hal. 457.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menunjukkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar sehingga tetap dapat bertahan hingga saat ini meskipun menerima beragam tekanan.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Meski tekanan-tekanan internasional terhadap Myanmar mulai berdatangan pada akhir dekade 1980, sebelumnya perlu dipaparkan secara singkat kondisi yang terjadi di Myanmar sebelum tekanan-tekanan internasional tersebut diajukan kepada Myanmar, tepatnya tahun 1962, yaitu ketika junta militer Myanmar mulai mengambil alih pemerintahan. Periode penelitian yang digunakan adalah sejak tahun 1988, ketika militer kembali merebut kekuasaan di Myanmar melalui kudeta berdarah pada bulan September, hingga tahun 2004, di mana junta militer memberhentikan Khin Nyunt sebagai perdana menteri. Periode waktu ini dipilih karena dalam periode tersebut kondisi Myanmar memiliki dinamika yang kompleks, bersamaan dengan perhatian masyarakat internasional yang terus meningkat terhadap persoalan yang terjadi di Myanmar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menjawab rumusan masalah, penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Data-data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, surat kabar dan data-data yang didapat melalui internet.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa penjelasan dan pernyataan yang bukan berupa data statistik dan karena peneliti tidak terlibat secara langsung dalam fenomena yang diteliti, peneliti hanya bersikap sebagai pengamat yang berada di luar fenomena.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini diawali dengan pendahuluan dalam Bab I yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, argumen, dan metodologi. Bab I tersebut menjadi dasar dari penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dalam Bab II mengenai langkah internal yang dilakukan oleh pemerintah junta militer yang terdiri dari tiga upaya pemerintah junta militer Myanmar untuk melakukan konsolidasi, meliputi kontrol terhadap arus informasi, universitas dan birokrasi.

Penjelasan mengenai langkah eksternal berupa kerjasama luar negeri yang dijalin oleh pemerintah junta militer dengan beberapa negara sekitarnya dijelaskan pada Bab III. Langkah internal dan eksternal tersebut kemudian dianalisis di dalam Bab IV sesuai dengan teori dan konsep yang digunakan serta fakta-fakta yang ditemukan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dalam Bab IV, diperoleh kesimpulan, yaitu dukungan fakta-fakta serta kerangka pemikiran yang dipakai terhadap argumen yang diajukan. Kesimpulan tersebut dituliskan di dalam Bab V bersama dengan beberapa temuan selama penelitian.

BAB II

LANGKAH INTERNAL PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR: UPAYA MENUJU KONSOLIDASI

Dalam Bab II ini dijelaskan langkah-langkah internal yang diambil oleh pemerintah junta militer Myanmar untuk bertahan dari tekanan-tekanan internal dan internasional. Langkah internal yang dilakukan lebih mengarah pada upaya pemerintah junta militer untuk “membersihkan” hambatan-hambatan yang dihadapinya demi upayanya untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Dengan kekuatan yang semakin *solid* tersebut, junta militer dapat bertahan meski mendapat begitu banyak tekanan.. Langkah-langkah internal yang diambil oleh pemerintah junta militer yaitu mengontrol arus informasi, mengontrol universitas (kaum intelektual) dan mengontrol birokrasi.

Kontrol terhadap arus informasi dilakukan oleh pemerintah junta militer untuk membatasi peran media massa dalam membentuk opini publik. Upaya tersebut dilakukan dengan mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengatur tentang media massa serta menangkap pihak-pihak yang dianggap menyebarkan pernyataan yang mengkritik atau menentang kinerja pemerintah.

Langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah junta militer yaitu kontrol terhadap sistem pendidikan di Myanmar, dalam hal ini kontrol tersebut ditujukan pada perguruan tinggi. Bagi pemerintah junta militer, perguruan tinggi/universitas merupakan wadah strategis bagi reproduksi kaum intelektual

dan sekaligus tempat bertemunya kaum intelektual tersebut. Hal ini dirasa membahayakan bagi eksistensi junta militer karena aliansi kaum intelektual tersebut dapat melahirkan kekuatan untuk menggulingkan pemerintahan junta militer. Karena itu junta militer perlu untuk melakukan kontrol terhadap universitas dan memberikan sedikit distorsi terhadap sistem pendidikan di tingkat perguruan tinggi demi menghalangi lahirnya pemikiran-pemikiran kritis dari para intelektual.

Untuk memperkuat konsolidasinya, pemerintah junta militer juga melakukan kontrol terhadap birokrasi yang menjadi titik kekuatan pemerintahan junta militer selama ini. Pihak-pihak yang dianggap memperlemah posisi junta militer disingkirkan. Sedangkan pihak-pihak yang dianggap mampu mengangkat *image* junta militer, mendapatkan posisi di dalam birokrasi yang dibentuk oleh junta militer tersebut. Proses demikian tidak hanya berlangsung sekali-dua kali, tetapi berulang-ulang, dengan maksud untuk mencapai formasi birokrasi terbaik dalam menjalankan pemerintahan sehingga mampu menghadapi tekanan-tekanan internasional. Ketiga langkah tersebut dibahas lebih mendalam pada Bab II berikut.

II.1 Kontrol Arus Informasi: Tekanan terhadap Kebebasan Pers, Kebebasan Beropini dan Kebebasan Berekspresi

Di awal masa kemerdekaan, Myanmar menjamin kebebasan pers sepenuhnya melalui Konstitusi 1947. Memasuki dekade 1960an, kebebasan pers di Myanmar menjadi terkikis dengan disahkannya *The Printers and Publishers*

Registration Act 1962. Dan pada tahun 1989 junta militer mengeluarkan amandemen Printers and Publishers Registration Act tersebut melalui Martial Law Order 16/89 untuk memperberat sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.⁶⁹ Di bawah undang-undang ini, pemerintah junta militer mewajibkan registrasi bagi setiap pemilik peralatan percetakan serta bagi setiap pemilik usaha percetakan dan penerbitan.⁷⁰ Selain itu, pemerintah juga mewajibkan siapapun untuk mendaftarkan dan menyerahkan salinan dari buku, majalah, surat kabar dan media cetak jenis apapun ke Press Scrutiny Boards (PSB). PSB juga memiliki kekuasaan untuk melarang publikasi dan meminta “upeti” dari keuntungan yang diperoleh penerbit.⁷¹

Tahun 1975, muncul memorandum yang dikeluarkan oleh Printers and Publishers Central Registration Boards yang berkaitan dengan pengumpulan manuskrip sebagai bagian dari pengawasan terhadap pers.⁷² Memorandum tersebut menentukan panduan-panduan (yang bebas untuk diinterpretasikan) bagi PSB untuk menjalankan fungsinya dalam melakukan pengawasan. Materi-materi yang tidak akan ditolerir oleh PSB menurut Memorandum 1975 tersebut adalah:

- anything detrimental to the Burmese socialist program;
- anything detrimental to the ideology of the state;
- anything detrimental to the socialist economy;
- anything which might be harmful to national solidarity and unity;
- anything which might be harmful to security, the rule of law, peace and public order
- any incorrect idea and opinions which do not accord with the times;

⁶⁹ “Chronology of the Burma’s Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press,” diakses dari www.irrawaddy.com tanggal 22 November 2005.

⁷⁰ Article 3(1) and (2), article 6(1) and (2) “The Printers and Publishers Law 1962,” diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006

⁷¹ “Chronology of the Burma’s Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press,” *Loc. Cit.*

⁷² *Ibid.*

- any descriptions which, though factually correct, are unsuitable because of the time or circumstances of their writing;
- any obscene (pornographic) writing;
- any writing which would encourage crimes and unnatural cruelty and violence;
- any criticism of a non-constructive type of the work of government departments;
- any libel or slander of any individuals.⁷³

Upaya untuk membatasi peran media massa tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Pada tahun yang sama (1975), pemerintah junta militer mengeluarkan State Protection Law, yaitu undang-undang perlindungan negara terhadap pihak-pihak yang berniat melakukan tindakan subversif.⁷⁴ Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mencegah bahaya terhadap kedaulatan dan keamanan Union of Burma, dari tindakan yang dianggap mengancam perdamaian masyarakat dan dari tindakan subversif. Sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan State Protection Law: “. . . to prevent the infringement of the sovereignty and security of the Union of Burma against any threat to the peace of the people, and against the threat of those desiring to cause subversive acts causing the destruction of the country, without impeding citizens' fundamental rights.”⁷⁵

Seiring dengan munculnya gelombang demokrasi di tahun 1988 yang memprotes pemerintahan dan akhirnya berhasil memaksa Ne Win turun dari kursi pemerintahan, Myanmar menikmati masa kebebasan beropini meski hanya untuk sesaat. Tahun itu, pers menjadi ramai kembali, dengan sekitar 40 surat kabar dan jurnal independen yang mulai bermunculan. Namun, kemunculan media massa

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ “State Protection Law,” Preamble, diakses dari www.geocities.com/blc_dc/spl_e.html tanggal 22 Februari 2006.

tersebut hanya berlangsung satu bulan menyusul kudeta berdarah yang membawa Myanmar berada di tangan junta militer hingga saat ini. Dalam kurun waktu yang singkat itu, surat kabar dan jurnal independen tersebut menerbitkan artikel-artikel politik, sindiran dan karikatur dari petinggi pemerintah. Setelah kudeta 18 September 1988, seluruh media massa dilarang untuk terbit kembali, kecuali Lokhta Pyithu Nezin dan versi Inggrisnya, *The Working People's Daily* (kemudian berubah menjadi *Myanma Alin-The New Light of Myanmar*) yang merupakan surat kabar milik pemerintah.⁷⁶ Kini, hampir seluruh surat kabar yang terbit di Myanmar merupakan surat kabar pemerintah yang menjadi suara bagi pemerintah junta militer dalam menyebarkan propaganda.

Gelombang protes demokrasi yang berakhir dengan tragedi berdarah pada 8 Agustus 1988 tersebut membawa dampak yang lebih dalam bagi hak asasi tiap individu untuk berserikat dan beropini di Myanmar. Setelah militer berkuasa kembali melalui kudeta September 1988, junta militer segera menetapkan peraturan-peraturan baru yang semakin membatasi kebebasan berekspresi dan beropini di Myanmar. Junta militer kemudian mengesahkan tiga Martial Law Order untuk membatasi kebebasan masyarakat. Ketiga Martial Law Order tersebut adalah:

► **Martial Law Order 2/88**

Peraturan ini menetapkan “jam malam” dan melarang adanya perkumpulan publik yang terdiri lebih dari lima orang, tanpa memandang

⁷⁶ “Chronology of the Press in Burma,” diakses dari www.itrawaddy.org tanggal 22 November 2005.

apakah tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kerusuhan, bertujuan kriminal atau tidak.⁷⁷

▶ **Martial Law Order 8/88**

peraturan ini melarang tiap tindakan baik, tertulis ataupun lisan, yang ditujukan untuk memecah belah pertahanan.⁷⁸

▶ **Martial Law Order 3/89**

melarang penerbitan dokumen apapun tanpa registrasi sebelumnya. Pihak-pihak atau organisasi yang hendak menerbitkan materi-materinya diharuskan untuk memperoleh "*exemption certificate*" dari Kementerian Urusan Dalam Negeri dan Keagamaan.⁷⁹

Selama periode setelah kudeta September 1988 sampai dengan September 1992, Myanmar berada di bawah *martial law*. Bagi setiap orang yang dituduh melanggar *martial law*, akan disidangkan oleh pengadilan militer yang dibentuk pada Juli 1989 melalui Martial Law Order 1/89 dan 2/89, dengan kekuasaan untuk memberikan hanya tiga jenis vonis hukuman: hukuman penjara, hukuman mati atau hukuman minimum tiga tahun kerja paksa.⁸⁰

Tahun 1991, pemerintah mengeluarkan amandemen dari State Protection Law, yaitu pada artikel 14 dan 22 melalui Law Order 11/91. Amandemen yang tertanggal 9 Agustus 1991 tersebut dikeluarkan untuk merubah lama hukuman penjara maksimum yang harus dijalani oleh pelanggar State

⁷⁷ "Chronology of the Burma's Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press," *Loc. Cit.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Protection Law, dari tiga tahun menjadi lima tahun.⁸¹ Untuk mendukung implementasi undang-undang ini, demi mencegah terjadinya ancaman yang dimaksud, pemerintah junta militer juga telah dibekali kewenangan untuk menyatakan suatu keadaan darurat (*state of emergency*) yang dapat diperluas tanpa batasan dengan persetujuan dari People's Assembly.⁸²

Selain memberlakukan tiga undang-undang tersebut, untuk mengontrol arus informasi, dalam kurun waktu antara 1990 hingga 2004 pemerintah junta militer telah mengeluarkan beberapa undang-undang baru yang bertujuan untuk membatasi arus informasi. Setelah memasuki dekade 1990an, junta militer mulai memikirkan peran media-media elektronik, yang semakin maju dan berkembang, dalam fungsinya untuk menyebarkan informasi dan membentuk opini publik. 7 Juni 1996, junta militer mengeluarkan *The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions*. Dalam bagian awal dari undang tersebut dinyatakan:

... people who are against the development and progress of the State with reliance on external elements are conducting acts which undermine the stability of the State, community peace and tranquility, prevalence of law and order and national reconsolidation.

Furthermore, it is also found that disturbance of the functions of the National Convention and acts such as incitement, delivering speeches, making oral and written statements and disseminating in various ways to belittle the National Convention and to make the people misunderstand are being conducted. Such acts amount to obstruction, disturbance and oppression to the development of a genuine multi-party democracy system and the peaceful and systematic transfer of the responsibility of the State.

Consequently, as it has become necessary to prevent the obstruction, disturbance and opposition to the peaceful and systematic transfer of responsibility of the State, successful performance of the functions of the National Convention,

⁸¹ "State Protection Law," *Loc. Cit.*, Article 22.

⁸² *Ibid.*, Article 3 and 4.

building of a peaceful and modern development State, the State Law and Order Restoration Council hereby enacts. . . .⁸³

Secara keseluruhan, undang-undang ini dikeluarkan untuk mengamankan Konvensi Nasional yang segera dilaksanakan. Undang-undang tersebut memberlakukan larangan-larangan untuk memberikan dukungan, berdemonstrasi, berorasi, membuat dan menyebarkan pernyataan, baik secara lisan maupun tertulis yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara, kedamaian dan ketenangan masyarakat, serta keberadaan hukum dan peraturan.⁸⁴ Poin lain kedua dalam bab II undang-undang tersebut juga melarang kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang bertujuan untuk mengganggu proses rekonsiliasi nasional dan membuat masyarakat salah paham mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan dalam Konvensi Nasional.

Konsentrasi junta militer terhadap kontrol informasi berlanjut dengan mengeluarkan undang-undang pertelevisian (*Television and Video Act*) pada tanggal 29 Juli 1996. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, para pemilik pesawat televisi, *video-cassette recorders*, dan televisi satelit, wajib untuk mendapatkan ijin dari Kementerian Komunikasi, Pos, dan Telekomunikasi.⁸⁵ Undang-undang tersebut juga mengharuskan adanya ijin dari kementerian (bahkan bagi organisasi PBB) bila ingin mempertunjukkan rekaman video impor ke hadapan publik Myanmar. Dalam hal ini, Video Censorship Boards bertanggung jawab

⁸³ Lihat dalam lampiran 1. "The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions," diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

⁸⁴ *Ibid.*, Chapter II, 3(a), diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006

⁸⁵ "Chronology of the Burma's Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press," *Loc. Cit.*

dalam mengawasi rekaman video impor/lokal dari hal-hal yang dianggap membahayakan negara. Di samping itu, Video Censorship Boards juga berhak untuk melarang, menyensor, atau membatasi pemutaran video tersebut. Di bawah undang-undang itu pula, seluruh pengguna video pribadi dan video bisnis harus memperoleh ijin dari Video Business Supervisory Committee, yang juga memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi ditempat.⁸⁶ Selain itu, pemerintah junta militer juga mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perfilman (Motion Picture Law) pada 20 Agustus 1996. Undang-undang ini mengharuskan pihak-pihak pembuat film untuk mendapatkan ijin dari Myanmar Motion Picture Enterprise.⁸⁷ Ijin tersebut meliputi aktivitas-aktivitas berikut: produksi (*producing*), pengambilan gambar (*filming*), pembuatan dan pencetakan film (*developing and printing*), pengambilan suara (*sound recording*), pengeditan, pendistribusian, impor dan ekspor film.⁸⁸ Setiap film yang akan beredar wajib melalui proses penyensoran oleh Motion Picture Censor Board.

20 September 1996, pemerintah junta militer mengeluarkan Computer Science Development Law. Di bawah undang-undang ini, kebebasan pers ditekan melalui pembatasan atas peralatan komunikasi. Undang-undang ini mengharuskan adanya lisensi dari Kementrian Komunikasi, Pos dan Telegraf sebelum berbagai peralatan komputer, fasilitas *networking* dan fasilitas komunikasi dapat dimiliki,

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ "The Motion Picture Law," Chapter III Article 4, diakses dari www.blc-burma.org tanggal 22 Februari 2006.

diimpor atau digunakan.⁸⁹ Kementerian juga berhak menentukan jenis/tipe peralatan komputer yang digunakan. Dalam chapter IX disebutkan:

- (a) The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may, with the approval of the Council, determine by notification the types of computer to be imported, kept in possession or utilized only with the prior sanction of the Ministry.
 (b) In determining the types of computer under sub-section(a), fax-modem card installed computer which can transmit or receive data shall be primarily targeted.⁹⁰

Pasal 34 undang-undang ini menyebutkan bahwa: "any act which undermines state security, prevalence of law and order and community peace and tranquillity, national unity, state economy or national culture," -- termasuk - "obtaining or sending and distributing any information" merupakan suatu pelanggaran.⁹¹ Selain itu, undang-undang ini mengizinkan pembentukan kerjasama berbasis komputer hanya melalui tiga asosiasi yang diakui pemerintah, yaitu: Computer Enthusiasts' Association; Computer Scientists' Association; dan Computer Entrepreneurs Association. Asosiasi komputer yang tidak mendapatkan ijin dianggap ilegal.

Menyusul undang-undang yang mengatur kepemilikan perangkat komunikasi, pada tahun 2000, junta militer kembali mengeluarkan undang-undang yang mengatur fasilitas jaringan. Internet Law dikeluarkan pada tahun 2000 oleh Kementerian Komunikasi, Pos dan Telegraf untuk memberikan regulasi bagi para pengguna internet.⁹² Undang-undang internet ini meliputi larangan untuk mengirim segala bentuk tulisan melalui internet yang dianggap berbahaya bagi

⁸⁹ Lihat dalam lampiran 2. "The Computer Science Development Law," Chapter IX, diakses tanggal 22 Februari 2006 dari <http://www.myanmar.com/gov/laws/computerlaw.html>.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ "The Computer Science Development Law," Article 34(a) and (b), dalam "Chronology of the Burma's Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press," diakses dari www.irrawaddy.com tanggal 22 November 2005.

⁹² "Chronology of the Burma's Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press," *Loc. Cit.*

kepentingan, kebijakan dan urusan keamanan Union of Myanmar.⁹³ Regulasi tersebut membuat akses media dan publikasi informasi yang mengkritik junta militer menjadi semakin sulit.

Masih berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah junta militer mengesahkan The Electronic Transactions Law pada tanggal 30 April 2004. Undang-undang ini mengatur tentang transaksi data elektronik (*electronic record and electronic data message*) baik dalam konteks aktivitas komersial maupun non-komersial termasuk transaksi, perjanjian, kontrak, pertukaran dan penyimpanan informasi dalam negeri ataupun internasional. Sasaran undang-undang tersebut adalah tiap orang-di dalam negeri, dari dalam ke luar negeri atau dari luar ke dalam negeri-yang terlibat dalam penggunaan teknologi transaksi elektronik (*electronic transaction technology*).⁹⁴

Implikasi Pembatasan Kebebasan Pers, Kebebasan Beropini dan Kebebasan Berekspresi

Beberapa saat setelah berkuasa, junta militer Myanmar kemudian memperkenalkan undang-undang yang mengatur tentang media massa, yaitu The Printers and Publishers Registration Act. Undang-undang yang mengatur tentang kebebasan berekspresi yang dikeluarkan oleh junta militer tersebut membawa dampak besar bagi para jurnalis, penulis dan pihak-pihak lainnya yang berupaya untuk menekan pemerintah junta militer. Lebih jauh lagi, hal ini tentunya juga semakin mempersulit akses dan penyebaran informasi, terutama ke luar Myanmar.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ "The Electronic Transaction Law," Chapter III, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

Setahun setelah UU tersebut dikeluarkan, junta militer mulai melarang penerbitan beberap surat kabar. Sasaran pertama junta militer adalah “Nation”, yang terpaksa harus ditutup dan editornya, Law Yan, juga harus mendekam di tahanan.⁹⁵ Untuk mendukung implementasi UU Media tersebut, junta militer mendirikan News Agency Burma pada pertengahan 1963. News Agency Burma berfungsi untuk mengontrol arus informasi yang keluar-masuk Myanmar. Dampak dari dibentuknya News Agency Burma, adalah pengusiran bagi seluruh koresponden asing yang berada di Myanmar, kecuali bagi mereka yang bekerja untuk Soviet Tass dan China’s XinHua. Kunjungan oleh jurnalis asing secara resmi dilarang. Agen berita asing yang berada di Myanmar dipaksa untuk menunjuk warga negara Burma sebagai koresponden yang harus mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang. Berkaitan dengan hal ini, pada akhir tahun 1990, British Broadcasting Company dan Voice of America harus menarik diri dari Myanmar karena tidak dapat memenuhi peraturan tersebut.⁹⁶

Untuk memperkuat kontrolnya terhadap arus informasi, tiga bulan setelah News Agency Burma dibentuk, junta militer menerbitkan Lokhta Pyithu Nezin. Penerbitan surat kabar pemerintah tersebut merupakan upaya junta militer untuk menyaingi surat kabar-surat kabar swasta. Awal tahun 1964, versi Inggris dari Lokhta Pyithu Nezin, Working People’s Daily, diterbitkan. Tidak puas dengan penerbitan dua surat kabar pro-rezim tersebut, pada tahun 1966, junta militer Myanmar mengumumkan larangan penerbitan bagi seluruh surat kabar swasta. Di samping surat kabar swasta, surat kabar-surat kabar kecil juga harus

⁹⁵ “Chronology of the Press in Burma,” *Loc. Cit.*

⁹⁶ *Ibid.*

dihentikan penerbitannya. Tidak hanya itu, beberapa editor dan jurnalis juga ditangkap.⁹⁷

Selama berkusa, junta militer Myanmar telah beberapa kali mengeluarkan amandemen dan undang-undang yang mengatur tentang media dan kebebasan berekspresi di Myanmar. Setelah kudeta 1988, junta militer telah mengeluarkan beberapa undang-undang/peraturan baru yang semakin menekan kebebasan berekspresi dan juga semakin mengontrol arus informasi. Termasuk juga undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan televisi, kamera video perekam, televisi satelit, peralatan komputer, fasilitas *networking*, dan perangkat komunikasi.⁹⁸

Sebagai dampak dari undang-undang tersebut, April 1996, James Leander Nichols, konsul yang mewakili Denmark, Norwegia, Finlandia, Swedia dan Switzerland untuk Myanmar, ditangkap dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Nichols ditangkap atas tuduhan kepemilikan ilegal dua mesin faksimili dan seperangkat pesawat telepon.⁹⁹ Dua bulan kemudian, 22 Juni 1996, Nichols meninggal dalam tahanan. Dan meskipun Denmark berkeras meminta agar dilakukan otopsi independen, pemerintah junta militer Myanmar tetap menclak permintaan Denmark tersebut.¹⁰⁰ Atas dasar yang sama, Aung Pwint, seorang penulis puisi, ditangkap pada tahun 1999 dengan tuduhan kepemilikan ilegal

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ "Chronology of the Burma's Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press," *Loc. Cit.*

⁹⁹ Tamen, *Op. Cit.*, hal. 28.

¹⁰⁰ *Ibid.*

sebuah mesin faksimili.¹⁰¹ Hingga saat ini, Aung Pwint belum dibebaskan dari penjara. Awal tahun 2003, giliran Inggris yang mendapatkan perhatian dari pemerintah junta militer. Pada tanggal 22 Januari, pejabat luar negeri Inggris melancarkan protes atas tindakan junta militer yang memutus hubungan telepon ketika Menteri Luar Negeri Mike O'Brien sedang berbicara dengan Aung San Suu Kyi melalui pesawat telepon.¹⁰²

Junta militer Myanmar masih terus berusaha untuk menekan arus informasi dan opini publik dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengkritik dan menekan pemerintah junta militer. Terhitung sejak tahun 1988 hingga Mei 2004, sebanyak 37 orang, meliputi jurnalis, penulis dan puitikus, telah ditahan oleh junta militer.¹⁰³

Tabel II. 1

**Daftar Jurnalis, Penulis dan Puitikus
yang Ditangkap oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar (1988-2003)**

| No | Nama | Profesi | Tahun Penangkapan /vonis | Tahun Pembebasan | Tuduhan |
|----|------------|---|--------------------------|------------------|--|
| 1 | Aung Tun | Penulis dan aktivis dari All Burma Federation of Student Unions | 1988 17 tahun | - | Menulis sebuah buku dokumentasi tentang sejarah pergerakan mahasiswa Myanmar |
| 2 | Htay Thein | Dosen; penulis artikel politik dan filsafat | 1989 20 tahun | 2003 | Keterlibatan dalam <i>Burmese Communist Party</i> |

¹⁰¹ "List of Journalists, Authors, Poets Who Received Sentences after 1988 (37 Persons)," diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 November 2005.

¹⁰² "Myanmar 'Hinders' British Dial-Up Diplomacy," *Associated Press*, 24 Januari, 2003, dalam *Report Card Burma: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 7

¹⁰³ "List of Journalists, Authors, Poets Who Received Sentences after 1988 (37 Persons)," *Loc. Cit.* 37 orang yang ditahan oleh junta militer tersebut sebagian besar telah dibebaskan namun seorang meninggal saat diasingkan, diduga karena mendapat siksaan berat selama di pengasingan.

| | | | | | |
|----|--------------------|--|---------------------|------|---|
| 3 | Win Tin | Editor; penulis | 1989 20 tahun | - | Menulis artikel yang mengkritik junta militer; mempublikasikan propaganda anti-pemerintah selama di penjara |
| 4 | Dr. Zaw Min | Penulis | 1989 20 tahun | - | Berpartisipasi dalam gerakan pro-demokrasi 1988 |
| 5 | Myo Myint Nyein | Jurnalis dan anggota NLD | 1990 12+ 7 tahun | 2002 | Berpartisipasi dalam majalah bawah tanah selama menjalani hukuman di penjara Insein |
| 6 | Ohn Kyaing | Jurnalis majalah dan surat kabar <i>Kyemon</i> , <i>Bothtaung</i> dan <i>Youqshin Aunglan</i> serta anggota parlemen terpilih dari NLD | 1990 17 tahun | - | Menulis artikel berkaitan dengan demokrasi |
| 7 | Sein Hlaing | - | 1990 + 7 tahun | 2002 | Mempublikasikan artikel yang mengkritik angkatan bersenjata Myanmar dan berkontribusi dalam sebuah laporan yang dikirimkan ke <i>special rapporteur</i> PBB untuk Myanmar serta keterlibatan dalam publikasi bawah tanah di dalam penjara |
| 8 | Thein Tan | Penulis | 1990 10 tahun | - | Menulis artikel tentang pembunuhan 4 orang di Mandalay, Agustus 1990 |
| 9 | Myat Hlaine | Penulis puisi; penulis untuk majalah <i>Payfuwa</i> dan anggota parlemen dari NLD | 1991 | 1999 | - |
| 10 | Kyi Tin Oo | Jurnalis dan penulis puisi | 1994 10 tahun | 2004 | Mempublikasikan artikel politik dalam majalah bulanan <i>Moe Wai and Tha-bin</i> |
| 11 | San San Nweh | Jurnalis; penulis dan anggota NLD | 1994 10 tahun | 2001 | Memproduksi dan mengirim laporan anti-pemerintah ke stasiun radio internasional serta menyelundupkan jurnalis asing ke Myanmar |
| 12 | Sein Hla Oo | Editor <i>Bothtaung</i> dan anggota parlemen terpilih untuk NLD | 1994 7 tahun | - | Mendistribusikan artikel ke kedutaan asing dan ke media yang dianggap anti-pemerintah |
| 13 | Dr. Aung Khin Sint | Dokter; penulis dan anggota senior NLD | 1996 20 tahun | 2001 | Menulis dan mendistribusikan pamflet tentang Konvensi Nasional; melakukan hubungan dengan kelompok ilegal |
| 14 | Kyaw San | Penulis | 1996 7 tahun | 2004 | Mendukung demonstrasi mahasiswa tahun 1996 melalui artikel dan puisi diterbitkan di majalah oposisi |

| | | | | | |
|-----|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------|--|
| 15 | Min Zin | Penulis dan puitikus | 1996 7 tahun | 2004 | Mendukung demonstrasi mahasiswa tahun 1996 melalui artikel dan puisi dan menerbitkannya ke majalah <i>New Style</i> |
| 16. | Moe Thu | Jurnalis dan penulis | 1996 | 2000 | Pelanggaran terhadap <i>State Protection Law</i> |
| 17 | Myint Thein | Penulis | 1996 7 tahun | - | Pendukung gerakan mahasiswa |
| 18 | Mya Kyaing | Jurnalis lepas | 1996 | 2000 | Mengadakan kampanye demokrasi |
| 19 | Sein Ohn | Kameramen dan fotografer | 1996 10 tahun | - | Mendistribusikan rekaman yang tidak disetujui oleh badan sensor, kepemilikan peralatan video perekam tanpa ijin resmi dan terlibat dalam pembuatan film tentang Aung San Suu Kyi serta melancarkan kritik terhadap kebijakan-kebijakan junta |
| 20 | Soe Thein | Jurnalis dan anggota parlemen | 1996 5 tahun | 2001 | Menulis dan mempublikasikan artikel yang mendukung gerakan oposisi |
| 21 | Thein Tin | Penulis; anggota NLD | 1996 | Meninggal 1998 | Pelanggaran terhadap <i>State Protection Act</i> |
| 22 | Tin Oo Lay | Penulis | 1996 | - | - |
| 23 | Chaw-Chaw | Penulis | 1997 10 tahun | 2003 | Kepemilikan ilegal atas buku-buku dan surat kabar |
| 24 | Khin Maung Win | Fotografer dan kameramen | 1997 7 tahun | - | Pembuatan video wawancara dengan Aung San Suu Kyi dan menyelundupkannya ke luar negeri |
| 25 | Tha Ban | Editor | 1997 7 tahun | - | Menulis artikel tentang demokrasi dan membantu mahasiswa yang mengumpulkan informasi mengenai sejarah asosiasi mahasiswa |
| 26 | Dr. Maung-Maung Kyaw | - | 1998 | - | - |
| 27 | Thet Zaw (Yesagyo) | Penulis | 1998 | - | - |
| 28 | Yan Aung Soe | Penulis | 1998 59 tahun | 2001 | Mengadakan hubungan dengan organisasi asing |
| 29 | Aung Pwint | Penulis puisi dan produser video | 1999 8 tahun | - | Kepemilikan ilegal mesin faksimili dan penyebaran informasi terlarang |
| 30 | Thaung Tun | Jurnalis dan penulis puisi | 1999 8 tahun | - | Mengumpulakn informasi mengenai pelanggaran HAM di Myanmar dan mendistribusikan ke internasional |

| | | | | | |
|----|---------------------------|--|----------------------|-------|--|
| 31 | Aung Myint | Jumalis majalah <i>Cherry</i> dan <i>Mahayathi</i> | 2000 20 tahun | - | Memberikan informasi dari NLD kepada lembaga pers asing dan kedutaan asing di Rangoon |
| 32 | Aung Kyaw | Editor majalah <i>Sar-maw-khung</i> (<i>The Literary World</i>), | 2000 7 tahun | - | Pelanggaran terhadap <i>State Protection Law</i> |
| 33 | Hla Hlut Soe | - | 2002 | - | - |
| 34 | Ko Ko Maung | Penulis | 2002 | - | - |
| 35 | Thet Zaw (Zaw Thet Htway) | Editor jurnal olahraga <i>First Eleven</i> | 2003 hukuman mati | - | Percobaan pembunuhan terhadap beberapa pimpinan junta militer |
| 36 | Maung Tin Thit | Penulis puisi | - | - | - |
| 37 | Thaw Thaw Myo Han | Mahasiswa; penulis | - | bebas | Menulis artikel yang mendukung demokrasi serta terlibat dalam pengorganisasian demonstrasi pro-demokrasi |

Sumber: *List of Journalists, Authors, Poets Who Received Sentences after 1988*, diakses dari www.irrawaddy.org, update tanggal 24 Mei 2004.

II. 2 Kebijakan Pendidikan Pemerintah Junta Militer: Kontrol terhadap Universitas

Langkah pemerintah junta militer Myanmar untuk menghalangi terbentuknya opini publik dan mencegah masyarakat untuk berserikat, tidak hanya terkonsentrasi pada pengeluaran UU yang mengatur tentang media massa untuk membatasi peran media massa dalam membentuk opini publik. Konsentrasi pemerintah junta militer berikutnya adalah pada sekolah-sekolah tinggi dalam tingkat universitas/institut yang merupakan lokasi strategis bertemunya para kaum intelektual. Bagi junta militer, berkumpulnya kaum intelektual merupakan ancaman tersendiri karena dapat mengarah pada munculnya gerakan/protes demokrasi anti-pemerintah. Dibuktikan dengan munculnya gerakan mahasiswa

pertama kali, yaitu tanggal 16 Maret 1988 yang dipimpin oleh Min Ko Naing.¹⁰⁴ Setelah peristiwa tersebut, pemerintah menutup semua universitas. Terhitung sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2000, universitas di Myanmar hanya beroperasi selama kurang lebih 40 bulan.¹⁰⁵

Selama dekade 1990an, pemerintah junta militer telah menutup universitas-universitas sebanyak delapan kali, meski setelah pemilu 1990 dilaksanakan, pemerintah junta militer tetap mengacuhkan sistem pendidikan di Myanmar. Setelah ditutup tahun 1988, universitas dibuka kembali Mei 1991, namun tujuh bulan kemudian ditutup kembali, menyusul demonstrasi yang diadakan oleh mahasiswa untuk mendukung Aung San Suu Kyi yang telah dihadiahi Nobel Perdamaian. Juni 1992, universitas dibuka lagi dengan tahun akademik yang telah dikurangi menjadi lima bulan, kemudian ditutup pada November 1992. Rentang tahun akademik kembali direduksi ketika junta militer membuka universitas pada Maret 1993 dan ditutup lagi pada bulan Juli tahun yang sama. September 1993, universitas dibuka lagi hingga Januari 1994. Selama tahun 1994, universitas dibuka selama lima bulan, yaitu sejak Agustus sampai dengan Desember 1994. memasuki tahun 1995, pemerintah junta militer menetapkan tahun akademik yang hanya berlangsung selama empat bulan, yaitu antara bulan Mei hingga September 1995. Kemudian, pemerintah kembali membuka universitas pada bulan November 1995 sampai Mei 1996. Universitas kembali beroperasi pada September 1996. Menyusul terjadinya demonstrasi mahasiswa yang berlangsung tanggal 2 Desember 1996, pemerintah junta militer kemudian

¹⁰⁴ "Min Ko Naing, 'Conqueror of Kings'," diakses dari www.rebound88.net tanggal 6 Maret 2006

¹⁰⁵ "Annual Report of ABFSU Year 2000," diakses dari www.dvb.english.net tanggal 6 Maret 2006

menutup seluruh universitas di Myanmar sejak tanggal 12 Desember 1996. Baru empat tahun kemudian, junta militer membuka kembali seluruh universitas. Universitas-universitas tersebut berada di bawah kontrol Departemen Pendidikan Tinggi (Higher Education Department).¹⁰⁶

Kontrol pemerintah terhadap sistem pendidikan di Myanmar juga berlanjut dengan memindahkan lokasi kampus-kampus perguruan tinggi dari pusat kota ke daerah-daerah pinggir, jauh dari keramaian.¹⁰⁷ Relokasi kampus tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan mahasiswa dari bertemu atau berkumpul dan memungkinkan adanya upaya untuk melakukan demonstrasi/protes anti-pemerintah.¹⁰⁸ Sebagai akibat, mahasiswa diharuskan untuk menempuh perjalanan sejauh 40 kilometer (setara dengan 2 jam perjalanan) untuk mencapai universitas terdekat. Dengan perjalanan sejauh dan selama itu ditengah kemacetan lalu lintas yang padat, ditambah dengan frekuensi penutupan universitas yang tinggi, secara tidak langsung hal tersebut telah menurunkan semangat dan keinginan mahasiswa untuk belajar.¹⁰⁹ Secara kebetulan, kampus-kampus baru-yang juga dijaga dengan ketat-tersebut ditempatkan di dekat basis

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Jean Michel Archambault-Cyr, "Crisis: The Education Breakdown in Burma," *The McGill Daily*; Lihat juga di Roger Mitton, "Schools Have Reopened and Ne Win's Wife, Ni Ni Myint, is Happy," *Asiaweek*, 20 Oktober, 2000; Jen Lin-Liu, "Searching for an Education in Repressive Myanmar," *The Chronicle*, 7 Juni, 2002; "Daw Aung San Suu Kyi Message to the 56th Session of the UN Commission on Human Rights," *ASSK: Message to UN Commission on Human Rights 5 April 2000*, diakses dari www.rebound88.net tanggal 6 Maret 2006.

¹⁰⁸ Edward Tang, "Burma's 'Lost Generation': Frequent University Closures Have Left the Students with Dented Dreams, a Low Motivation for Learning and an Attraction for Nothing but the Good Life," *The Strait Times*, 18 Mei, 2001, diakses dari www.rebound88.net tanggal 6 Maret 2006.

¹⁰⁹ *Ibid.*

militer.¹¹⁰ Hal itu semakin memudahkan pemerintah junta militer untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas mahasiswa.

Berkaitan dengan langkah-langkah junta militer itu, John Jackson dari Burma Action Group, menyatakan bahwa pemerintah memiliki tujuan untuk melakukan '*brain drain*' melalui kebijakan terhadap pendidikan tersebut.¹¹¹ Junta militer percaya bahwa dengan mencegah munculnya suatu alternatif, mereka dapat mempertahankan kekuasaan.

Relokasi universitas tersebut juga memberikan kesulitan lain bagi mahasiswa. Kampus-kampus baru tersebut tidak memberikan akomodasi/sarana yang layak, karena selain tidak menyediakan tempat yang memungkinkan mahasiswa untuk berkumpul dan berbincang-bincang, kampus-kampus tersebut tidak menyediakan buku, baik dalam kualitas dan kuantitas yang memadai.¹¹² Kalaupun di dalam perpustakaan universitas ditemui beberapa buku, buku-buku tersebut sudah tidak layak dipergunakan. Di samping itu, pemerintah juga secara ketat mengawasi materi-materi yang diajarkan di universitas serta meng-edit kembali *textbooks* yang dipergunakan oleh universitas sesuai dengan pandangan pemerintah junta militer.¹¹³

Tindakan pemerintah junta militer Myanmar dalam mengontrol mahasiswa juga dilakukan pada tahap awal mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Pemerintah junta militer menetapkan beberapa peraturan/kriteria kepada

¹¹⁰ Michel Archambault-Cyr, *Loc. Cit.*

¹¹¹ Joe Havely, "Burma's 'Lost Generation': Former Burmese Students Continue Their Protest in Bangkok", diakses dari www.rebound88.net tanggal 6 Maret 2006.

¹¹² Michel Archambault-Cyr, *Loc. Cit.*

¹¹³ Jen Lin-Liu, "Searching for an Education in Repressive Myanmar," *The Chronicle*, 7 Juni, 2002, diakses dari www.rebound88.net tanggal 6 Maret 2006.

siapa saja yang berminat mengikuti ujian tersebut untuk dapat memasuki jenjang universitas/akademi. Sebelum mengikuti ujian, siswa harus lolos seleksi menurut kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah junta militer. Kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan antara lain:¹¹⁴

- pernah memiliki hubungan dengan kelompok oposisi
- memiliki keluarga yang terlibat gerakan bawah tanah atau merupakan anggota kelompok oposisi/insurgensi
- memiliki catatan kriminal
- pernah terlibat dalam politik atau partai politik
- pernah terlibat dengan kelompok perlawanan mahasiswa
- memiliki karakter “baik” atau “buruk”

Pemerintah junta militer menerapkan standart-standart tersebut ke dalam setiap ujian masuk di seluruh perguruan tinggi serta pendidikan tingkat diploma.

Beberapa universitas dan akademi, seperti Military Medical University, Military Engineering University, Military College of Technology dan Military Mechanical College, juga menetapkan persyaratan ketat untuk mengikuti ujian masuk. Siswa yang berminat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tersebut, sebelumnya harus mengikuti ujian masuk dan memenuhi kriteria seperti telah disebutkan di atas. Siswa harus mendapat rekomendasi dari kantor polisi dan intelijen terdekat sebelum diijinkan mengikuti ujian. Setelah lolos seleksi dan mengikuti ujian, siswa baru boleh mengikuti perkuliahan di universitas/akademi tersebut. Selama mengikuti kuliah, setiap bulannya mahasiswa mendapatkan

¹¹⁴ Foreign Affairs Committee of All Burma Federation of Student Unions., “Restriction on University and College Level Entrance Exam,” 19 April, 2000, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

military stipend dari militer. Setelah menyelesaikan kuliah di universitas tersebut, mahasiswa harus menandatangani kontrak terikat dalam wajib militer selama 10 tahun.¹¹⁵

Pada bulan Juni 2000, The National Race Development University mengadakan Primary Teacher-Training Course. Program tersebut mendapatkan respon baik dari masyarakat banyak. Namun, pemerintah junta militer melakukan pengecekan ketat kepada setiap pelamar. Pelamar yang lolos seleksi untuk mengikuti ujian masuk telah diselidiki oleh polisi lokal dan intelijen militer mereka berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Otoritas lokal mengumpulkan informasi berdasarkan kriteria-kriteria tersebut untuk menentukan siapa yang berhak dan yang tidak berhak mengikuti ujian masuk untuk Primary Teacher-Training Course.¹¹⁶

Kekhawatiran pemerintah junta militer terhadap mahasiswa dan apa yang mungkin bisa mereka lakukan ternyata mendorong pemerintah junta militer untuk lebih ketat mengontrol sistem pendidikan di Myanmar. Penutupan universitas juga membawa dampak lain karena penutupan tersebut telah memperpendek waktu studi di universitas sehingga antrian bagi para pelajar yang akan masuk universitas menjadi semakin panjang. Respon pemerintah terhadap masalah tersebut adalah dengan memperpendek masa kuliah, di mana rentang semester hanya berlangsung selama satu sampai dua bulan.

Selain dapat mengurangi daftar panjang antrian pelajar yang ingin masuk universitas, reduksi masa perkuliahan tersebut juga dapat menghalangi

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

mahasiswa untuk terlalu sering berkumpul. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga membentuk suatu “*correspondence course*” melalui University of Distance Education (UDE). Dalam perkuliahan sistem ini, mahasiswa hanya perlu untuk mendengarkan perkuliahan melalui kaset dan membaca buku teks tanpa harus datang ke kampus dan mengikuti perkuliahan. Sepuluh hari kemudian, mahasiswa sudah dapat mengikuti ujian akhir.¹¹⁷

Akan tetapi, pelajar-pelajar yang akan masuk perguruan tinggi tersebut tidak diterima begitu saja untuk belajar ke perguruan tinggi sebelum melalui ujian seleksi secara ketat. Mereka yang lulus seleksi terutama adalah mereka yang tidak pernah terlibat dalam kelompok/organisasi oposisi.¹¹⁸ Kemudian pemerintah junta militer juga menganjurkan para dosen untuk menuruti kemauan mahasiswa, menciptakan suasana di mana sangat mudah bagi mahasiswa untuk berbuat curang selama ujian. Dan karena upah yang diterima para dosen cukup sedikit, sekitar 10 sampai 15 dolar per-bulan, maka dosen-dosen tersebut melegalkan penyogokan sebelum dan setelah ujian.¹¹⁹ Dengan demikian, kualitas pendidikan di Myanmar menunjukkan grafik yang menurun.

II.3. Kontrol Birokrasi: Sebuah Permainan Kekuasaan

Seperti halnya negara, *struggle for power* juga terjadi di dalam sebuah birokrasi, tidak terkecuali junta militer Myanmar. Bagaimana junta militer merebut pemerintahan pada tahun 1962, juga merupakan suatu bentuk *struggle for power*. *Struggle for power* dalam tubuh birokrasi lebih mendekati apa yang

¹¹⁷ Jen Lin-Liu, *Loc. Cit.*

¹¹⁸ Foreign Affairs Committee of All Burma Federation of Student Unions, *Loc. Cit.*

¹¹⁹ Jen Lin-Liu, *Loc. Cit.*

digambarkan sebagai suatu permainan, di mana juga terdapat *rules of the game* dalam permainan kekuasaan tersebut.¹²⁰

Setelah berhasil menggulingkan pemerintahan U Nu, junta militer yang berada di bawah pimpinan Ne Win, mulai mengadakan beberapa perubahan dalam sistem politik Myanmar dengan tujuan untuk memperkuat konsolidasi kekuasaan di dalam tubuh junta sehingga junta militer dapat mempertahankan kursi kekuasaannya. Upaya konsolidasi junta militer hampir mengalami kegagalan ketika secara mengejutkan NLD dapat memenangkan Pemilihan Umum 27 Mei 1990 dengan suara mayoritas dibanding NUP, yang merupakan partai rezim saat itu. Sejak saat itu, junta militer semakin mempertegas upaya konsolidasinya hingga saat ini demi menyelamatkan kekuasaannya.

Selain menekan opini publik yang berkembang di Myanmar, junta militer melakukan upaya konsolidasi dengan memperketat kontrol birokrasi di dalam junta militer sendiri. Terhitung sejak 15 November 1997, junta militer telah melakukan *reshuffle* kabinetnya sebanyak 14 kali.¹²¹ Tidak kalah dengan kondisi dalam negeri Myanmar yang penuh dengan konflik, kondisi internal junta militer Myanmar juga sangat kompetitif, di mana tiap-tiap pihak di dalam tubuh junta tersebut saling berkompetisi untuk mendapatkan *influence* yang lebih besar sehingga dapat mempengaruhi keputusan/kebijakan yang diambil oleh pimpinan tertinggi junta militer, dan sekaligus mempertahankan posisinya atau bahkan meraih posisi yang jauh lebih berpengaruh. Peristiwa Black Friday (30 Mei 2003)

¹²⁰ Untuk memahami lebih jelas mengenai *rules of the game* yang terdapat dalam politik birokrasi dapat dilihat dalam Little&Smith, eds., *Perspectives on World Politics* (2nd ed., New York: Routledge, 1994), hal. 187.

¹²¹ "Burmese Reshuffle Keeps World Guessing," *Bangkok Post*, 29 Agustus, 2003, dalam *Report Card Burma: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 10.

yang berujung dengan penahanan kembali Aung San Suu Kyii oleh pemerintah junta, juga menjadi sinyal upaya konsolidasi junta militer karena peristiwa Black Friday tersebut terjadi di tengah-tengah usaha *military build-up* junta militer.¹²²

A. *Reshuffle*: Bagian dari Permainan Kekuasaan

Secara mengejutkan, pemerintah junta militer Myanmar memberhentikan Menteri Luar Negeri Win Aung dan empat menteri lainnya pada pertengahan September 2004 lalu.¹²³ Than Shwe kemudian menunjuk Mayor Jenderal Nyan Win sebagai Menteri Luar Negeri. Selain memecat menteri luar negeri pemerintah junta militer juga memecat wakil menteri luar negeri, Khin Maung Win, dan kini posisinya digantikan oleh Kolonel Maung Myint. Empat menteri lainnya yang juga diberhentikan termasuk Menteri Pertanian dan Irigasi, Menteri Transportasi, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi yang posisinya bergeser menjadi Menteri Transportasi.¹²⁴

Tabel II. 2

Reshuffle September 2004

| Nama | Posisi/Jabatan | Pengganti |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Win Aung | Menteri Luar Negeri | Mayjen. Nyan Win |
| Khin Maung Win | Wakil Menteri Luar Negeri | Kol. Maung Myint |
| Mayjen. Nyun Tin | Menteri Pertanian dan Irigasi | Mayjen. Htay Oo |
| Mayjen. Hla Myint Swe | Menteri Transportasi | Mayjen Thein Swe |
| Brigjen. Pyi Sone | Menteri Perdagangan | Brigjen. Tin Naing Thein |
| Mayjen. Thein Swe | Menteri Koperasi | Kol. Zaw Min |

Sumber: Kompas 20 September 2004

¹²² *Report Card Burma: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 12.

¹²³ "Junta Myanmar Pecat Menlu Win Aung," *Kompas*, 20 September, 2004, diakses dari www.kompas.com tanggal 22 November 2005.

¹²⁴ *Ibid.*

Satu bulan kemudian, tepatnya 19 Oktober 2004, Jenderal Than Shwe mengumumkan pemecatan Perdana Menteri Khin Nyunt. Berita tersebut memupuskan harapan masyarakat internasional akan datangnya demokrasi di Myanmar. Bagi masyarakat internasional, PM Khin Nyunt dianggap sebagai tokoh yang dapat membuka dialog dengan kelompok-kelompok insurgen dan memberikan harapan segera terwujudnya demokrasi di Myanmar melalui tujuh butir "Road Map to Democracy" yang dicetuskannya pada 30 Agustus 2003. Untuk menggantikan posisi Khin Nyunt yang baru satu tahun menjabat sebagai perdana menteri, Than Shwe menunjuk Letnan Jenderal Soe Win sebagai perdana menteri Myanmar yang baru. Sebelumnya, Soe Win menjabat sebagai Sekretaris 1 dalam jajaran hirarki SPDC.

Jika menengok sedikit ke belakang, dapat diamati bahwa dalam jangka waktu kurang dari dua tahun, pemerintah junta militer Myanmar telah empat kali melakukan *reshuffle*. Awal bulan Februari 2003, junta militer Myanmar telah mengangkat Letjen. Soe Win, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu petinggi dalam USDA (Union Solidarity and Development Association) sebagai Sekretaris 2 dalam keanggotaan SPDC.¹²⁵ Pengangkatan Letjen. Soe Win sebagai Sekretaris 2 tersebut bersamaan dengan pengangkatan sembilan komandan regional.

¹²⁵ *Report Card Burma: Charm Offensive, Op. Cit.*, hal. 7.

Tabel II. 3

Reshuffle Februari 2003

| Promotions for Nine Regional Commanders¹²⁶ | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Name | Last Position | New Position |
| Lt. Gen. Thura Shwe Mann | Southwest Command Commander | Chief of Staff of the Defense Service |
| Lt. Gen. Thein Sein | Triangle Region Command Commander | Adjutant-General |
| Lt. Gen. Thiha Thura Tin Aung Myint Oo | Northeast Command Commander | Quarter-Master General |
| Lt. Gen. Tin Aye | Southern Command Commander | Military Weapons Production General |
| Lt. Gen. Kyaw Win | Northern Command Commander | Director of Military Training |
| Lt. Gen. Ye Myint | Central Command Commander | Bureau of Special Operation-1 Commander |
| Lt. Gen. Aung Htwe | Western Command Commander | Bureau of Special Operation-2 Commander |
| Lt. Gen. Khin Maung Tan | Rangoon Command Commander | Bureau of Special Operation-3 Commander |
| Lt. Gen. Maung Bo | Eastern Command Commander | Bureau of Special Operation-4 Commander |
| New Bureau of Special Operations Commanders¹²⁷ | | |
| Lt. Gen. Ye Myint | | |
| Lt. Gen. Aung Htwe | | |
| Lt. Gen. Khin Maung Tan | | |
| Lt. Gen. Maung Bo | | |
| Appointment of Deputy Chief Justice and Supreme Court Justice¹²⁸ | | |
| Thein Soe | Deputy Chief Justice | |
| Khin Maung Aye | Supreme Court Justice | |
| Tin Aye | Supreme Court Justice | |
| Thet Tun | Supreme Court Justice | |
| Kyaw Win | Supreme Court Justice | |
| Appointment of Deputy Attorney Generals¹²⁹ | | |
| Dr. Tun Shin | | |
| Han Shein | | |
| Myint Naing | | |

¹²⁶ "The Top Commander," *NCGUB NewsDesk*, 4 Februari, 2003, dalam *Report Card Burma: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 7-8.

¹²⁷ "SPDC Declaration No. 1/2003," 1 Februari, 2003, dalam *Report Card Burma: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 8.

¹²⁸ "Appointment of Deputy Chief justice and Supreme Court Justice," SPDC Order No. 1/2003, 2 Februari, 2003, dalam *Report Card Burma: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 8.

¹²⁹ "Appointment of Deputy Attorney Generals," SPDC Order No. 2/2003, 2 Februari, 2003, dalam *Report Card Burma: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal 9.

| New Appointments and "Retirement" of Ministers ¹³⁰ | | |
|---|----------------------------------|--|
| Pan Aung | Minister for Rail Transportation | Reassigned to Minister of Prime Ministers Office |
| May. Gen Aung Min | | Assigned to Minister for Rail Transportation |
| Dr. Kyaw Myint | | Assigned to Minister for Health |
| May. Gen. Hla Tun | | Assigned to Minister for Finance and Revenue |
| May. Gen. Kat Sein | Minister for Health | "Retire" |
| Khin Maun Thein | Minister for Finance and Revenue | "Retire" |

Kemudian, dalam kurun waktu kurang dari tujuh bulan, Jend. Than Shwe kembali mengumumkan perombakan anggota SPDC dan kabinetnya. Reshuffle yang diumumkan tanggal 25 Agustus 2003 tersebut, menjadi promosi jabatan kedua bagi Letjen. Soe Win.¹³¹ Oleh Jend. Than Shwe, Letjen. Soe Win ditetapkan sebagai Sekretaris 1 menggantikan Khin Nyunt yang kemudian diangkat menjadi Perdana Menteri. Bersama itu pula, junta militer Myanmar juga mengangkat tiga orang lainnya untuk menduduki jabatan dalam SPDC.

Tabel II. 4

Reshuffle 25 Agustus 2003

| Name | Last Position | New Position |
|---------------------|--|---|
| Khin Nyunt | Secretary 1 of SPDC | Prime Minister |
| Lt. Gen. Soe Win | Secretary 2 of SPDC | Secretary 1 of SPDC |
| Lt. Gen. Thein Sein | Commander of MOC-4 (Phugyi) and the Golden Triangle Military Region | Secretary 2 of SPDC |
| U Ko Lay | Mayor of Rangoon | Minister of the Prime Minister's Office |
| May. Gen Thein Shwe | Chairman of the Kayen (Karen) SPDC or Head of the Defense Ministry's External Intelligence | Minister of the Prime Minister's Office |

Sumber: Report Card Burma: Arrested, 1 April-30 Juni, 2003, hal. 10-11.

¹³⁰ SPDC Declaration No. 1/2003, 1 Februari, 2003, *Loc. Cit.*

¹³¹ *Report Card Burma: Arrested, Op. Cit.*, hal. 10.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, reshuffle berikutnya terjadi pada pertengahan September 2004, di mana junta militer memberhentikan empat orang menterinya dan menggeser posisi satu orang menteri. Terakhir, junta militer memberhentikan Perdana Menteri Khin Nyunt tanggal 19 Oktober 2004. Namun, jauh sebelum Khin Nyunt diberhentikan sebagai perdana menteri, junta militer mengadakan perombakan “kecil” di dalam kabinet pemerintah junta militer, tepatnya pada pertengahan November 2001. Saat itu, junta militer memberhentikan Wakil Perdana Menteri Tin Hla bersama dengan Sekretaris 3 Win Myint. Pemecatan tersebut kemudian disusul dengan tewasnya Sekretaris 2 SPDC, Jenderal Tin Oo (pendukung Maung Aye dan rival utama bagi Khin Nyunt), dalam sebuah kecelakaan helikopter yang misterius pada bulan Februari 2001.¹³²

B. Pertimbangan di balik *Reshuffle*

Idiom ‘*where you stand depend on where you sit*’ ternyata memang berlaku dalam kaitannya dengan permainan kekuasaan di dalam birokrasi. *Reshuffle* yang dilakukan berulang kali oleh junta militer Myanmar, memberikan sinyal bahwa terdapat kompetisi/persaingan yang sangat ketat dalam sebuah permainan kekuasaan di dalam tubuh junta militer. Pemecatan dan pengangkatan terhadap pihak-pihak tertentu yang dilakukan oleh junta militer (Jend. Than

¹³² J. Mohan Malik, “India’s Coddling of Military Dictatorship Hasn’t Help a Bit,” *The Pioneer*, 19 Desember, 2001, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2001.

Shwe) tentunya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, sebagai bagian dari permainan kekuasaan.

Dalam dua tahun terakhir, reshuffle yang dilakukan oleh junta melibatkan dua tokoh sentral, di antaranya adalah Khin Nyunt dan Letjen. Soe Win. Berkaitan dengan *reshuffle* tersebut, beberapa pihak menuding bahwa *reshuffle* tersebut mengindikasikan konsolidasi kekuatan.¹³³ Seperti yang dikutip oleh Kompas, Debbie Stothard dari kelompok penekan ALTSEAN, menyatakan bahwa Than Shwe ingin mempromosikan pelayan-pelayan yang patuh perintah.¹³⁴ Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Washington Post, bahwa fenomena pemecatan Khin Nyunt dan Menteri luar Negeri Win Aung adalah untuk mempromosikan kalangan garis keras (*hardliners*) dalam jajaran pemerintahan junta militer.¹³⁵ Dengan diberhentikannya Khin Nyunt dan Win Aung, praktis hampir di hampir semua lini kini ditempati oleh perwira militer.

Secara kebetulan, Khin Nyunt ditunjuk menjadi Perdana Menteri Myanmar hanya selang tiga bulan dari peristiwa Black Friday, di mana dalam peristiwa tersebut, Aung San Suu Kyi dan beberapa anggota NLD “diamankan” oleh junta militer. Kurang dari seminggu setelah diangkat, PM Khin Nyunt mempromosikan tujuh butir Road Map to Democracy yang nantinya menjadi pedoman bagi Myanmar untuk melakukan proses demokratisasi. Menurut ALTSEAN, salah satu kelompok penekan, pengangkatan Khin Nyunt dan perumusan *road map* tersebut merupakan *stalling tactic* yang sangat jitu bagi

¹³³ Ellen Nakashima, “Burmese Military rulers Force Out Prime Minister,” *Washington Post*, 20 Oktober, 2004, di akses dari www.washingtonpost.com, tanggal 22 November 2005.

¹³⁴ “Junta Militer Pecat Menlu Win Aung,” *Loc. Cit.*; *Report Card Burma: Arrested, Op. Cit.*, hal. 10.

¹³⁵ Nakashima, *Loc. Cit.*

pemerintah junta militer Myanmar, suatu rencana untuk mengurangi tekanan internasional dengan sekaligus menjamin hasil-hasil yang tetap pro-militer.¹³⁶ *Road map* tersebut merupakan jalan keluar bagi junta militer untuk tetap menjaga kontrol militer di Myanmar dan penolakan langsung terhadap resolusi PBB untuk mengadakan *tripartite dialogue*.¹³⁷

Junta militer telah 'menjual' *road map* tersebut sebagai sebuah inisiatif yang dicetuskan oleh seorang tokoh moderat yang dianggap mampu memberi harapan kepada masyarakat internasional akan terjadinya perubahan di Myanmar. *road map* itu sendiri tidak dapat bertahan sebagai sebuah konsep bila tidak mendapatkan persetujuan dari Than Shwe yang merupakan pemegang otoritas tertinggi di dalam junta militer. Karena Than Shwe dipahami sebagai tokoh yang tidak memiliki kepentingan dalam proses demokratisasi, maka *road map* tersebut hanya merupakan strategi yang dilakukan oleh junta militer untuk memperkokoh kekuasaan militer.¹³⁸

Meskipun *road map* yang dicetuskan oleh PM Khin Nyunt tersebut secara khusus mengagendakan sebuah konvensi nasional, namun dirasakan ada beberapa hal yang "hilang" dari *road map*, di antaranya adalah:¹³⁹

- kerangka waktu yang jelas
- peran bagi NLD dan atau kelompok oposisi demokratis lainnya
- peran bagi kelompok etnis nasional

¹³⁶ *Report Card Burma: Arrested, Op. Cit.*, hal. 8.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Special Report: On the Road to Democracy*, (Bangkok: Altsean, 2004), 1 September 2003-29 Februari 2004, hal. 9, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹³⁹ *Report Card Burma: Arrested, Op. Cit.*, hal. 9.

- komitmen untuk membebaskan Aung San Suu Kyii, orang-orang yang ditahan sejak peristiwa Black Friday dan tahanan politik lainnya
- komitmen untuk menghentikan gencatan senjata di seluruh pelosok negara dan persetujuan untuk menghentikan pertentangan dengan kelompok etnis nasional

Selain itu, juga terdapat keganjilan dari apa yang ditawarkan dalam konvensi nasional yang diagendakan dalam *road map*, seperti yang dinyatakan oleh The Irrawaddy:

- ... the convention does offer:
- ▶ Guarantee of a 'leading role of Burma's armed forces in the future affairs of the state'.¹⁴⁰
 - ▶ Guarantee of the military's right to declare a "state of emergency" whenever deemed necessary.¹⁴¹
 - ▶ Guarantee that presidential candidates be "well-versed in military affairs" effectively limiting qualification to serving or retired members of the armed forces.¹⁴²
 - ▶ Requirement that the military appoint 25% of the seats in both the upper and lower house.¹⁴³
 - ▶ Requirement that at least one of the three people holding offices of president and vice president be from military.¹⁴⁴

Setahun kemudian, 19 Oktober 2004, Khin Nyunt-yang juga mengepalai organisasi intelijen militer yang kuat-dipecat dengan tuduhan korupsi.¹⁴⁵ Sebelum diberhentikan, Khin Nyunt telah memperluas kekuasaan intelijen militer melalui penahanan dan investigasi serta menggeser kontrol terhadap perdagangan asing dari komandan militer lokal di area perbatasan utama

¹⁴⁰ "Ethnic Agendas: The PM's Road Map to Nowhere," *The Irrawaddy*, 6 September, 2003, dalam *Report Card Burma: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 9.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ "New Approach to Combat the Rhetoric," *The Irrawaddy*, 3 September, 2003, dalam *Report Card Burma: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 9.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Nakashima, *Loc.Cit.*

ke kelompok keamanan perbatasan yang berda di bawah kontrolnya. Konsolidasi kekuasaan dan kekayaan inilah yang membuat Than Shwe naik pitam.¹⁴⁶ Satu bulan sebelumnya, junta militer terlebih dahulu memecat Menteri Luar Negeri Win Aung dan wakilnya, Khin Maung Win yang keduanya diduga dekat dengan Khin Nyunt.¹⁴⁷ Mereka kemudian digantikan oleh perwira militer yang sepaham dengan Than Shwe.

Pemberhentian Khint Nyunt sebagai perdana menteri diduga dilatarbelakangi pula oleh orientasi kerjasama Khint Nyunt yang dianggap sangat pro-China. Orientasi tersebut berbeda 180 derajat dengan orientasi yang dipegang oleh Jenderal Maung Aye, orang kedua dalam jajaran hirarki junta militer. Maung Aye dikenal sebagai pihak yang pro-India.¹⁴⁸ Diketahui pula bahwa terjadi rivalitas antara China dan India dalam berebut pengaruh di Myanmar. Pendepakan Khint Nyunt tersebut merepresentasikan suatu upaya untuk menyatukan kekuasaan ke dalam satu faksi di Myanmar. Hasil dari upaya tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi, baik pada isu-isu internal maupun dalam hubungan internasional.¹⁴⁹

Untuk menggantikan Khin Nyunt yang moderat, Than Shwe melirik pada Letjen. Soe Win, yang merupakan seorang pengikut garis keras dalam memandang kelompok pro-demokrasi. Karir Soe Win mulai meningkat sejak peristiwa Black Friday. Saat itu, Soe Win langsung diangkat menjadi Sekretaris 1 SPDC menggantikan Khin Nyunt yang diangkat menjadi perdana menteri. Setelah

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ J. Mohan Malik, *Loc. Cit.*

¹⁴⁹ "Burma: Foreign Diplomacy and Domestic Unrest," *Strategic Forecasting Inc.*, 14 Februari, 2006, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

Khin Nyunt dipecat, kembali Soe Win menggantikan posisinya sebagai perdana menteri. Pengangkatan Soe Win sebagai perdana menteri ini mendapat protes keras dari masyarakat Myanmar karena Soe Win dianggap sebagai arsitek peristiwa Black Friday.¹⁵⁰ Soe Win dianggap tepat oleh Than Shwe karena sikapnya yang keras menentang oposisi, terutama NLD. Sikapnya tersebut diungkapkan secara terbuka dengan menyatakan bahwa junta militer tidak akan mengadakan dialog ataupun memberikan kontrol pemerintahan kepada partai Aung San Suu Kyii.¹⁵¹ Dengan demikian, jelas bahwa *reshuffle* tersebut mengindikasikan suatu *power struggle* di dalam tubuh junta militer. *Reshuffle* tersebut juga semakin memperkuat garis keras di dalam posisi puncak rezim junta militer.

¹⁵⁰ Nakashima, *Loc. Cit.*

¹⁵¹ *Ibid.*; "No Plan to Talk to NLD and We Are Not afraid of USA-SPDC," *Democratic Voice of Burma*, 28 Januari, 2003, dalam *Report Card Burma: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 11.

BAB III

LANGKAH EKSTERNAL PEMERINTAH JUNTA MILITER MYANMAR: *QUID PRO QUO*

Dalam Bab III ini dijelaskan langkah eksternal yang diambil oleh pemerintah junta militer. Langkah eksternal tersebut merupakan suatu upaya untuk membangun ikatan kerjasama dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan membantu pemerintah junta militer bertahan dari berbagai tekanan internasional, mengingat sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh masyarakat internasional kepada Myanmar (pemerintah junta militer) cukup merepotkan pemerintah junta militer.

Upaya kerjasama yang dibahas pada Bab III ini dikonsentrasikan pada beberapa negara tetangga yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan bantuan kepada pemerintah junta militer, terutama dalam hal bantuan ekonomi dan militer. Perlu diketahui pula bahwa Myanmar selain menjalin kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya, Myanmar juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara di dunia.¹⁵² Bagian awal dari Bab III ini mengacu pada negara-negara ASEAN yang tetap menggunakan prinsip non-intervensi serta *constructive engagement* dalam menghadapi masalah Myanmar. Selain mengajukan tuntutan untuk segera mengadakan perubahan kondisi politik dalam negeri, beberapa negara anggota ASEAN juga memberikan asistensi

¹⁵² Lihat lampiran 3 dan lampiran 4.

kepada pemerintah junta militer Myanmar. Thailand, Malaysia dan Singapura adalah tiga negara utama anggota ASEAN yang mengulurkan bantuannya melalui beberapa kerjasama ekonomi dan militer. Meski demikian, dalam Bab III ini dibahas pula kerjasama Myanmar dengan tiga negara Indo-China yang juga merupakan anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja.

Penjelasan berikutnya diarahkan pada beberapa negara tetangga Myanmar yang memiliki pertimbangan-pertimbangan strategis dalam melakukan kerjasama dengan Myanmar. Lokasi geografis Myanmar merupakan lokasi yang paling strategis sehingga siapapun yang mengontrol Myanmar dapat mengontrol gerbang ke Asia. Pertimbangan tersebut menjadi faktor penentu kebijakan negara-negara tetangga Myanmar dalam mewujudkan kepentingan ekonomi dan militernya. Dua negara tetangga Myanmar yang memiliki pertimbangan strategis di sektor ekonomi dan militer adalah China dan India. Kedua negara ini merupakan rival satu sama lainnya, sehingga mereka memperebutkan pengaruh di Myanmar. Di samping mengimbangi pengaruh, India juga disibukkan dengan masalah insurgensi di daerah perbatasannya dengan Myanmar. India berharap agar hubungannya dengan Myanmar dapat membantu mengatasi kelompok insurgensi yang menentang pemerintahannya.

Tidak jauh berbeda dengan China dan India, Bangladesh mulai mempertimbangkan kerjasama dengan Myanmar untuk memantapkan posisinya yang berada diantara dua kutub pengaruh besar, yaitu China dan India. Sedangkan Rusia dan Korea Selatan lebih mengutamakan pertimbangan ekonomi dalam menjalankan kerjasama dengan Myanmar.

III. 1. Enam Negara Anggota ASEAN

Setelah menjadi negara anggota ASEAN sejak tahun 1997, Myanmar menikmati beberapa keuntungan dari ASEAN. Meski ASEAN sendiri menuntut Myanmar untuk segera melakukan perubahan kondisi, namun tindakan yang dipilih oleh ASEAN cenderung lunak sehingga tidak memberi pengaruh besar bagi upaya perubahan di Myanmar. Selain itu, masing-masing negara anggota ASEAN memiliki respon yang berbeda-beda terhadap kondisi yang terjadi di Myanmar. Mereka tidak saling mendukung atas upaya-upaya yang diusulkan oleh salah satu negara anggota untuk melakukan perubahan di Myanmar.

Kondisi-kondisi semacam itu dimanfaatkan oleh Myanmar untuk mempertahankan kekuasaannya dan menghadapi tekanan internasional dengan berlindung di bawah prinsip *constructive engagement* yang dijadikan acuan bagi ASEAN untuk mengatasi masalah Myanmar. *Constructive engagement* tersebut tidak mengutamakan sanksi, tetapi memberikan tuntutan kepada Myanmar melalui kerjasama. Berikut adalah enam negara anggota ASEAN yang melakukan kerjasama nyata dengan pemerintah junta militer Myanmar.

A. Thailand

Myanmar merupakan negara yang mampu mengambil perhatian negara lain untuk melakukan kerjasama, salah satunya adalah Thailand. Karena di samping berbatasan langsung dengan Thailand, Myanmar dan Thailand juga memiliki masalah sama dalam hal insurgensi dan perdagangan obat bius. Meski sempat diwarnai dengan ketegangan selama beberapa waktu berkaitan dengan

insurgensi diperbatasan Thailand, hubungan Myanmar-Thailand menunjukkan peningkatan, dan hingga saat ini, Myanmar masih menjadikan Thailand sebagai sasaran ekspor utamanya. Pada tanggal 9-10 Februari 2003, Perdana Menteri Thaksin Sinawathra mengadakan pertemuan dengan Jenderal Than Shwe dalam suatu kunjungan ke Myanmar. Dalam kunjungan selama dua hari tersebut, kedua belah pihak menyepakati kerangka kerjasama dalam tiga area utama, yaitu perbatasan, ekonomi dan hubungan internasional.¹⁵³

Myanmar juga membuka kerjasama industri dengan Thailand. Menurut rencana, Thailand membangun tiga zona industri sepanjang perbatasan Myanmar-Thailand sebagai bagian dari kerjasama bilateral di bawah bingkai ECS (Economic Cooperation Strategy).¹⁵⁴ Tiga kawasan industri tersebut ditempatkan di Myawaddy, Pa-an (Karen) dan Moulmein (Mon). Menurut Than Shwe, kawasan industri tersebut tidak hanya membuka lapangan kerja di Myanmar, tetapi juga memberikan keuntungan ekonomi dan sosial bagi kedua negara. Dalam kerjasama tersebut, Thailand menyediakan bantuan bagi pembangunan sektor-sektor transportasi, industri dan infrastruktur dan juga bertanggung jawab dalam membangun pabrik-pabrik serta pemasaran produk.¹⁵⁵

Masih di bawah kerangka ECS, Myanmar dan Thailand juga merencanakan untuk membangun pelabuhan laut di Tavoy (Dawei), divisi

¹⁵³ "Myanmar-Thailand Agreed to Cooperate Closely on Border Area," *Asian Tribune*, 10 Februari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 January-31 March 2003, hal. 38.

¹⁵⁴ "Special Industrial Zones to be Established in Myanmar," *Xinhua*, 11 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision Loc. Cit.*, hal. 61.

¹⁵⁵ "Build Thai Factories in Myanmar for Mutual Benefit," *Xinhua*, 4 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 January-31 Maret 2004, hal. 61, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

Tenasserim. Kerangka ECS ini dimaksudkan untuk membangun fondasi bagi kerjasama regional.¹⁵⁶ Pembangunan pelabuhan tersebut merupakan rangkaian dari pembangunan jalan raya yang menghubungkan Dawei-Kachanaburi dan berlanjut ke proyek jalan raya trilateral yang menghubungkan Myanmar, India dan Thailand.¹⁵⁷ Selain kerjasama trilateral, Myanmar juga menjalin kerjasama ekonomi quadrilateral yang melibatkan Thailand, Laos dan Kamboja. Pada 31 Juli 2003, diadakan pertemuan selama dua hari di Bangkok antara Menteri Luar Negeri dari keempat negara tersebut untuk membangun landasan kerjasama di sektor transportasi, pariwisata dan *human development*.¹⁵⁸ Di samping itu, Myanmar juga telah memberikan hak bagi perusahaan Thailand untuk mengambil ikan di zona ekonomi eksklusifnya dalam sebuah kesepakatan yang diharapkan dapat menghasilkan US\$ 260 juta dalam jangka lima tahun.¹⁵⁹

Tanggal 25 Januari 2004, terbentuk kesepakatan untuk membuka *border trade* di Mae Hong Song.¹⁶⁰ Dengan kesepakatan tersebut, secara resmi para pengusaha dari sektor publik dan swasta dapat melakukan perdagangan formal dengan Myanmar melalui jalur Ban Fong Haeng di distrik Maung. Pengusaha Myanmar dan Thailand yang melakukan perdagangan perbatasan tersebut sebelumnya harus melalui pemeriksaan latar belakang untuk memastikan

¹⁵⁶ *Report Card: Blurred Vision*, (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 63.

¹⁵⁷ "Thailand to Build Deep Seaport," *Xinhua*, 12 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 63, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁵⁸ "Regional Development Talks Begin Here Today," *The Nation*, 31 Juli, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 73, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁵⁹ "Myanmar Grants Thai Firms Exclusive Fisheries Deal," *Agence France Presse*, 14 Maret, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 44, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁶⁰ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 62.

mereka tidak terlibat dengan kelompok etnis atau pengedar obat bius. Sedang pengusaha dari Myanmar diwajibkan untuk mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah junta militer. Dari pihak distrik Maung sendiri menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan diri sepenuhnya untuk membuka perdagangan perbatasan dengan Mae Hong Song, dan mereka juga mewajibkan inspeksi ketat terhadap barang yang diperdagangkan untuk mencegah penyelundupan barang-barang ilegal. Selain itu, setiap barang yang diekspor dari Mae Hong Song juga harus melewati inspeksi dan pembayaran hanya dapat dilakukan melalui rekening bank.¹⁶¹

Di area hubungan internasional, Myanmar mendapatkan perhatian besar dari Thailand dengan merumuskan sebuah forum internasional, dikenal dengan "Bangkok Process". 15 Desember 2003, *Bangkok Process* berlangsung untuk membicarakan *road map* yang dicetuskan oleh SPDC. Namun pada kesempatan tersebut, junta militer tidak mampu memberikan informasi yang lebih spesifik tentang *road map* tersebut.¹⁶² Bangkok Process merupakan forum yang diprakarsai oleh Thailand sebagai sebuah upaya internasional untuk mendorong proses reformasi di Myanmar dan sekaligus memberi kesempatan bagi pemerintah junta militer Myanmar untuk memperbaiki hubungannya dengan negara-negara lain di dunia.¹⁶³

¹⁶¹ "Formal Trading with Burma to Start Soon," *Bangkok Post*, 27 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 62, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁶² "Bangkok Meet Sees Progress on Road Map Three Steps of Plan towards Democratic Reform to be Implemented Next Year, Says Junta," *Nation*, 16 Desember, 2003, dalam *Report Card: On the Road to Democracy* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 September 2003-29 Februari 2004, hal. 9, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁶³ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 60; *Interim Report Card* (Bangkok: Altsean, 2005), Juli 2004-Februari 2005, hal. 27, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

B. Singapura

Myanmar telah menjalin hubungan dekat Singapura dengan ketika Myanmar berada di bawah kekuasaan Ne Win. Singapura dapat dikatakan sebagai partner pemerintah junta militer Myanmar yang paling dipercaya dan sekaligus partner impor terbesar bagi Myanmar.¹⁶⁴ Hubungan Myanmar-Singapura menunjukkan peningkatan pada pertengahan dekade 1990an dan menurun drastis ketika Myanmar masuk menjadi anggota ASEAN, masa di mana Asia Tenggara sedang mengalami krisis ekonomi. Namun pada beberapa tahun terakhir, Singapura mulai membangun kembali hubungan yang tersebut. Terakhir, ketika Amerika Serikat kembali menerapkan sanksi baru bagi Myanmar, Singapura dengan senang hati membantu pemerintah junta militer Myanmar dalam merubah mata uang perdagangan internasionalnya dari dollar AS mejadi euro.¹⁶⁵

Faktor utama yang menjadi landasan hubungan spesial tersebut adalah niat untuk menyediakan suplai barang yang paling dibutuhkan oleh rezim junta militer, yaitu senjata. Peran Singapura sebagai *supplier* utama persenjataan bagi Myanmar diawali pada oktober 1988. Sejak saat itu, Singapura terus menyediakan persenjataan bagi Myanmar dan Singapura juga memfasilitasi penjualan dari negara lain, termasuk Belgia dan Israel. Angkatan bersenjata Singapura juga menjalin hubungan baik dengan militer Myanmar dengan memberikan pelatihan, dan Singapura membangun "Cyber-War Center" di Myanmar yang merupakan

¹⁶⁴ Neil Lawrence, "Untroubled by the Burma's Political Problems, Singaporeans are also Growing Increasingly Indifferent to the Country's Investment Opportunities," *Singapore Shrug*, Vol. 10 No. 6, July-August 2002, diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁶⁵ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 35, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006. Pada 29 Juli 2003, AS menetapkan beberapa sanksi baru bagi Myanmar, salah satunya adalah melarang Myanmar menggunakan mata uang dollar AS sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasionalnya.

implementasi dari Myanmar-Singapore JMWC (Joint Ministerial Working Committee) tahun 1993.

Tidak hanya itu, perdagangan senjata tersebut juga merintis jalan untuk investasi di berbagai area dalam perekonomian Myanmar, yang sebagian besar adalah industri perhotelan.¹⁶⁶ Salah satu hotel bertaraf internasional yang dimiliki Myanmar, Summit Parkview Hotel yang terletak di Yangoon dan dibangun untuk mengantisipasi meningkatnya pariwisata di Myanmar, adalah hasil barter antara pemerintah junta militer dengan salah satu perusahaan senjata Singapura. Hal tersebut merupakan keringanan yang diberikan oleh Singapura ketika Myanmar tidak mampu untuk membayar pengiriman senjata yang sudah disepakati. Berkaitan dengan investasi Singapura disektor pariwisata, pada September 2003, Myanmar mendapatkan ijin dari Singapura untuk mengadakan *travel show* di Singapura dengan tujuan untuk mendongkrak kegiatan pariwisata di Myanmar yang telah cukup lama membeku.¹⁶⁷

Singapura masih menduduki posisi atas di antara negara-negara asing lainnya sebagai investor utama Myanmar. Terhitung sejak Myanmar membuka perekonomiannya ditahun 1989, nilai investasi Singapura dalam beberapa proyek kesepakatan tercatat sebesar US\$1.5 milyar.¹⁶⁸ Sedangkan dalam perdagangan

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ "Myanmar to Hold Travel Show in Singapore," *Xinhua News Agency*, 3 Juli, 2003, dalam *Report Card: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 29.

¹⁶⁸ Neil Lawrence, *Loc. Cit.*

luar negeri selama tahun 2003, nilai impor Myanmar menunjukkan angka US\$ 612 juta, dan nilai ekspornya mencapai US\$ 108 juta.¹⁶⁹

Selain krisis ekonomi Asia Tenggara 1997, faktor lain yang menyebabkan menurunnya kerjasama Myanmar-Singapura adalah komitmen Singapura untuk memerangi narkotika. Kenyataan bahwa Singapura, dalam ketidaktahuannya, ternyata telah melakukan bisnis dengan raja obat bius Myanmar, Lo Hsing Han, memberi tamparan hebat bagi Singapura. Awal pengungkapan kerjasama “memalukan” tersebut terjadi pada Oktober 1996, ketika salah satu media massa Singapura, *Singapore Sling*, membuka fakta bahwa Government Investment Corporation (GIC) Singapura, melakukan investasi bersama dengan Lo Hsing Han dalam proyek hotel Traders dan Shangri-La. Melalui investasi tersebut, GIC secara otomatis menjadi rekan dari Asia World yang merupakan konglomerat terbesar di Myanmar yang didirikan oleh Lo Hsing Han tahun 1992. Fakta lain yang mengejutkan adalah bahwa berdasarkan laporan Robert Gilbert, seorang pejabat departemen anti-narkotika AS, sejak tahun 1988 lebih dari setengah nilai investasi Singapura terkait dengan keluarga pengedar narkotika Lo Hsing Han.¹⁷⁰ Kejadian tersebut, disusul dengan krisis ekonomi Asia Tenggara tahun 1997, menjadi alasan yang masuk akal atas merenggangnya hubungan Myanmar-Singapura.

¹⁶⁹ “Myanmar Exports Increase Slightly, Imports Fall Sharply in 2003,” *Xinhua*, 23 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 43, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁷⁰ Neil Lawrence, *Loc. Cit.*

C. Malaysia

Myanmar tidak akan melewatkan kesempatan untuk membina hubungan kerjasama dengan salah satu negara anggota ASEAN yang memiliki perekonomian kuat, yaitu Malaysia. Meski peran Malaysia sebagai “rekan” Myanmar tidak sebesar peran yang ditunjukkan oleh Thailand dan Singapura, Malaysia cukup banyak memberikan dukungan kepada Myanmar berkaitan dengan tekanan-tekanan internasional yang dijatuhkan kepada Myanmar. Malaysia dengan tegas menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara-negara besar hanya dimaksudkan untuk menekan negara kecil, seperti Myanmar, hingga akhirnya mereka terdesak dan memenuhi tuntutan negara-negara besar tersebut. Menurut Malaysia, sanksi-sanksi tersebut tidak efektif dan tidak membawa pengaruh bagi perubahan kondisi dalam negeri Myanmar.¹⁷¹ Berdasarkan pertimbangan tersebut, Malaysia memilih untuk melakukan beberapa kerjasama dengan Myanmar dengan alasan bahwa pendekatan yang lebih konstruktif dapat lebih membawa pengaruh bagi reformasi di Myanmar.

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar dan Malaysia salah satunya adalah kerjasama di bidang *human development*. Malaysia mengadakan pelatihan selama dua minggu bagi 17 anggota SPDC, diplomat dan administrator pada bulan Februari 2003. Program pelatihan tersebut dilaksanakan dengan disponsori oleh pemerintah Malaysia dan Jepang sebagai bagian dari suatu upaya untuk mendorong relasi yang positif di antara pejabat-pejabat ASEAN.¹⁷²

¹⁷¹ “Difference Concepts of Democracy,” diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁷² “Myanmar Can Learn from Malaysia, Says Ambassador,” *New Strait Times*, 18 Februari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 34.

Myanmar juga menawarkan kerjasama di sektor minyak kepada Malaysia. Pada bulan September 2003, diberitakan bahwa perusahaan minyak Malaysia, Petronas, telah mengambil alih sebagian besar saham perusahaan minyak Inggris, Premier, dalam proyek gas Yetagun. Dengan demikian, saham yang dimiliki oleh Petronas meningkat dari 30% menjadi 40,9%.¹⁷³ Mundurnya Premier dari proyek gas Yetagun, seperti yang ditulis oleh harian London, *The Guardian*, disebabkan karena adanya tuntutan dari *The UK Burma Campaign* untuk tidak memberikan dana bagi proyek gas tersebut. Selain Malaysia, perusahaan minyak yang menanamkan sahamnya dalam proyek gas Yetagun adalah perusahaan minyak dari Jepang (*Nippon Oil*), Thailand (*PTT Exploration and Production Plc.*) dan Belanda (*IHC Caland*).

Kerjasama ekonomi antara Myanmar dan Malaysia ditegaskan kembali melalui sebuah *Joint Commission* yang dicetuskan pada bulan Februari 2004. *Joint Commission* yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar, tersebut dibentuk untuk mendorong dan memperkuat hubungan antara Malaysia dan Myanmar. Komisi tersebut merupakan suatu mekanisme untuk membentuk jaringan bisnis yang lebih jauh antara kedua negara.¹⁷⁴ Menurut Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi, komisi tersebut bertindak sebagai katalis untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan Myanmar, namun tanggung jawab atas kesuksesannya terletak pada masyarakat bisnis Malaysia.

¹⁷³ "Malaysia's Petronas Completes Swap exercise with Premier Oil," *AFX-Asia*, 12 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 49, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁷⁴ "Malaysia, Burma to Set Up Joint Commission to Strengthen Ties," *BBC Monitor*, 14 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 55, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

D. Vietnam, Laos, Kamboja

Myanmar berusaha untuk tetap menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan negara-negara Indo-China, terutama dengan Vietnam. Dalam sebuah kesempatan, Presiden Vietnam, Tran Duc Luong, menekankan ‘*close relationship*’ antara Vietnam dan Myanmar dan mengungkapkan keinginannya untuk tetap bekerja sama dengan Myanmar baik secara bilateral maupun dalam konteks ASEAN.¹⁷⁵ Vietnam sendiri tidak menunjukkan sikap apapun terhadap situasi politik di Myanmar dan tetap membangun kesepakatan-kesepakatan ekonomi dengan Myanmar melalui pameran perdagangan, ekspor dan *intercontinental roadways*.¹⁷⁶

Hubungan ini kemudian diperkuat dengan kunjungan Jenderal Than Shwe atas undangan Presiden Luong pada 15-17 Maret 2003. Kunjungan Than Shwe tersebut bertujuan untuk mendorong hubungan bilateral di antara kedua negara. Dari kunjungan tersebut terbentuk kesepakatan-kesepakatan untuk mendongkrak kerjasama, khususnya pada sektor ekonomi, perdagangan, agrikultur, perhutanan, kesehatan dan pendidikan.¹⁷⁷ Hubungan ekonomi dengan Vietnam terus berlanjut dengan diadakannya pameran perdagangan Vietnam di Yangon pada Oktober 2003 yang berlangsung selama 4 hari. Pameran tersebut merupakan sebuah *event* yang diorganisasikan oleh Vietnam Trade Promotion

¹⁷⁵ “Vietnamese Leader Welcomes ‘Fruitful’ Visit, Bids Burmese Leader Farewell,” *Voice of Vietnam*, 17 Maret, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 33.

¹⁷⁶ *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 62, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁷⁷ “Myanmar Junta Head to Visit Vietnam,” *Agence France-Presse*, 11 Maret, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal.33.

Agency dan juga merupakan pameran perdagangan Vietnam yang pertama di Yangoon.¹⁷⁸

Selain Vietnam, Myanmar juga menjalin kerjasama dengan Laos dan Kamboja. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Myanmar terlibat dalam sebuah kerjasama dengan Laos, Kamboja serta Thailand dalam upaya membangun landasan kerjasama quadrilateral di sektor transportasi, pariwisata dan *human development*.¹⁷⁹ Selain itu, Myanmar ikut pula berpartisipasi dalam sebuah workshop yang diadakan di Laos pada 18-19 Februari 2004 untuk mendiskusikan kemungkinan untuk mengembangkan kesempatan ekonomi melalui East-West Economic Corridor.¹⁸⁰

III. 2. China

Dalam mencari dukungan ke luar, Myanmar tidak melupakan tetangga terbesarnya di barat daya. Cina merupakan salah satu negara sasaran bagi Myanmar dalam mencari dukungan, terutama setelah terjadi gelombang protes menuntut demokrasi tahun 1988. Myanmar berusaha menggandeng China dengan mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah China, yaitu dengan mendukung tindakan pemerintah China dalam tragedi Tiannanmen tahun 1989 serta dengan mendukung kebijakan 'one China policy' yang sekaligus tanda dari keinginan Myanmar untuk terus membangun hubungan saudara dengan

¹⁷⁸ "Vietnam to Stage Trade Fair in Myanmar," *Xinhua*, 30 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 48, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁷⁹ "Regional Development Talks Begin Here Today," *Loc. Cit.*

¹⁸⁰ "Mekong's Road Project to Provide Regional Economic Opportunities," *Xinhua*, 16 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 44, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

China. Dukungan terhadap konsep *one China policy* tersebut disampaikan oleh Than Shwe dalam kunjungannya selama lima hari pada bulan Februari 2004 lalu.¹⁸¹ Setelah tragedi Tiannanmen, Myanmar dan China mulai melakukan beberapa kerja sama dan perdagangan antara Myanmar-China mengalami peningkatan. Ketika Myanmar meminta bantuan, China mengulurkan bantuannya untuk mendukung pemerintah militer, meskipun China merasa terganggu dengan kebiasaan korupsi yang dilakukan oleh junta militer, dan China tetap mempertahankan hubungannya dengan Myanmar berdasarkan beberapa pertimbangan ekonomi dan strategis. Bagi Myanmar, China tetap menjadi "*big brother*" sedangkan bagi China, Myanmar merupakan sekutu politik juga sasaran potensial untuk meningkatkan *military power* di wilayah Asia Tenggara.¹⁸²

Dalam sebuah kunjungan pejabat pertahanan Myanmar ke China tahun 1989, akhirnya terbentuk kesepakatan senjata (*arms deal*) yang ditandatangani tahun 1990 dengan nilai sebesar US\$ 1.4 milyar, dan US\$ 400 juta di tahun 1994.¹⁸³ Sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut, tahun 1990, China mengirimkan senjata dan amunisi ke Myanmar. Tahun 1994, China mengirimkan 11 pesawat jet tempur serta perlengkapan militer lainnya, termasuk kapal patroli angkatan laut.¹⁸⁴ Suplai material disertai dengan pelatihan dari China, membantu Tatmadaw mengatasi permasalahan domestik Myanmar. Penjualan senjata China ke

¹⁸¹ "Myanmar Top Leader Reiterates Adherence to 'One China' Policy," *Xinhua*, 23 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 44, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁸² The International Institute for Strategic Studies, "China and India Jockey for Influence in Burma," *The Strait Times*, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

¹⁸³ "Sowing Disorder," *21 Februari 2003*, diakses dari www.hrichina.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁸⁴ "What Role does Burma Really Play in Beijing," diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 Februari 2006.

Myanmar di awal tahun 1990 tersebut memegang peran krusial dalam menjaga junta militer berkuasa.¹⁸⁵ Akhir tahun 1991, China memberikan bantuan di sektor infrastruktur, dan tahun itu juga, penasihat militer China datang untuk menetap di Myanmar guna memberi asistensi. Dengan demikian, Myanmar secara *de facto* telah menjadi “*client state*” China.¹⁸⁶ Perlengkapan militer yang dikirim oleh China meliputi:¹⁸⁷

- ▶ *100 medium battle tanks type 6911 dan 100 light tanks Type 63*
- ▶ *250 armoured personnel carriers Type 85, multiple-launch rockets systems, howitzers, anti-aircraft gun, HN-5 surface to air missiles, mortars, assault rifles, recoilless guns, rocket-propelled grenade launchers & heavy trucks.*
- ▶ *Chengdu F-7M Airguard jet fighters, FT-7 jet trainers, A-5M ground-attack aircraft & SAC Y-8D transport aircraft.*
- ▶ *Hainan-class patrol boats, Houxin-class guided-missiles fast-attack craft, minesweeper and small gun boat.*

Pada tanggal 10 Januari 2003 China kembali mengirimkan 3 truk berisi persenjataan angkatan udara buatan China ke pangkalan udara Shante. Akhir Januari, Myanmar menerima lagi kiriman persenjataan berupa misil dan peluncur

¹⁸⁵ “Sowing Disorder,” *Loc. Cit.*

¹⁸⁶ *The International Institute for Strategic Studies, Loc. Cit.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

misil yang kemudian didistribusikan di bawah komando Heavy Artillery Base 505 dan 303 di Khamauk Kyi, divisi Tenasserim.¹⁸⁸

Tahun 1997, Myanmar dan China menandatangani kesepakatan untuk memperkuat kerjasama militer.¹⁸⁹ Dalam kesepakatan tersebut, China memberikan pelatihan bagi Angkatan Udara dan Angkatan Laut Myanmar. Selain itu, China juga menawarkan tempat di akademi-akademi militer China bagi petinggi senior Myanmar. Meski hubungan Myanmar-China sebagian besar berada di jalur militer, namun Myanmar dan China juga tidak mengesampingkan sektor infrastruktur, industri dan pariwisata. Agustus 1998, China menyepakati proyek senilai US\$ 250 juta untuk pembangunan Banlang Hidropower Station. Kesepakatan tersebut merupakan proyek perdagangan terbesar antara China dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.¹⁹⁰ Sebagai imbalannya, Myanmar mengizinkan China untuk membangun kepentingan strategisnya di Myanmar yang memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, salah satunya dengan membuka rute perdagangan bagi China menuju ke Asia Tenggara dan Samudera Hindia.¹⁹¹

Desakan China untuk membuka jalur tersebut bertujuan agar propinsinya yang terletak di bagian timur laut China, yaitu Yunan dan Sichuan mendapatkan akses untuk melepas barang-barang yang diproduksi di daerah tersebut. Yunan dan Sichuan merupakan propinsi yang posisinya terkurung di

¹⁸⁸ "New Weapons Arriving from China," "Chinese Weapons Sent to Southern Burma," *Democratic Voice of Burma*, 5 Februari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 10-11.

¹⁸⁹ "Beijing's New Flexibility," diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁹⁰ *Report Card: The Burma Junta Grits Its Teeth* (Bangkok: Altsean, 1999), 1 Juli-31 Desember 1998, hal. 6.

¹⁹¹ Nicole Veash, "The Junta's Heavy Reliance on Beijing Could Backfire as Favors are Called In," *The Observer*, dalam "Burma is an Easy Prey for China," *The Nation*, 7 September, 2001, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

tengah propinsi-propinsi lain yang mengelilinginya. Bagi China, Yunan dan Sichuan merupakan kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan karena propinsi tersebut memproduksi barang-barang murah dan merupakan barang konsumsi utama di Myanmar. Namun kemudian, China menginginkan jaringan ke pasar internasional lainnya yang lebih luas, dan salah satu cara yang paling jelas adalah dengan memiliki akses ke Samudera Hindia.¹⁹² Selama beberapa tahun sebelumnya, insinyur dan teknisi China telah ditempatkan di timur laut Myanmar untuk membantu mengembangkan jalan raya dari timur ke barat dan dari utara ke selatan di sepanjang perbatasan Myanmar-China untuk membuka rute perdagangan baru tersebut dan juga *outlet* strategis di bagian selatan menuju Samudera Hindia. Akses perdagangan tersebut selain dapat membuka *inland provision* seperti Yunan dan Sichuan, juga memberikan koridor militer ke perairan melalui Myanmar.¹⁹³

Kunjungan Presiden Jiang Zemin pada bulan Desember 2001, yang juga merupakan satu-satunya presiden China yang pernah menginjakkan kakinya di Myanmar, membuka babak baru sekaligus memberikan sinyal yang jelas akan kemitraan strategis yang dibangun antara Beijing dan junta militer yang memerintah Myanmar.¹⁹⁴ Kunjungan Presiden Jiang tersebut mempererat hubungan Myanmar-China dan semakin memperjelas meningkatnya penetrasi bisnis China di Myanmar, dengan menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi

¹⁹² Nicole Veash, *Ibid.*

¹⁹³ Rodney Tasker & Bertil Lintner, "Danger: Road Works Ahead," *Far Eastern Economic Review*, 21 Desember, 2000, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

¹⁹⁴ "Jiang Visit Cements Myanmar-China Ties," *The Washington Times*, 11 Desember, 2001, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

dan teknis, di antaranya pada sektor energi, perikanan, peternakan dan pengeboran minyak di kawasan Pyay.¹⁹⁵

Myanmar terus memperkuat hubungan dengan China melalui pertukaran kunjungan tingkat tinggi. Tanggal 6-11 Januari 2003, Than Shwe melakukan kunjungan ke China dan pada minggu berikutnya giliran China, melalui Wakil perdana menterinya, melakukan kunjungan balasan. Selama kunjungannya, Than Shwe menyatakan perhatian besarnya untuk membangun hubungan baik dengan China dan menunjukkan dukungannya terhadap *one China policy*. Sedang Presiden Jiang menyampaikan bahwa China mendukung perusahaan-perusahaan China untuk berinvestasi di Myanmar dan menyarankan agar kedua negara memperluas kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, teknologi, kesehatan masyarakat dan olah raga. Dalam kunjungan tersebut, Myanmar dan China menandatangani tiga perjanjian bilateral yang difokuskan pada kerjasama ekonomi dan teknologi. Kunjungan tersebut juga berdampak pada naiknya dukungan finansial dari China untuk Myanmar.¹⁹⁶

Bulan Agustus 2003, sebuah perusahaan China, Yunnan Machinery and Equipment Import and Export Corporation, menyetujui pembangunan Shweli *hydroelectric dam* senilai US\$ 150 juta. Dam tersebut memiliki kapasitas sebesar 400 mega-watt dan dibangun di Namkhan, di wilayah Shan.¹⁹⁷ Pada 15 Agustus,

¹⁹⁵ "Myanmar-China Trade Rising," *Narinjara News*, 16 Januari, 2002, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁹⁶ "China Lends Myanmar 200 Million Dollars," *Agence Franc Presse*, 8 Januari, 2003; "China's Vice President Meets Visiting Burmese Leader, Vows to Enhance Ties," *Xinhua*, 8 Januari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 34.

¹⁹⁷ "Burma to Get Power Station," *Associated Press*, 11 Agustus, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

China memberikan pinjaman sebesar US\$ 200 juta untuk membeli peralatan proyek pembangunan pembangkit listrik hidro-elektrik Ye-Ywa di dekat Mandalay.¹⁹⁸ 17-22 Agustus 2003, Maung Aye, orang kedua dalam jajaran hirarki junta militer, memimpin 35 pejabat SPDC dalam sebuah misi tingkat tinggi ke China untuk memohon bantuan finansial guna mengatasi dampak sanksi ekonomi Amerika Serikat.¹⁹⁹

Kesepakatan berikutnya dibuat antara Myanmar dengan China pada bulan September 2003 melibatkan perusahaan China, XJ Group Corporation, dalam pembangunan *multi-purpose diesel engine plant* senilai US\$ 112 juta.²⁰⁰ Selain itu, China International and Investment Corp (CITIC), sebuah perusahaan milik pemerintah China, berencana untuk membeli tambang tembaga Myanmar dari perusahaan tambang Kanada.²⁰¹ Pada bulan yang sama, China mengirimkan delegasi ke Myanmar untuk mendiskusikan kerjasama di bidang agrikultur, perikanan dan bioteknologi.²⁰² Pada bulan September itu juga, perusahaan penerbangan Myanmar (Myanma Airways) meluncurkan penerbangan internasional Myanmar kedua, yaitu United Myanmar Airlines (UMA). UMA

¹⁹⁸ "China to Lend Myanmar \$200 Million for Hydel Project," *Associated Press*, 16 Agustus, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 52, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

¹⁹⁹ "Junta Seeks China's Help," *The Irrawaddy*, 18 Agustus, 2003, dalam *Report Card: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 32. Amerika Serikat memperpanjang sanksi-sanksinya pada 11 Juni 2003. Sanksi-sanksi tersebut berupa larangan import dari Myanmar, pembekuan aset-aset Myanmar dan memperluas larangan visa meliputi lebih banyak lagi pejabat tingkat tinggi SPDC dan USDA.

²⁰⁰ "China, Myanmar Sign Contract on Building Diesel Engine Plant," *Xinhua*, 19 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁰¹ "China Focus: China's CITIC Seeks to Extend Reach in Mining, Oil," *Xinhua Financial News*, 23 September 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September, 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁰² "Prospects Rosy for Agriculture," *China Daily*, 15 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

merupakan *joint venture* dengan Sunshine Strategic Investment Company yang berbasis di Hong Kong dengan investasi awal sebesar US\$ 15 juta. UMA melayani penerbangan ke Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Hong Kong dan Mandalay dan berencana untuk meningkatkan investasi menjadi sekitar US\$ 100 juta.²⁰³

Pada pertengahan 2004, Khint Nyunt mengunjungi China selama seminggu. Kunjungan tersebut menghasilkan 11 kesepakatan bilateral, di antaranya adalah komitmen kerjasama dalam memerangi perdagangan obat bius serta kejahatan lintas-batas. Isu yang paling mengemuka di tahun 2004 adalah kepentingan strategis China di Myanmar, baik ekonomi maupun militer.²⁰⁴ Kedua kepentingan tersebut telah terpenuhi dengan dibangunnya akses langsung bagi China menuju ke Samudera Hindia. Dibukanya akses ke Samudera Hindia tersebut memiliki arti penting bagi China baik secara ekonomi maupun militer. Dari aspek ekonomi, China memperoleh akses ke pasar internasional melalui jalur laut untuk memasarkan produk-produknya. Sedang dari aspek militer, akses ke Samudera Hindia berarti akses ke Teluk Benggala. Dengan menempatkan personel militernya di teluk tersebut, China dapat mengawasi pergerakan militer India yang merupakan rival utamanya di kawasan Asia. Kepentingan lain adalah sumber gas alam di Arakan yang ditemukan tahun 2002. Hak eksplorasi sumber gas di Arakan ini menjadi perebutan antara China dan India yang akhirnya berhasil didapatkan oleh China. Untuk mengalirkan gas tersebut, jalur pipa gas telah dibangun dari

²⁰³ "Myanmar-HK Joint Venture Airline Sets Up Head Office in Yangon," *Xinhua*, 10 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 51, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁰⁴ "What Role does Burma Really Play in Beijing," *Loc. Cit.*

Arakan ke China. Pipa gas tersebut menghubungkan Kun Ming (ibukota propinsi Yunan) dengan Sittwe di pantai Myanmar.²⁰⁵ Jalur tersebut mengurangi 1.200 km rute laut saat ini yang menghubungkan Teluk Persia dan propinsi Guang Dong, China melalui Selat Malaka, di mana lebih dari 60% minyak China melalui rute tersebut.

Di akhir tahun 2000, Myanmar dan China telah menandatangani sebanyak 759 kesepakatan dagang yang bernilai sekitar US\$ 1,786 milyar. Pada 10 bulan pertama tahun 2001, perdagangan antara Myanmar dan China meningkat 3.1% menjadi US\$ 499 juta. Sedang pada 10 bulan pertama tahun 2002, kesepakatan yang ditandatangani mencapai 87 proyek dengan total nilai sebesar US\$ 186 juta.²⁰⁶ Dan total nilai perdagangan antara China dan Myanmar dalam tahun 2002 sebesar US\$ 800 juta.²⁰⁷ Di tahun 2003, perdagangan bilateral antara China-Myanmar mencapai lebih dari US\$ 1 milyar. Angka tersebut termasuk *border trade*, di mana ekspor Burma tahun tersebut sebesar US\$ 170 juta sedangkan impor Myanmar dari China menunjukkan angka US\$ 900 juta. Selain *border trade*, China juga telah menginvestasikan lebih dari US\$ 64 juta di lebih dari sepuluh proyek dalam tahun dan hal tersebut menempatkan China di posisi ke-15 dalam jajaran investor asing terbesar yang menanamkan modalnya di Myanmar.²⁰⁸

²⁰⁵ *Ibid.*

²⁰⁶ "Myanmar-China Trade Rising," *Loc. Cit.*

²⁰⁷ "Myanmar Commerce Minister Urges Further Cooperation With China," *Xinhua*, 28 Agustus, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁰⁸ "Sino-Myanmar Bilateral Economic Trade Ties Get New Momentum," *Xinhua*, 22 Maret, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 44, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

III. 3. India

Myanmar dan India memiliki hubungan erat berdasarkan ikatan sejarah, kultural dan administratif. Myanmar dan India telah membina hubungan politik setelah Myanmar berhasil meraih kemerdekaan tahun 1948. Namun, peristiwa pembantaian massal 8 Agustus 1988, sebagai akibat dari protes demokrasi anti-pemerintah, menjadi titik balik di mana hubungan Myanmar-India merenggang. Saat itu, India merupakan satu-satunya negara tetangga yang mendukung kelompok pro-demokrasi.²⁰⁹ Strategi India terhadap Myanmar mulai mengalami perubahan di sekitar akhir tahun 1992 setelah Myanmar mengadakan kunjungan resmi ke India. Pada tahun tersebut, Myanmar menginginkan untuk memperbaiki kembali hubungan yang sudah terjalin lama dengan India. Menimbang keinginan tersebut, pada bulan Agustus 1992, menteri luar negeri Myanmar saat itu, U Aye, mengadakan kunjungan resmi untuk pertama kalinya ke India sejak 1988. Kunjungan Myanmar tersebut mendapat respon dari India dengan mendelegasikan Sekretaris Luar Negeri JN. Dixit untuk melakukan kunjungan balasan ke Myanmar pada Maret 1993. Tahun berikutnya, Wakil Menteri Luar Negeri U Nyunt Shwe mendatangi India untuk membicarakan peluang untuk memperkuat kerjasama bilateral.²¹⁰

Antara tahun 1992-1993, India menyadari bahwa dukungannya terhadap kelompok pro-demokrasi Myanmar malah membuat Myanmar semakin dekat dengan China. Dan pengaruh China di Myanmar yang cukup besar menyulitkan India sendiri karena akses ke Teluk Benggala dan Samudera Hindia,

²⁰⁹ Soe Myint, "India and Burma: Working on Their Relationship," diakses dari www.irrawaddy.org tanggal 22 Februari 2006.

²¹⁰ *Ibid.*

area di mana India membangun beberapa fasilitas militer, dapat membantu China memata-matai aktivitas militer India. Salah satunya adalah kehadiran angkatan laut China di Teluk Benggala yang memberi peluang bagi China untuk mengamati fasilitas percobaan misil India yang terdapat di pantai timur negara bagian Orissa.²¹¹ Meningkatnya pengaruh China di Myanmar juga menimbulkan kekhawatiran pemerintah India akan mengalirnya produk-produk murah China melalui Myanmar ke timur laut India sehingga dapat mengganggu kepentingan perdagangan nasional India.²¹²

Selain pertimbangan pengaruh China terhadap Myanmar tersebut, India juga memiliki beberapa pertimbangan lain dalam menormalisasi hubungannya kembali dengan Myanmar. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah kehadiran masyarakat India di Myanmar dan permasalahan insurgensi di timur laut India.²¹³ Diperkirakan bahwa jumlah warga India yang berada di Myanmar sekitar satu juta orang. Sebagian besar dari jumlah tersebut adalah pedagang/pengusaha. Pada tahun 1972, sekitar 200.000 warga India di Myanmar dipaksa untuk kembali ke negaranya dan seluruh bisnis mereka diambil alih oleh pemerintah Myanmar saat itu. Dengan membaiknya hubungan Myanmar-India, India berharap agar Myanmar memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi pengusaha India yang berada di Myanmar. Faktor kedua adalah insurgensi di bagian timur laut India. Kelompok-kelompok insurgensi India tersebut membangun basis mereka di wilayah Myanmar, di dekat perbatasan antara

²¹¹ Sudha Ramachandran, "India Plays It Both with Myanmar," *Asia Times*, 15 Mei, 2002, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

²¹² Soe Myint, *Loc. Cit.*

²¹³ *Ibid.*

Myanmar-India. India berharap banyak bahwa dengan membaiknya hubungan bilateral Myanmar-India, Myanmar dapat membantu India mengatasi masalah insurgensi tersebut.

Setelah mengadakan pertukaran kunjungan antara tahun 1992-1993, Myanmar dan India kemudian menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada tahun 1994 untuk meningkatkan kerjasama antara otoritas sipil di perbatasan kedua negara untuk mencegah “*illegal and insursurgent activities*”.²¹⁴ Beberapa perjanjian bilateral pun ditandatangani dengan tujuan untuk meregulasi dan mendorong *border trade* antara kedua negara yang secara resmi dibentuk pada 12 April 1995.²¹⁵ Sejak saat itu, Myanmar dan India membina hubungan mereka melalui kunjungan formal/informal serta pertukaran informasi penyelidikan antara petugas-petugas perbatasan. India juga terlibat dalam proyek pembangunan jalan raya nasional yang menghubungkan India melalui negara bagiannya di timur laut dengan jaringan jalan raya di Myanmar. Myanmar dan India mengadakan kerjasama pula di sektor pertambangan, untuk mengeksplorasi deposit nikel dan batubara di Myanmar.²¹⁶

Hubungan Myanmar dan India semakin mengalami peningkatan pada periode pasca 1998, ketika India mengarahkan kepentingan pertahanan dan keamanannya ke Myanmar.²¹⁷ Di tahun 1999, sekretaris luar negeri India mengadakan kunjungan ke Myanmar. Kunjungan tersebut menandai kesepakatan kedua negara untuk mempererat kerjasama dan hubungan antar kedua negara di

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.*

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ Sudha Ramachandran, *Loc. Cit.*

berbagai area, termasuk di sektor perdagangan dan keamanan di sepanjang perbatasan Myanmar-India.²¹⁸ Januari 2000, Myanmar-India melakukan pertukaran kunjungan. Setelah terjadi pembicaraan antara Maung Aye dan beberapa pejabat kementerian India, India mulai menyediakan perlengkapan militer bagi Myanmar, salah satunya adalah menyediakan seragam bagi angkatan bersenjata Myanmar yang berada di sepanjang perbatasan India-Myanmar.²¹⁹ India juga menyuplai peralatan militer ke Myanmar serta mengirimkan helikopter kepada angkatan bersenjata Myanmar.²²⁰

Kunjungan Maung Aye di awal tahun 2000 tersebut membuka kesempatan bagi keterlibatan India di dalam usaha junta militer untuk membangun infrastruktur di Myanmar. Myanmar meminta bantuan India dalam membangun pelabuhan laut serta dalam beberapa proyek lainnya. Myanmar juga meminta partisipasi India dalam proyek pembangunan pembangkit listrik Yewa di dekat Mandalay yang memiliki kapasitas sebesar 750 megawatts. Sebelumnya, India juga telah terlibat dalam proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) berkapasitas 110 megaWatt di daerah Sungai Chindwin.²²¹

Untuk mendorong perdagangan, Myanmar juga meminta bantuan dari India dalam membangun koridor transportasi sepanjang Sungai Kaladan yang menuju ke Teluk Benggala. Myanmar dan India juga telah menyelesaikan satu proyek pembangunan jaringan jalan raya di daerah perbatasan yang menghubungkan Myanmar-India. Dalam rangka meningkatkan perdagangan,

²¹⁸ Soe Myint, *Loc. Cit.*

²¹⁹ The International Institute for Strategic Studies, *Loc. Cit.*

²²⁰ Sudha Ramachandran, *Loc. Cit.*

²²¹ "Dinesh C. Sharma, "Rangoon Allays Fears of Chinese Domination," *Bangkok Post*, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

India juga turut memberikan bantuan kepada Myanmar dalam membangun koridor transportasi sepanjang Sungai Kaladan menuju ke Teluk Benggala. Jalan raya yang menghubungkan Tamu dan Kalewa dapat membuka jaringan dari perbatasan Myanmar-India menuju ke pusat Myanmar serta ke pusat perdagangan dan kebudayaan di Mandalay. Jalur tersebut dapat mendorong jasa perjalanan, pariwisata dan perdagangan. Myanmar dan India juga telah menyelesaikan satu proyek pembangunan jaringan jalan raya di daerah perbatasan yang menghubungkan Myanmar-India.²²²

Kerjasama di sektor infrastruktur masih terus berlanjut di tahun 2002. Pada tanggal 5-7 April 2002, Menteri Luar Negeri India mengunjungi Myanmar untuk membicarakan rencana pembangunan tiga jalan raya nasional yang menghubungkan India-Myanmar-Thailand. Pembangunan jalan raya lintas negara tersebut dapat memberikan koneksi yang lebih baik untuk perdagangan, pariwisata dan hubungan antar-individu. Selain sektor infrastruktur, Myanmar dan India juga membicarakan kerjasama dalam survey oseanografi serta kerjasama di area kesehatan dan pendidikan.²²³

19 Januari 2003, Menteri Luar Negeri Win Aung mengunjungi India untuk mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vajpayee. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi pertama bagi menteri luar negeri Myanmar semenjak tahun 1988. Dalam Kunjungan tersebut, Win Aung meminta India untuk meningkatkan investasinya di Myanmar, serta menyatakan bahwa Myanmar membantu India dalam mengatasi kelompok insurgen anti-India agar tidak

²²² *Ibid.*

²²³ "India Minister to Visit Myanmar for Three Nation Highway Project," *Narinjara News*, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

beroperasi dan membangun basis di Myanmar. Kunjungan tersebut menghasilkan perjanjian protokol yang terangkum dalam *'bilateral consultation'*, sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan proyek-proyek kerjasama dan kesepakatan dari India untuk menyediakan kredit bagi junta militer sebesar US\$ 25 juta.²²⁴

Peristiwa Black Friday di pertengahan tahun 2003 tidak memberikan pengaruh negatif dalam hubungan Myanmar-India. Sejak peristiwa tersebut, hubungan Myanmar-India malah menunjukkan kedekatan. Menteri Luar Negeri Win Aung mengunjungi India tanggal 8 Juli 2003 dan pada 3 September, Kepala Angkatan Laut India berkunjung ke Myanmar untuk membicarakan peningkatan kerjasama angkatan laut.²²⁵ 14 Juli 2003, Menteri Perdagangan dan Industri India, Arun Jaitley, tiba di Myanmar untuk menandatangani MoU untuk membentuk *joint trade committee*. Selama kunjungannya tersebut, bersama beberapa petinggi junta militer, Jaitley mendiskusikan rencana untuk mendorong *border trade*, jasa perbankan, impor dan ekspor barang-barang, kerjasama sektor agrikultur dan pertukaran delegasi perdagangan.²²⁶ Dalam kunjungan itu pula, kedua negara sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan ke angka US\$ 1 milyar pada tahun 2006. Sebagian besar dari peningkatan tersebut difokuskan pada sektor

²²⁴ "India Official: Myanmar Says It Won't Support Anti-India Insurgent Group," *Associated Press*, 21 Januari, 2003; "Myanmar-India Relations Get Closer," *Xinhua*, 28 Januari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 January-31 March 2003, hal. 37.

²²⁵ "Myanmarese Foreign Minister Meets Vajpayee," *The Hindu*, 11 Juli, 2003; "Indian Naval Chief Visits Myanmar," *Xinhua*, 5 September, 2003, dalam *Report Card: Arrested* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 32.

²²⁶ "Myanmar, India Sign MOU on Setting Up Joint Trade Committee," *Xinhua*, 15 Juli, 2003; "Myanmar, India Hold Joint Trade Committee Meeting," *Xinhua*, 16 Juli, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

minyak dan gas serta komunikasi dan teknologi.²²⁷ India juga menyatakan ketertarikannya untuk memperbesar investasi dalam proyek-proyek Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Dan pada bulan 26 Agustus 2003, Myanmar-India menandatangani MoU dalam kerjasama di sektor teknologi informasi dan komunikasi.²²⁸

Hubungan Myanmar-India di bidang pertahanan diperkuat melalui kepala angkatan udara Myanmar, Mayjen Myat Hein, yang mengunjungi India pada tanggal 2 September 2003. Junta militer, melalui Myat Hein, berupaya untuk mendapatkan bantuan dari India untuk mengembangkan angkatan udaranya serta membangun Aviation University di Myanmar dan juga meminta pelatihan dan *servicing facilities* bagi beberapa buah pesawat tempur MiG-29 buatan Rusia yang dimilikinya. India menyetujui untuk menambah jumlah kadet angkatan laut Myanmar di institusi pelatihan India.²²⁹

Di tahun 2004, hubungan Myanmar-India semakin dekat dan mantap. Pemerintah India berniat untuk memberikan perluasan kredit sebesar US\$ 7 juta kepada Myanmar. Dalam tahun 2004 itu pula, Than Shwe mengunjungi India bersama beberapa menteri senior junta militer. Pada kesempatan tersebut, Than Shwe mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala perusahaan India dan

²²⁷ "Myanmar-Indian Trade to Double by 2006: Minister," *Xinhua*, 21 Juli, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, p. 47-48, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²²⁸ "ONGC of India Spies Opening in Myanmar," *World Markets Analysis*, 21 Juli, 2003; "Myanmar, India Sign MoU on ICT Cooperation," *Xinhua*, 27 Agustus, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 47-48, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²²⁹ "Myanmar Seeks Indian Help to Build Up Its Air Force," *Islamic Republic News Agency*, 2 September, 2003; "Speaking Freely: India Courts a Junta," *Asia Times*, 20 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 64, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

meminta mereka untuk melakukan investasi di Myanmar. Dan pada bulan Februari 2004, India mengadakan pameran perdagangan di Rangoon.

Sumber energi melimpah yang dimiliki Myanmar menjadi faktor persuasif yang menentukan hubungan Myanmar dengan negara lain. Pada 29 Januari 2004, menteri energi Myanmar, Lun Thi, bertemu dengan menteri perminyakan India untuk mendiskusikan kemungkinan ekspor gas ke India melalui *transnational gas pipeline*. Dua hari kemudian, Lun Thi menawarkan kontrak sebesar US\$ 116 juta kepada perusahaan minyak India, untuk eksplorasi area gas A-3 Myanmar dan pembelian mesin diesel baru.²³⁰ Tanggal 8 Februari, pejabat India juga menawarkan dana untuk melakukan *feasibility study* dalam membangun pelabuhan air Dawei.²³¹

Dalam sebuah tawaran lain untuk membina akses ke pasar Asia Tenggara, India membuka titik perdagangan baru di Rih, negara bagian Mizoram. Dengan dibukanya titik perdagangan baru tersebut, kawasan di sekitarnya dapat menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Indo-Myanmar Traders Union mengatakan bahwa titik perdagangan Rih dapat menandai awal baru bagi perdagangan di timur laut India. Pemerintah India menghabiskan dana sebesar US\$ 440 ribu dalam pembangunan infrastruktur di Rih, sebagian besar digunakan untuk pengembangan jalan. Indo-Myanmar Traders Union juga mengatakan bahwa para pengusaha di kawasan tersebut menginginkan agar terdapat titik perdagangan baru di Longwa dan Pangsay, sehingga mereka juga mendapatkan

²³⁰ "Myanmar in Talks for Gas Pipeline," *Business Standard*, 29 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 52-53, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²³¹ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 52-53.

keuntungan dari hubungan ekonomi antara India dan Myanmar.²³² Untuk melancarkan perdagangan, di akhir tahun 2004, menteri perdagangan India melonggarkan kebijakan mengenai mata uang yang digunakan dalam perdagangan, dan akhirnya kemudian mengizinkan seluruh pengusaha India untuk menerima mata uang apa saja selama melakukan ekspor-impor dengan Myanmar.²³³

Di area militer, kerjasama India-Myanmar tahun 2004 dimulai pada bulan Januari, di mana tentara India memberikan pelatihan kepada pejabat-pejabat junta militer, dengan harapan agar mereka dapat mengambil langkah militer bersama dalam menghadapi kekuatan anti-India di sepanjang perbatasan.²³⁴ Tindakan tersebut dilanjutkan dengan serangan militer untuk mengatasi kelompok insurgen anti-India pada pertengahan bulan Februari 2004.²³⁵ Tanggal 5 Februari 2004, pada sebuah pameran senjata di New Delhi yang berlangsung selama empat hari, delegasi militer tingkat tinggi Myanmar meminta *defense hardware* dari India. Pejabat dari kedua negara tersebut membicarakan kembali kemungkinan pengadaan dan bantuan militer tersebut.²³⁶

Selain itu, Myanmar-India juga menandatangani perjanjian dalam menghadapi perdagangan obat bius pada 1 Maret 2004. India juga bersedia

²³² "New Trading Point Opened on India-Burma Border," *Mizzima*, 5 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 40, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²³³ Surajit Khaund, *Loc. Cit.*

²³⁴ "Screws Tighten on Indian Rebels," *BBC*, 2 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 52, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²³⁵ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 21.

²³⁶ "Myanmar Seeks Military Hardware from India," *Agence France Presse*, 5 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 53, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

memberikan perlengkapan baru bagi Myanmar untuk melakukan tindakan dalam melawan ancaman peredaran obat bius. Myanmar juga menyetujui permintaan India untuk membantu mengatasi permasalahan insurgensi.²³⁷ Sebagai bagian dari kerjasama tersebut, India juga memberikan beberapa perlengkapan khusus bagi junta militer untuk mengatasi permasalahan di dalam Myanmar. Pemerintah India dan junta militer sepakat untuk mengatasi permasalahan tersebut bersama dan mengadakan pertemuan rutin untuk membicarakan strategi untuk mengurangi persoalan tersebut.²³⁸

Kerjasama antara Myanmar dan India memberi keuntungan yang cukup besar bagi Myanmar. India merupakan sasaran ekspor terbesar bagi Myanmar. Total ekspor Myanmar ke India di tahun 2000 mencapai 25% dari keseluruhan eksportnya. Setelah hubungan bilateral Myanmar-India membaik, perdagangan bilateral antara kedua negara mengalami peningkatan yang signifikan. Di tahun 1980-1981, perdagangan bilateral Myanmar-India sebesar US\$ 13 juta, dan pada tahun 1999-2000 meningkat menjadi US\$ 196.6 juta. Nilai ekspor Myanmar ke India mencapai US\$128 juta, sedang nilai impor Myanmar dari India tercaiat sebesar US\$ 69 juta.²³⁹

²³⁷ Surajit Khaund, *Loc. Cit.*

²³⁸ "India Assists Burma to Fight Drugs Smuggling," *Mizzima*, 1 Maret, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 52, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²³⁹ Dinesh C. Sharma, *Loc. Cit.*

III. 4. Bangladesh

Pada tanggal 1 Juni 1989, Myanmar dan Bangladesh menandatangani tiga buah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang mencakup *border trade*, kerjasama ekonomi dalam bentuk *joint venture* serta kerjasama ekonomi di sektor swasta. Sebagai kelanjutan dari MoU tersebut, *border trade protocol* ditandatangani pada 18 Mei 1995. Secara resmi, *border trade* antara Myanmar dan Bangladesh baru dilaksanakan pada 5 September 1995. Untuk saat itu, kerjasama hanya difokuskan pada *border trade*. Elemen-elemen penting lainnya, seperti infrastruktur dan *administrative machinery*, segera menyusul untuk memperlancar *border trade* melalui jalur Teknaf dan Maungdaw.²⁴⁰

Tahun 1995 dan 1996, Myanmar memberi kesempatan kepada Bangladesh untuk mengadakan *single country exhibition* di Rangoon agar lebih mengenal produk-produk Bangladesh. Myanmar dan Bangladesh juga membentuk zone ekonomi spesial di Teknaf yang dapat memberikan kesempatan untuk melakukan *joint venture* di sektor manufaktur dengan bahan baku dari Myanmar.²⁴¹ Setelah itu, perdagangan antara Myanmar-Bangladesh mengalami peningkatan pesat. Tercatat di tahun 1990/1991, ekspor Myanmar ke Bangladesh sebesar US\$ 10.5 juta, dan impornya sebesar US\$ 6.6 juta. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 1997/1998 dengan nilai ekspor Myanmar ke Bangladesh mencapai US\$ 70.4 juta dan dan impornya mencapai angka US\$ 4.4 juta.²⁴²

²⁴⁰ Syed Mahmudul Huq, "Prospect of Economic Cooperation Between Bangladesh and Burma," *The Independent Bangladesh*, diakses dari www.rebound88.net tanggal 22 Februari 2006.

²⁴¹ *Ibid.*

²⁴² *Ibid.*

Myanmar dan Bangladesh pada 11 Maret 2002 membuat kesepakatan dalam pembangunan Trans-Asian Highway di Chittagong yang menghubungkan Myanmar dan Bangladesh. Diharapkan dengan dibangunnya jalur langsung menuju Myanmar dan Bangladesh dapat membuka kesempatan baru dalam perdagangan antara Myanmar-Bangladesh.²⁴³ Akhir Maret 2002, Myanmar dan Bangladesh sepakat membentuk sebuah *joint economic council* untuk menghapus hambatan-hambatan dalam perdagangan antara kedua negara.²⁴⁴

Hubungan antara Myanmar dan Bangladesh semakin kuat dalam berbagai bidang, seperti hubungan diplomatik, perdagangan dan pertahanan. Pertukaran delegasi tingkat tinggi antara Myanmar dan Bangladesh di awal tahun 2003, menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu *joint trade commission* serta beberapa kesepakatan baru dalam perdagangan bilateral dan *coastal shipping*.²⁴⁵ Pasca peristiwa Black Friday 30 Mei 2003, hubungan antara Myanmar dan Bangladesh tidak mengalami kemunduran, tetapi menunjukkan hubungan yang semakin membaik. Menteri Luar Negeri Win Aung berkunjung ke Dhaka pada 5 Juli 2003 dan pada Agustus 2003, kedua negara mengadakan kesepakatan untuk membentuk '*special accounts trading-system*' untuk mengatasi hambatan-hambatan perdagangan sebagai akibat dari sanksi yang baru dijatuhkan oleh Amerika Serikat.²⁴⁶ Pada bulan September 2003, menteri luar negeri

²⁴³ "Bangladesh to Work on Trans-Asian Highway to Connect Burma," *Narinjara News*, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁴⁴ M. Shamsur Rahman, "Dhaka, Yangon to Form Joint Body to Remove Trade Barriers," *Narinjara News*, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁴⁵ "Bangladesh PM Back from Burma," *Kaladan*, 22 Maret, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altscan, 2003), 1 January-31 March 2003, hal. 36.

²⁴⁶ "Dhaka Sends 44-Product List to Rangoon," *Narinjara News*, 1 Agustus, 2003.; "Myanmar Seeks Bangladesh's Help in Ending Isolation of Suu Kyi," *Deutsche Presse Agentur*, 7 Juli, 2003, dalam *Report Card: Arrested* (Bangkok: Altscan, 2003), 1 April-30 Juni 2003, hal. 31.

Bangladesh mengumumkan dimulainya pembangunan proyek jaringan jalan raya yang menghubungkan Teknaf dan Sittwe. Pembangunan jalan raya tersebut dijadwalkan selesai pada tahun 2004.²⁴⁷

Pada 19 September 2003 delegasi militer Myanmar tiba di Bangladesh. Tujuan kedatangannya adalah untuk mendiskusikan penyelidikan militer untuk mengontrol pembajakan laut, penyelundupan senjata dan serangan dari tentara oposisi. Bangladesh juga menyatakan rencananya untuk membeli perlengkapan militer dari Myanmar dalam jumlah besar, termasuk di antaranya adalah *machine guns, assault and automatic rifles*, ranjau darat dan peluncur roket.²⁴⁸

Di tahun 2004, hubungan Myanmar-Bangladesh menjadi semakin dekat seiring dengan negosiasi dalam Bangladesh-Burma Friendship Road. Pemerintah Bangladesh menyatakan perhatiannya yang besar pada pembangunan jalan tersebut sebagai sarana untuk membangun jalur langsung ke Asia Tenggara.²⁴⁹

III. 5. Rusia

Myanmar memandang bahwa Rusia dapat menjadi sekutu yang potensial untuk memberikannya dukungannya mengingat bahwa Rusia merupakan salah satu kutub kekuatan terbesar di dunia. Dengan demikian, Myanmar berharap

²⁴⁷ "Work on Bangladesh-Myanmar Road Link to Start This Year: FM," *Agence France Presse*, 17 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 46, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁴⁸ "Burmese Military Delegation Visit a Hilly Town in Bangladesh," *Narinjara*, 24 September, 2003; "Bangladesh, Myanmar to Discuss Military Cooperation," *Xinhua*, 21 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 32, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁴⁹ "Joint Survey on Burma-Bangladesh Friendship Road Soon," *Narinjara*, 5 Februari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 54, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

bahwa Rusia dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat internasional dalam mengambil tindakan terhadap situasi di Myanmar. Selain China, Myanmar juga menjadikan Rusia sebagai penyuplai perlengkapan militer bagi Myanmar. Di samping itu, Rusia dapat memberi Myanmar bantuan di bidang teknologi, terutama teknologi nuklir.

Secara resmi, Rusia menyatakan dukungannya kepada Myanmar pada bulan Februari 2003 dengan mengajak masyarakat internasional untuk memperbesar bantuan ke Myanmar dan mengakui pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh junta militer.²⁵⁰ Rusia juga menyatakan bahwa kebijakan untuk menekan dan ikut campur dalam dalam urusan domestik suatu negara merupakan suatu kebijakan yang *counter-produktif* dan tidak adil.

Untuk menunjukkan dukungannya tersebut, Rusia melakukan beberapa kerjasama dengan Myanmar. Di awal bulan Desember 2002, Rusia mengirimkan pesanan Myanmar berupa empat jet tempur MiG-29. Empat jet tempur tersebut dikirim ke pangkalan udara Shante, Meiktila, divisi Mandalay. Dua jet berikutnya dikirim ke pangkalan udara Mergui, divisi Tenasserim. Di samping menyediakan pesawat, Rusia juga memberi pelatihan terbang bagi pilot-pilot Myanmar.²⁵¹

Beberapa waktu yang lalu, Myanmar meminta bantuan kepada Rusia dalam pembangunan reaktor nuklir. Pembicaraan dengan Rusia mengenai rencana junta militer untuk membangun Nuclear Research Reactor Facility tersebut telah

²⁵⁰ "Russia: More Aid to Build a Better Myanmar," *Xinhua*, 18 Februari, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 January-31 March 2003, hal. 34.

²⁵¹ "More Russian MiG-29 Fighter Jets Arrive in Meiktila," *Democratic Voice of Burma*, 18 Februari, 2003; "Two Russian-Made Fighters Arrive at Southeast Base, Company Opens Office," *Democratic Voice of Burma*, 15 Maret, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 10.

berlangsung pada tanggal 22 Januari 2003.²⁵² Fasilitas penelitian reaktor nuklir tersebut ditempatkan di kota Kathaung, di wilayah negara bagian Mon. Sehubungan dengan proyek nuklir tersebut, tanggal 31 Maret 2003, Rusia mengirimkan 5.000 ton perlengkapan untuk pembangunan reaktor nuklir tersebut. Dan sebelumnya, pada tanggal 22 Maret 2003, para ahli dari Rusia melakukan survey di lokasi proyek pembangunan reaktor nuklir tersebut.²⁵³

III. 6. Korea Selatan

Myanmar terus memperbanyak kesepakatan-kesepakatan bisnis dengan Korea Selatan. Beberapa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di area perdagangan dan investasi, khususnya di sektor pertambangan. Awal September 2003, Korean Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) mengorganisir pertemuan antara 40 perusahaan dari Myanmar dan tujuh perusahaan Korea Selatan untuk mengenalkan beragam variasi produk yang dihasilkan.²⁵⁴

Pada 15 Januari 2004, salah satu perusahaan pengeplorasi minyak Korea Selatan, Daewoo Internasional, melaporkan penemuan deposit gas alam dalam jumlah besar di blok A-1, Arakan. Dengan segera, Daewoo menutup

²⁵² "Myanmar to Build Nuclear Research Reactor," *Bangladesh Independent*, diakses dari www.ibiblio.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁵³ "Nuclear Reactor' Equipment Reportedly Shipped to Burmese Naval Base," *Democratic Voice of Burma*, 5 April, 2003, dalam *Report Card: Charm Offensive* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Januari-31 Maret 2003, hal. 11.

²⁵⁴ "South Korea and Burma Businessmen Meet," *Kaladan*, 7 September, 2003, dalam *Report Card: Under Pressure* (Bangkok: Altsean, 2003), 1 Juli-30 September 2003, hal. 48, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

kesepakatan dengan menegosiasikan penemuannya tersebut dengan Khint Nyunt dan menteri energi Myanmar pada 16 Januari.²⁵⁵

Tabel III. 1

Perusahaan Konsorsium Eksplorasi Gas Alam di Blok A-1

| Perusahaan | Prosentase |
|--|------------|
| Daewoo Internasional | 60% |
| Korea Gas Corporation | 10% |
| India Petroleum Corporation Subsidiary ONGC Videsh/OVL | 20% |
| Indian Gas Corporation | 10% |

Sumber: *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 36, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

Berdasarkan Production Sharing Contract (PSC), perusahaan minyak Myanmar, Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), memiliki hak 65% dari keseluruhan produksi, sedangkan perusahaan konsorsium lainnya memegang hak sebesar 35%.²⁵⁶

Satu bulan kemudian, tanggal 12 Februari, Daewoo mendapatkan hak untuk mengeksplorasi sumber gas alam di blok M. 18 Februari, Daewoo juga memenangkan hak untuk mengeksplorasi blok A-3, meski sebelumnya telah terdapat kesepakatan antara Myanmar dan India. Pengeplorasian blok A-3 tersebut dilaksanakan di bawah perjanjian yang ditandatangani pada akhir Maret 2004 dengan menteri energi Myanmar dan dimulai pada tahun 2006.²⁵⁷

²⁵⁵ "Daewoo CEO in Myanmar to Discuss Major Gas Find," *Agence France Presse*, 17 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 35, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁵⁶ "Myanmar in Talks for Gas Pipeline, GAIL May Invest Rs 4,000 Crore to Move the Gas," *Business Standard*, 29 Januari, 2004, dalam *Report Card: Blurred Vision* (Bangkok: Altsean, 2004), 1 Januari-31 Maret 2004, hal. 36, diakses dari www.altsean.org tanggal 22 Februari 2006.

²⁵⁷ *Report Card: Blurred Vision, Loc. Cit.*, hal. 36.

BAB IV

KONSOLIDASI DAN KERJASAMA: SUATU STRATEGI UNTUK BERTAHAN

Dalam Bab IV ini, dibahas upaya-upaya keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintah junta militer Myanmar hingga dapat bertahan di tengah berbagai tekanan. Sesuai dengan argumen yang diajukan, upaya pemerintah junta militer Myanmar dirangkum ke dalam dua langkah, yaitu langkah internal dan langkah eksternal. Upaya-upaya tersebut kemudian di analisis berdasarkan kerangka pemikiran dan fakta-fakta yang telah disajikan dalam Bab II dan Bab III.

Langkah internal yang diambil oleh junta militer merupakan upaya untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Langkah internal tersebut meliputi tiga upaya, yaitu kontrol terhadap arus informasi, kontrol terhadap universitas dan kontrol birokrasi. Sedangkan langkah eksternal yang diambil oleh junta militer diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan negara-negara lain, terutama negara tetangga, untuk memberikan dukungan dan bantuan bagi pemerintah junta militer dalam menghadapi tekanan internasional beserta dampak-dampaknya. Dalam penelitian ini, kerjasama tersebut difokuskan pada kerjasama yang dibangun oleh pemerintah junta militer dengan negara-negara tetangganya, yaitu enam negara anggota ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos dan Kamboja) serta China, India, Bangladesh, Rusia dan Korea Selatan. Upaya-upaya internal dan eksternal tersebut secara singkat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.1

**Upaya Internal dan Eksternal Pemerintah Junta Militer Myanmar
(1988-2004)**

| Waktu dan Peristiwa | Dimensi | |
|---|----------|-----------|
| | Internal | Eksternal |
| 1988 | | |
| Martial Law Order 2/88 | ✓ | |
| Martial Law Order 8/88 | ✓ | |
| 1989 | | |
| Januari 1989 Martial Law Order 3/89 | ✓ | |
| 1 Juni 1989 Myanmar dan Bangladesh menandatangani MoU yang mencakup kerjasama ekonomi dan <i>border trade</i> | | ✓ |
| 18 Juni 1989 Martial Law Order 16/89 Amandemen <i>Printers and Publishers Registration Law 1962</i> | ✓ | |
| 1990 | | |
| ► Kesepakatan senjata sebesar US\$ 1.4 milyar antara Myanmar dan China | | ✓ |
| 1991 | | |
| ► Myanmar mendapatkan bantuan infrastruktur dari China | | ✓ |
| 9 Agustus 1991 Martial Law Order 11/91 Amandemen <i>State Protection Law 1975</i> | ✓ | |
| Desember 1991-Juni 1992 Menutup universitas setelah sebelumnya dibuka kembali pada Mei 1991 | ✓ | |
| 1992 | | |
| Agustus 1992 Menlu Myanmar, U Aye mengadakan kunjungan resmi ke India untuk memperbaiki hubungan antara Myanmar-India yang merenggang sejak peristiwa 8 Agustus 1988 | | ✓ |
| November 1992-Maret 1993 Menutup Universitas | ✓ | |
| 1993 | | |
| Juli 1993-September 1993 Menutup Universitas | ✓ | |
| 1994 | | |
| ► Kesepakatan senjata China-Myanmar sebesar US\$ 400 juta | | ✓ |
| ► Myanmar-India menandatangani MoU untuk meningkatkan kerjasama antara kedua negara untuk mencegah <i>illegal and insurgent activities</i> | | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| Januari 1994-Agustus 1994 Menutup Universitas | ✓ | |
| Desember 1994-Mei 1995 Menutup Universitas | ✓ | |
| 1995 | | |
| 12 April 1995 Border trade antara Myanmar-India resmi dibentuk | | ✓ |
| 18 Mei 1995 Myanmar dan Bangladesh menandatangani <i>border trade protocol</i> | | ✓ |
| September 1995-November 1995 Menutup Universitas | ✓ | |
| 1996 | | |
| Mei 1996-September 1996 Menutup Universitas | ✓ | |
| Desember 1996-Juli 2000 Menutup Universitas | ✓ | |
| 7 Juni 1996 SLORC Law 5/96 <i>The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions</i> | ✓ | |
| 29 Juli 1996 <i>Television and Video Act</i> | ✓ | |
| 20 Agustus 1996 SLORC Law 9/96 <i>Motion Picture Law</i> | ✓ | |
| 20 September 1996 SLORC Law 10/96 <i>Computer Science Development Law</i> | ✓ | |
| 1997 | | |
| Myanmar-China menandatangani kesepakatan untuk memperkuat kerjasama militer | | ✓ |
| 1998 | | |
| Agustus 1998 China menyepakati proyek pembangunan <i>Banlang Hidropower Station</i> senilai US\$ 250 juta | | ✓ |
| 1999 | | |
| Kesepakatan antara Myanmar-India untuk memperkuat kerjasama di berbagai area, termasuk perdagangan dan keamanan di sepanjang perbatasan kedua negara | | ✓ |
| 2000 | | |
| <i>Internet Law</i> | ✓ | |
| Januari 2000 Myanmar mendapatkan suplai perlengkapan militer dan persenjataan dari India | | ✓ |

| 2001 | | |
|---|---|---|
| November 2001 Pemecatan Wakil PM Tin Hla dan Sekretaris 3 Win Myint | ✓ | |
| 2002 | | |
| 11 Maret 2002 Kesepakatan antara Myanmar dan Bangladesh dalam pembangunan <i>Trans-Asian Highway</i> di Chittagong | | ✓ |
| Akhir Maret 2002 Myanmar dan Bangladesh sepakat untuk membentuk <i>joint economic council</i> untuk menghapus hambatan-hambatan perdagangan antara kedua negara | | ✓ |
| 5-7 April 2002 Kesepakatan pembangunan tiga jalan raya nasional yang menghubungkan India-Myanmar-Thailand | | ✓ |
| Desember 2002 Myanmar menerima paket dari Rusia berupa empat jet tempur | | ✓ |
| 2003 | | |
| 10 Januari 2003 Pengiriman perlengkapan militer dan persenjataan angkatan udara buatan China ke Myanmar | | ✓ |
| 19 Januari 2003 Pembentukan bilateral consultation, sebuah kerangka kerja untuk meningkatkan proyek-proyek kerjasama antara Myanmar-India | | ✓ |
| 22 Januari 2003 Myanmar memperoleh bantuan dari Rusia dalam pembangunan fasilitas penelitian reaktor nuklir | | ✓ |
| Februari 2003 ▶ Pengangkatan Khin Nyunt sebagai Sekretaris 1 dan Soe Win sebagai Sekretaris 2 SPDC | ✓ | |
| ▶ 17 anggota SPDC, diplomat dan administrator Myanmar mendapatkan pelatihan dari pemerintah Malaysia sebagai bagian dari kerjasama di bidang <i>human development</i> | | ✓ |
| 9-10 Februari 2003 Pembentukan kesepakatan kerjasama Myanmar-Thailand dalam tiga area utama, yaitu perbatasan, ekonomi dan hubungan internasional | | ✓ |
| 15-17 Maret 2003 Than Shwe berkunjung ke Vietnam untuk menandatangani kesepakatan kerjasama di sektor ekonomi, perdagangan, agrikultur, perhutanan, kesehatan dan pendidikan | | ✓ |
| 14 Juli 2003 Penandatanganan MoU antara Myanmar-India untuk membentuk <i>joint trade committee</i> | | ✓ |
| 31 Juli 2003 Pembentukan landasan kerjasama di sektor transportasi, pariwisata dan <i>human development</i> antara Myanmar, Thailand, Laos dan Kamboja | | ✓ |
| Agustus 2003 Kesepakatan antara Myanmar China dalam membangun Shweli <i>hydroelectric dam</i> senilai US\$ 150 juta | | ✓ |

| | | | |
|------------------|--|---|---|
| 15 Agustus 2003 | Myanmar mendapatkan pinjaman dari China sebesar US\$ 200 juta untuk pembangunan pembangkit listrik hidro-elektrik Ye-Ywa | | ✓ |
| 25 Agustus 2003 | Pengangkatan Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri dan Soe Win sebagai Sekretaris 1 SPDC | ✓ | |
| 26 Agustus 2003 | Myanmar-India menandatangani MoU dalam kerjasama di sektor teknologi informasi dan komunikasi | | ✓ |
| 30 Agustus 2003 | Khin Nyunt mencetuskan tujuh butir Road Map to Democracy | ✓ | |
| September 2003 | ▶ Myanmar mengadakan <i>travel show</i> di Singapura untuk mendorong pariwisata di Myanmar | | ✓ |
| | ▶ Petronas mengambil alih sebagian besar saham Premier (Inggris) dalam proyek gas alam Yetagun, Myanmar | | ✓ |
| | ▶ Kesepakatan Myanmar-China dalam pembangunan <i>multi-purpose diesel engine plant</i> senilai US\$ 112 juta | | ✓ |
| | ▶ Kesepakatan pembangunan proyek jalan raya yang menghubungkan Teknaf (Bangladesh) dan Sittwe (Myanmar) | | ✓ |
| 3 September 2003 | Kesepakatan peningkatan kerjasama angkatan laut Myanmar-India | | ✓ |
| 15 Desember 2003 | Thailand membuka <i>Bangkok Process</i> sebagai sarana bagi Myanmar untuk berbicara dalam forum internasional | | ✓ |
| 2004 | | | |
| | ▶ Khin Nyunt mengunjungi China untuk menandatangani 11 kesepakatan kerjasama bilateral | | ✓ |
| | ▶ India mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kelonggaran penggunaan mata uang, sebagai akibat dari sanksi AS, bagi Myanmar dalam perdagangan antara Myanmar-India | | ✓ |
| | ▶ Myanmar-Bangladesh melakukan negosiasi dalam pembentukan Bangladesh-Burma Friendship Road | | ✓ |
| Januari 2004 | Pembicaraan kerjasama Myanmar-India dalam eksplorasi gas alam di Arakan | | ✓ |
| 16 Januari 2004 | Myanmar dan Korea Selatan menyepakati kerjasama dalam pengeksplorasian gas alam di blok A-1, Arakan | | ✓ |
| 25 Januari 2004 | Kesepakatan Myanmar-Thailand untuk membuka <i>border trade</i> di Mae Hong Song | | ✓ |
| Februari 2004 | Pembentukan <i>Joint Commission</i> untuk mempertegas kerjasama ekonomi antara Myanmar-Malaysia | | ✓ |

| | | |
|---|---|---|
| 12 Februari 2004 Myanmar memberikan hak eksplorasi gas alam di blok M kepada Korea Selatan | | ✓ |
| 18-19 Februari 2004 Pembicaraan antara Myanmar, Laos, Kamboja dan Thailand mengenai kerjasama ekonomi melalui <i>East-West Economic Corridor</i> | | ✓ |
| Maret 2004 Kesepakatan antara Myanmar dan Korea Selatan dalam eksplorasi blok A-3, Arakan | | ✓ |
| 30 April 2004 SPDC Law 5/04 <i>The Electronic Transactions Law</i> | ✓ | |
| September 2004 Pemecatan Menteri Luar Negeri Win Aung beserta wakilnya dan beberapa Menteri lainnya | ✓ | |
| 19 Oktober 2004 Pemberhentian Khin Nyunt sebagai Perdana Menteri | ✓ | |

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Upaya pemerintah junta militer dalam menghadapi tekanan-tekanan internasional merupakan upaya pertahanan diri demi mempertahankan eksistensinya. Upaya pertahanan diri adalah upaya untuk mempertahankan keadaan politik, ekonomi dan sosial di dalam suatu wilayah kekuasaan. Pertahanan diri merupakan tujuan jangka pendek dan menjadi salah satu sasaran dalam politik luar negeri suatu negara. Dalam menghadapi tekanan internasional, pemerintah junta militer memanipulasi seluruh instrumen yang dimilikinya, baik militer, maupun non-militer, untuk mencapai tujuannya, yaitu pertahanan diri.

Sesuai dengan kerangka pemikiran, konsep pertahanan diri tersebut berkaitan dengan proses perumusan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan junta militer dalam menghadapi tekanan internasional diarahkan pada upaya pertahanan diri yang kemudian diwujudkan ke dalam suatu strategi, yaitu strategi konsolidasi, didukung dengan teori politik birokrasi, serta strategi aliansi, berdasarkan konsep aliansi. Kedua strategi tersebut pada akhirnya kembali mempengaruhi proses

pembuatan kebijakan di dalam pemerintahan junta militer. Beberapa sub-bab berikut memberikan analisis keterkaitan antara konsep-konsep pemikiran tersebut dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk mencapai pembuktian hipotesis.

IV. 1 Langkah Internal

Langkah internal, atau upaya ke arah konsolidasi, ditujukan untuk memperkuat kekuasaan yang telah dimiliki oleh junta militer, sehingga dengan kekuasaan yang semakin *solid*, junta militer dapat menghadapi tekanan internasional dan mempertahankan kekuasaannya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa langkah internal junta militer dilakukan melalui tiga upaya, yaitu kontrol arus informasi, kontrol universitas dan kontrol birokrasi. Ketiga upaya tersebut menjadi fokus analisis dalam sub-bab ini.

Junta militer, sebagai sebuah birokrasi pemerintahan, berfungsi untuk menyediakan pengumpulan, penginterpretasian dan pentransmisian arus informasi.²⁵⁸ Dan bukan merupakan suatu kebetulan belaka bila penguasaan terhadap arus informasi dan komunikasi dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar bagi birokrasi, dalam hal ini, junta militer. Dengan kewenangan yang dimilikinya, junta militer dapat menguasai akses informasi-komunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan interpretasi dari junta militer.²⁵⁹ Konsep tersebut menjadi landasan analisis atas tindakan junta militer untuk melakukan kontrol arus informasi dan sekaligus kontrol terhadap

²⁵⁸ Lihat Wendzel, *Op. Cit.*, hal. 240-241.

²⁵⁹ Penjelasan mengenai kewenangan sebagai salah satu metode control dalam birokrasi dapat dilihat dalam Lindblom, *Op. Cit.*, hal 54.

universitas. Dengan akses yang terbatas, masyarakat dan mahasiswa terutama, tidak memiliki pilihan lain selain informasi yang disediakan oleh junta militer.

Junta militer dapat menyebarkan propaganda dan menyediakan informasi dari perspektif junta militer dengan menggunakan media massa yang dikontrolnya. Selain itu, junta militer juga membatasi akses terhadap sarana informasi-komunikasi. Kontrol tersebut diperoleh junta militer melalui kewenangannya membentuk undang-undang. Melalui kewenangan tersebut, junta militer mengeluarkan serangkaian undang-undang yang membatasi kebebasan pers, kebebasan beropini dan kebebasan berekspresi serta menghalangi akses terhadap informasi dan komunikasi.

Sebagai akibat dari serangkaian undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah junta militer tersebut, puluhan orang-termasuk jurnalis, penulis, editor dan aktivis mahasiswa-ditangkap oleh pemerintah junta militer karena dituduh melanggar beberapa undang-undang tersebut.²⁶⁰ Bahkan, karena dianggap memiliki dua buah mesin faksimili dan sebuah pesawat telepon secara ilegal, James Leander Nichols, duta besar negara-negara Eropa untuk Myanmar, harus menjalani hukuman penjara selama tiga tahun, namun akhirnya meninggal hanya berselang dua bulan setelah ditangkap.

Junta militer juga memperkuat konsolidasi melalui kontrol terhadap kaum intelektual ditingkat universitas. Kontrol terhadap universitas ini dilakukan untuk menghindari munculnya kelompok masyarakat yang kritis dan terpelajar

²⁶⁰ Lihat Tabel 11.1, hal. 56.

(mahasiswa) yang dapat mengancam pemerintahan junta militer, dan sekaligus mengurangi usaha mahasiswa dalam mengkritisi dan menekan pemerintah junta militer. Pemerintah junta militer mengeluarkan kebijakan-kebijakan pendidikan yang mengekang kehidupan kampus dengan tujuan untuk mengawasi dan mengontrol aktivitas mahasiswa. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, junta militer menerapkan *brain drain* kepada mahasiswa hingga akhirnya menurunkan motivasi dan membuat mahasiswa merasa lelah dan tidak lagi memikirkan aktivitas lain selain menyelesaikan kuliah dengan cara cepat dan mudah, karena apa yang ditakutkan oleh junta militer adalah munculnya pemikiran-pemikiran kritis mahasiswa yang dapat memicu munculnya gerakan oposisi. Tanpa adanya masyarakat yang berpendidikan, pemerintahan sipil tidak mungkin dapat terwujud sehingga junta militer tetap dapat melanjutkan kekuasaannya.

Kontrol universitas dilakukan oleh junta militer melalui beragam cara. Cara yang cukup efektif adalah dengan menutup universitas berulang kali dalam jangka waktu yang cukup lama serta memperpendek masa perkuliahan. Pemerintah junta militer juga memindahkan lokasi kampus, yang sebelumnya di pusat kota, kemudian dipindahkan ke daerah-daerah pinggiran, jauh dari pusat pemerintahan. Secara kebetulan, lokasi yang dipilih sebagai lokasi kampus yang baru berada di dekat basis militer. Hal tersebut memudahkan junta militer dalam mengawasi dan mengontrol mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dipaksa berpindah-pindah dari satu kampus ke kampus yang lainnya selama menempuh perkuliahan.

Pemerintah junta militer juga melakukan kontrol terhadap universitas dengan membatasi akses informasi pula. Jumlah buku-buku penunjang perkuliahan sangat terbatas, akses ke perpustakaan sangat sulit, komputer/internet dilarang dipergunakan tanpa ijin serta mengawasi secara ketat materi-materi perkuliahan serta menyunting ulang *textbooks* yang dipergunakan di universitas untuk disesuaikan dengan persepsi junta militer.

Sesuai dengan teori politik birokrasi, suatu birokrasi yang sedang berupaya mengkonsolidasikan kekuasaannya dapat menggunakan beberapa metode kontrol. Dalam hal ini, metode kontrol yang digunakan oleh junta militer adalah kewenangan, karena dengan kewenangan tersebut, junta militer dapat 'memaksa' pihak lain untuk tunduk terhadap aturannya. Kewenangan merupakan metode kontrol yang paling efektif karena kewenangan merupakan landasan bagi persuasi. Metode kewenangan ini tercermin pada larangan untuk menghimpun khalayak yang terlalu besar.²⁶¹ Melalui kontrol terhadap universitas, junta militer menunjukkan kewenangannya yang secara implisit melarang mahasiswa untuk berkumpul dengan menggunakan sarana-sarana tidak langsung, seperti memindahkan lokasi kampus, menerapkan sistem perkuliahan yang nomaden, memperpendek masa perkuliahan ataupun dengan menghadirkan perkuliahan sistem UDE (University of Distance Education). Dengan kebijakan-kebijakan semacam itu, secara tidak langsung, mahasiswa menemui kesulitan untuk melakukan organisasi atau merencanakan demonstrasi.

²⁶¹ Lindblom, *Op. Cit.*, hal. 58.

Upaya ketiga dalam langkah internal junta militer untuk menghadapi tekanan internasional adalah kontrol birokrasi. Kontrol birokrasi yang dimaksud adalah kontrol yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu birokrasi terhadap anggota-anggota lain di dalam birokrasi tersebut, baik dengan atau tanpa pengaruh dari segelintir orang di dalam birokrasi tersebut. Birokrasi dapat dianalogikan sebagai sebuah arena permainan dengan masing-masing anggotanya yang saling mengontrol satu sama lain. Setiap anggota di dalam birokrasi tersebut saling memperebutkan pengaruh yang lebih besar untuk dapat mempertahankan posisinya atau untuk mencapai posisi yang lebih baik sehingga memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Metode kontrol yang dilakukan dapat berupa ancaman, intimidasi, atau dengan menghancurkan reputasi lawan. Sedangkan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam birokrasi tersebut memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa saja yang berhak terlibat dalam proses perumusan kebijakan.²⁶²

Kontrol birokrasi memberikan peluang bagi junta militer untuk melakukan konsolidasi kekuasaan dan mencapai kekuasaan yang *solid*. Junta militer melakukan *reshuffle* untuk menyingkirkan anggota-anggotanya yang dianggap menyulitkan posisi mereka dalam menghadapi tekanan internasional serta merekrut anggota-anggota baru yang dianggap dapat memberikan kontribusi untuk memperkuat posisi dalam menghadapi tekanan internasional. Secara umum, *reshuffle* di dalam junta militer tersebut dilakukan untuk memperkuat kelompok garis keras. Saat ini, hampir di seluruh lini ditempati oleh perwira militer. Dengan

²⁶² Spanier, *Op. Cit.*, hal. 302.

keseluruhan formasi yang terdiri dari kelompok garis keras, konsolidasi-baik konsolidasi internal maupun eksternal-menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya kesamaan persepsi di antara kalangan garis keras tersebut.

Pada bulan Agustus 2003, Than Shwe melakukan perombakan kabinet secara mengejutkan dengan mengangkat Khin Nyunt menjadi perdana menteri. Sebelumnya, posisi perdana menteri dipegang sendiri oleh Than Shwe. *Reshuffle* tersebut cukup mengejutkan karena Than Shwe memilih Khin Nyunt, seorang tokoh yang dianggap moderat dan mampu membuka dialog dengan kelompok etnis, sebagai perdana menteri. Jika ditelaah lebih lanjut, penunjukan Khin Nyunt sebagai perdana menteri tersebut hanya berselang tiga bulan setelah peristiwa Black Friday, di mana terjadi pembantaian dan penangkapan terhadap pendukung NLD, termasuk Aung San Suu Kyii. Untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional terhadap peristiwa tersebut, junta militer mengangkat seorang tokoh moderat sebagai perdana menteri.

Pengangkatan Khin Nyunt tersebut dilakukan sebagai bukti adanya itikad baik junta militer untuk melakukan perubahan. Tidak lama setelah Khin Nyunt diangkat, kurang dari seminggu kemudian, Khin Nyunt mempromosikan tujuh butir Road Map to Democracy. Hal tersebut merupakan *stalling tactic* yang sangat tepat yang dilakukan oleh junta militer. *Road map* tersebut menjadi suatu rencana jitu untuk mengurangi tekanan internasional dengan sekaligus menjamin hasil-hasil yang tetap pro-militer. Masyarakat internasional memandang kemunculan Khin Nyunt beserta *road map*-nya memberi harapan baru akan hadirnya perubahan di Myanmar.

Dalam *road map* tersebut memang dicantumkan rencana untuk mengadakan Konvensi Nasional yang sempat tertunda serta mengadakan pemilihan umum. Akan tetapi, di dalam poin-poin tersebut terdapat kalimat yang tetap menjamin adanya keterlibatan militer yang besar dalam Konvensi Nasional dan pemilihan umum. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, butir-butir dari *road map* tetap menunjukkan peran militer (*tatmadaw*) yang sangat besar di setiap aspek, baik ekonomi, sosial ataupun politik. Militer meminta jaminan untuk tetap menjadi elemen penting dalam hubungan luar negeri negara. Dan militer tetap memegang kontrol negara melalui hak istimewanya untuk menyatakan '*state of emergency*' kapan saja diperlukan. Dengan demikian, pada dasarnya tanpa disadari oleh masyarakat internasional, *road map* tersebut merupakan strategi yang dilakukan oleh junta militer untuk melakukan konsolidasi, memperkuat kekuasaan militer.

Akan tetapi, Than Shwe kemudian menyadari adanya indikasi bahwa Khin Nyunt telah memperluas kekuasaan intelijen militer melalui penahanan dan investigasi serta menggeser kontrol atas perdagangan asing dari komandan militer lokal di area perbatasan utara ke kelompok keamanan perbatasan yang berada dibawah kontrolnya. Konsolidasi kekayaan dan kekuasaan yang dilakukan oleh Khin Nyunt tersebut yang menjadi alasan bagi Than Shwe untuk mendepak Khin Nyunt. Khin Nyunt kemudian dipecat dengan tuduhan korupsi dan dikenai tahanan rumah.

Pemecatan Khin Nyunt tersebut ditengarai juga sebagai akibat dari perbedaan orientasi kerjasama luar negeri antara Khin Nyunt dan Maung Aye,

orang kedua tertinggi di dalam hirarki junta militer. Khin Nyunt dikenal sebagai seorang moderat yang sangat dekat dengan China, sedangkan Maung Aye dikenal sebagai pihak pro-India. Rivalitas antara China dan India yang saling berebut pengaruh di Myanmar tampaknya berpengaruh juga terhadap persaingan antara Khin Nyunt dan Maung Aye.

Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pendepakan Khin Nyunt tersebut merepresentasikan satu usaha untuk menyatukan kekuasaan ke dalam satu faksi di Myanmar. Dan usaha tersebut bertujuan untuk memperkuat posisi junta militer, baik pada isu-isu internal maupun dalam hubungan internasional. Dengan demikian, konsolidasi yang diupayakan oleh junta militer tersebut dapat membantu menghadapi tekanan-tekanan internasional.

IV. 2. Langkah Eksternal

Selain melalui konsolidasi, respon junta militer terhadap tekanan internasional yang diterimanya juga diwujudkan ke dalam suatu langkah eksternal, yaitu membentuk aliansi kerjasama dengan negara-negara tetangga. Tekanan-tekanan internasional yang diterima oleh Myanmar dirasa mengancam eksistensi junta militer. Karena itu, junta militer melakukan aliansi, dalam bentuk kerjasama, dengan beberapa negara untuk mengatasi dampak dari tekanan-tekanan internasional tersebut.

Dari konsep aliansi, disebutkan bahwa aliansi dibentuk dengan maksud untuk mencapai tujuan negara, membela kepentingan ataupun mencegah ancaman dengan memobilisasi kapabilitas. Aliansi tidak hanya berarti kerjasama militer,

tetapi juga meluas ke arah kerjasama ekonomi dan politik bagi negara-negara yang membutuhkan dukungan kekuatan dari negara lain. Strategi aliansi berkaitan erat dengan kebutuhan domestik suatu negara. Negara membentuk aliansi secara temporer sebagai alat penangkal terhadap pihak-pihak yang melakukan tuntutan terhadap kepentingan mereka. Holsti menyatakan bahwa tujuan pembentukan aliansi, selain untuk berperang, adalah juga untuk mencegah krisis dan meningkatkan pengaruh diplomatik.²⁶³

Dalam upayanya untuk menghadapi tekanan internasional, yang sebagian besar berupa sanksi ekonomi, maka junta militer menjalin kerjasama dengan beberapa negara tetangga untuk mengatasi efek dari sanksi-sanksi tersebut bagi kondisi domestik Myanmar. Pada Bab III, kerjasama yang dilakukan oleh junta militer difokuskan pada negara-negara tetangga terdekatnya, Thailand, Singapura, Malaysia, dan tiga negara Indo-China yang juga menjadi anggota ASEAN, yaitu Vietnam, Kamboja dan Laos. Selain bekerjasama dengan enam negara anggota ASEAN tersebut, junta militer Myanmar juga melakukan kerjasama dengan China, India, Bangladesh, Rusia dan Korea Selatan.

Dalam melakukan kerjasama tersebut, junta militer menggunakan potensi sumber daya alamnya sebagai elemen persuasi terhadap negara-negara tetangga tersebut. Kekayaan alam yang dimiliki Myanmar tersebut menjadi satu alasan terjadinya *ethical amnesia* di antara negara-negara yang menjalin kerjasama dengan junta militer. Negara-negara tersebut hanya mempertimbangkan sisi untung-rugi dalam pencapaian kepentingan strategisnya terhadap Myanmar

²⁶³ Lihat dalam Kerangka Pemikiran, hal. 31-33.

tanpa mempertimbangan aspek etika, melihat kondisi domestik yang terdapat di Myanmar.

Sebagian besar kerjasama yang dilakukan oleh junta militer Myanmar dengan negara-negara tetangga tersebut berupa kerjasama ekonomi, politik dan militer. Myanmar kemudian, melalui kerjasamanya dengan Singapura, berhasil mengatasi sanksi ekonomi Amerika Serikat yang melarang penggunaan mata uang dollar AS dalam perdagangan dengan Myanmar. Myanmar juga mendapatkan keuntungan ekonomi yang cukup besar dengan ditemukannya lahan gas alam di daerah Arakan. Melalui lahan tersebut, Myanmar bekerjasama dengan India, Korea Selatan dan China untuk mengeksplorasi gas alam yang ada di area tersebut.

Dalam kerjasama itu, negara yang memberikan bantuan kepada Myanmar juga meminta imbalan-imbalan tertentu (*quid pro-quo*) sesuai dengan kepentingan negaranya. Masing-masing negara tetangga memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan kerjasama dengan junta militer Myanmar. Pertimbangan-pertimbangan tersebut berupa kepentingan-kepentingan strategis yang dapat diperolehnya dengan menjalin kerjasama bersama Myanmar. Konsesi yang harus diberikan Myanmar atas bantuan yang diberikan oleh negara-negara tetangga tersebut beberapa di antaranya berupa pembukaan jalur perdagangan baru, pemberantasan perdagangan obat bius diperbatasan serta hak eksklusif di dalam zona ekonomi eksklusif.

Berdasarkan tujuan pembentukan aliansi yang dikemukakan oleh Edwin H. Fedder, maka kerjasama yang dilakukan oleh Myanmar dengan negara-

negara tetangganya lebih bersifat augmentatif dan strategis. Jika dilihat dari bentuk kerjasama Myanmar, Myanmar menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga untuk menambah kekuatannya dan juga untuk dapat memanfaatkan wilayah dan sarana yang dimiliki negara-negara tersebut untuk tujuan strategis Myanmar. Sebagai salah satu contoh, Myanmar menjalin kerjasama dengan Rusia untuk memanfaatkan teknologi nuklir yang sudah sangat dipahami oleh Rusia. Kerjasama ekonomi-perdagangan yang dilakukan Myanmar dengan Thailand, India, ataupun Bangladesh dapat memperbesar kekuatan ekonomi Myanmar yang sempat terganggu akibat sanksi ekonomi dari masyarakat internasional. Secara umum, kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh junta militer tersebut dapat membantunya menghadapi tekanan-tekanan internasional.

BAB V

KESIMPULAN

Dari permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, argumen yang diajukan adalah bahwa pemerintah junta militer Myanmar melakukan langkah internal, yaitu upaya konsolidasi, dan langkah eksternal yang merupakan upaya untuk membentuk aliansi/kerjasama, sehingga pemerintah junta militer Myanmar dapat tetap bertahan sampai saat ini meski mendapat berbagai tekanan. Fakta yang menunjukkan junta militer melakukan upaya konsolidasi dapat dilihat pada tindakan junta militer mengeluarkan undang-undang yang membatasi kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan kebebasan beropini serta upaya junta untuk menguasai seluruh akses informasi dan komunikasi. Sedang, langkah eksternal pemerintah junta militer didukung oleh fakta fakta yang menunjukkan bahwa beberapa kerjasama yang dilakukan Myanmar dengan negara-negara tetangganya dapat membantu junta militer memenuhi kebutuhan domestik Myanmar. Kerjasama ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh Myanmar memberikan kontribusi besar bagi junta militer Myanmar dalam mengatasi sanksi ekonomi Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dengan demikian, fakta-fakta yang ditemukan mendukung argumen yang telah diajukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Mengenai upaya yang dilakukan oleh junta militer untuk dapat tetap bertahan di tengah berbagai tekanan, ditemukan beberapa fakta lain yang menarik. Pertama, tekanan-tekanan internasional tersebut tidak efektif mengingat

ketidakkonsistenan terhadap sanksi yang dijatuhkan ditambah dengan tidak adanya upaya menyeluruh dari masyarakat internasional untuk memberikan sanksi bersama kepada Myanmar. Negara-negara pemberi sanksi tidak saling mendukung atas sanksi yang dijatuhkan. Ketika salah satu negara memberikan sanksi, negara lain justru memberikan jalan keluar dari sanksi tersebut. Fakta ini muncul ketika Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Myanmar dengan tidak mengizinkan penggunaan mata uang dollar AS sebagai mata uang perdagangan Myanmar, Uni Eropa justru memberikan ijin kepada Myanmar untuk menggunakan euro sebagai mata uang perdagangan Myanmar.

Temuan kedua adalah fakta bahwa Myanmar memiliki anggaran militer sebesar 60% dari total anggaran nasionalnya padahal Myanmar tidak sedang menghadapi ancaman militer. Kontradiksi muncul ketika Myanmar menghadapi kesulitan ekonomi, Myanmar justru menghabiskan dana besar untuk keperluan militernya. Ketiga, adanya perubahan sikap India terhadap Myanmar pada awal dekade 1990an. Ketika terjadi gelombang demokrasi 1988, India merupakan satu-satunya negara tetangga yang menyuarakan dukungannya terhadap gerakan pro-demokrasi Myanmar. Namun, secara tiba-tiba India mulai merubah sikapnya terhadap pemerintahan junta militer pada sekitar tahun 1993.

Beberapa fakta tersebut dapat menjadi sebuah wacana yang menarik bila dikembangkan ke dalam suatu penelitian lebih mendalam. Selanjutnya, penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat membuka suatu jendela baru dalam kajian hubungan internasional agar studi ilmu hubungan internasional dapat semakin berkembang sehingga dapat dikenal luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

B U K U

- Fisher, B. Aubrey. *Small Group Decision Making*, 2nd ed. McGraw-Hill Inc., 1981.
- Harould, J. and Margareth Sprouch. *Fondation of International Politics*. New Jersey: D. Van Nostrad Company Inc., 1962.
- Hill, Norman. *International Relations: Documents and Readings*. New York: Oxford University Press, 1950.
- Holsti, K.J. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*, terj. Efin Sudrajat et.all. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, XIX, 2nd. ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf. *World Politics: Trend and Transformation*, 6th ed. London: Macmillan Press Ltd., 1997.
- Lindblom, Charles E. *Proses Penetapan Kebijakan*, 2nd ed, terj. Ardian Syamsudin. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1986.
- Little, Richard and Michael Smith, eds. *Perspectives on World Politics*. 2nd ed. New York: Routledge, 1994.
- Mas'ood, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Morgan, Patrick. *Theories and Approaches to International Politics*. Transaction Publisher, 1982.
- Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations*. New York: Alfred A. Knoop, 1948.
- Nasution, Dahlan. *Politik Internasional: Konsep dan Teori* Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.
- Neild, Robert. *An Essay on Strategy: As It Affects the Achievement of Peace in a Nuclear Setting*. London: The Macmillan Press Ltd, 1990.
- Plano, Jack C. and Roy Olton. *International Relation Dictionary*. California: ABC-Clia Inc., 1982.

Rosenau, James N, eds. *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969.

Rudy, Tcuku May. *Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1993.

Russett, Bruce and Harvey Starr. *World Politics: The Menu for Choice*. New York: W. H. Freeman and Company, 1985.

Soesastro, Hadi. *Strategi Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*. Jakarta: CSIS, 1988.

Spanier, John *Games Nations Play*, 7th ed. Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1990.

Wendzel, Robert L. *International Relations: A Policy Maker Focus*, 2nd ed. Toronto: John Wiley & Sons, Inc, 1980.

ENSIKLOPEDI

Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe, 2004.

Nolan, Cathal J. *The Greenwood Encyclopedia of International Relation*, IV. London: Greenwood Press, 2002

JURNAL

Report Card Burma: Arrested, 1 April-30 Juni 2003. Bangkok: Altsean, 2003.

Report Card Burma: Charm Offensive, 1 Januari-31 Maret 2003. Bangkok: Altsean, 2003.

Report Card: The Burma Junta Grits Its Teeth, 1 Juli-31 Desember 1998. Bangkok: Altsean, 1999.

INTERNET

www.altsean.org

Interim Report Card, Juli 2004-Februari 2005. Bangkok: Altsean, 2005. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Report Card: Blurred Vision, 1 Januari-31 Maret 2004. Bangkok: Altsean, 2004. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Report Card: Under Pressure, 1 Juli-30 September 2003. Bangkok: Altsean, 2003. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Special Report: On the Road to Democracy, 1 September 2003-29 Februari 2004. Bangkok: Altsean, 2004. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.blc-burma.org

The Motion Picture Law. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.dvb.english.net

Annual Report of ABFSU Year 2000. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

www.geocities.com

State Protection Law. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.hrichina.org

Sowing Disorder, 21 Februari, 2003. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.ibiblio.org

"Bangladesh to Work on Trans-Asian Highway to Connect Burma," *Narinjara News*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

"India Minister to Visit Myanmar for Three Nation Highway Project," *Narinjara News*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

"Myanmar-China Trade Rising," *Narinjara News*, 16 Januari, 2002. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

"Myanmar to Build Nuclear Research Reactor," *Bangladesh Independent*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Rahman, M. Shamsur. "Dhaka, Yangoon to Form Joint Body to Remove Trade Barriers," *Narinjara News*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Sai Wansai. *ASEAN, EU and Dual Track Policy*. Diakses tanggal 28 Oktober 2004.

Tamen, Anais. *The European Union's Sanctions Related to Human Rights: The Case of Burma/Myanmar* (Disertasi Pasca Sarjana Politik Internasional Universitas Libre de Bruxelles, Belgia, 2002-2003). Diakses tanggal 28 Oktober 2004.

The Electronic Transaction Law. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

The Printers and Publishers Law 1962. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.irrawaddy.org

“Beijing’s New Flexibility” Diakses tanggal 22 Februari 2006.

“Chronology of the Burma’s Laws Restricting Freedom of Opinion, Expression and Press.” Diakses tanggal 22 November 2005.

“Difference Concepts of Democracy” Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Lawrence, Neil. “Untroubled by the Burma’s Political Problems, Singaporeans are also Growing Increasingly Indifferent to the Country’s Investment Opportunities,” *Singapore Shrug*, Vol. 10 No. 6 July-August 2002. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

“List of Journalists, Authors, Poets Who Received Sentences after 1988 (37 Persons)” Diakses tanggal 22 November 2005.

Myint, Soe. “India and Burma: Working on Their Relationship.” Diakses tanggal 22 Februari 2006.

“What Role does Burma Really Play in Beijing.” Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.kompas.com

Andrea, Faustinus. “ASEAN Way dan Masalah Myanmar,” *Kompas*, 6 September, 2003. Diakses tanggal 28 Oktober 2004.

“Junta Myanmar Pecat Menlu Win Aung,” *Kompas*, 20 September 2004. Diakses tanggal 22 November 2005.

“Ambisi Sang Putri Jungkalkan Dinasti Ne Win: Kisah Tragis Mantan Orang Terkuat Myanmar,” *Kompas*, 29 September, 2002. Diakses tanggal 22 November 2005.

www.myanmar.com

The Computer Science Development Law. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.rebound88.net

ASSK: Message to UN Commission on Human Rights 5 April 2000. *Daw Aung San Suu Kyii Message to the 56th Session of the UN Commission on Human Rights*. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Archambault-Cyr, Jean Michel. "Crisis: The Education Breakdown in Burma," *The McGill Daily*. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

"Burma: Foreign Diplomacy and Domestic Unrest," *Strategic Forecasting Inc.*, 14 Februari, 2006. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Foreign Affairs Committee of All Burma Federation of Student Unions. *Restriction on University and College Level Entrance Exam*. University of Rangoon, 2000. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Havely, Joe. "Burma's 'Lost Generation': Former Burmese Students Continue Their Protest in Bangkok." Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Huq, Syed Mahmudul. "Prospect of Economic Cooperation Between Bangladesh and Burma," *The Independent Bangladesh*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Jen Lin-Liu. *Searching for an Education in Repressive Myanmar*. The Chronicle, 7 Juni 2002. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

"Jiang Visit Cements Myanmar-China Ties," *The Washington Times*, 11 Desember 2001. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

J. Mohan Malik. "India's Coddling of Military Dictatorship Hasn't Help a Bit," *The Pioneer*, 19 Desember, 2001. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Khaund, Surajit. "India-Burma Relationship in Year 2004," *Mizzima News*, 4 Januari, 2005. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Min Ko Naing. "Conqueror of Kings". Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Mitton , Roger. "Schools Have Reopened and Ne Win's Wife, Ni Ni Myint, is Happy," *Asiaweek*, 20 Oktober, 2000. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Ramachandran, Sudha. "India Plays It Both with Myanmar," *Asia Times*, 15 Mei, 2002. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Sharma, Dinesh C. "Rangoon Allays Fears of Chinese Domination," *Bangkok Post*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Tang, Edward. "Burma's 'Lost Generation': Frequent University Closures Have Left the Students with Dented Dreams, a Low Motivation for Learning and an Attraction for Nothing but the Good Life," *The Strait Times*, 18 Mei, 2001. Diakses tanggal 6 Maret 2006.

Tasker, Rodney and Bertil Lintner. "Danger: Road Works Ahead," *Far Eastern Economic Review*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

The International Institute for Strategic Studies. "China and India Jockey for Influence in Burma," *The Strait Times*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

Veash, Nicole. "The Junta's Reliance on Beijing Could Backfire as Favors are Called In," *The Observer*. Diakses tanggal 22 Februari 2006.

www.washingtonpost.com

Nakashima, Ellen. "Burmese Military rulers Force Out Prime Minister," *Washington Post*, 20 Oktober, 2004. Diakses tanggal 22 November 2005.

www.dictionary.reference.com,

www.encyclopedia.msn.com

www.wikipedia.org

LAMPIRAN I

The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions

State Law and Order Restoration Council Law No. 5/96 of June 7 1996

The Tatmadaw has protected the interests of the State and the people whenever disturbances which undermine national unity in the State and Sovereignty of the State occur. Likewise from the time it took over the responsibility of the State after making a timely prevention of the dangers which could cause the destruction of the State, the State Law and Order Restoration Council (Tatmadaw) has established stability of the State, community peace and tranquility, prevalence of law and order and national reconsolidation. It has also laid down the foundations with a view to the development of a genuine multi-party democracy system and the peaceful and systematic transfer of the responsibility of the State.

The State Law and Order Restoration Council together with the people is striving its utmost to build a peaceful and modern developed State, after laying down the political objectives, economic objectives and social objectives.

At the same time, in order to draft a firm and enduring Constitution, the State Law and Order Restoration Council formed the National Convention Convening Commission and assigned responsibility to lay down the fundamental principles and the detailed principles to be based upon and is successfully convening the National Convention with an extensive participation of representatives from the entire State.

However, it is found that people who are against the development and progress of the State with reliance on external elements are conducting acts which undermine the stability of the State, community peace and tranquility, prevalence of law and order and national reconsolidation.

Furthermore, it is also found that disturbance of the functions of the National Convention and acts such as incitement, delivering speeches, making oral and written statements and disseminating in various ways to belittle the National Convention and to make the people misunderstand are being conducted. Such acts amount to obstruction, disturbance and oppression to the development of a genuine multi-party democracy system and the peaceful and systematic transfer of the responsibility of the State.

Consequently, as it has become necessary to prevent the obstruction, disturbance and opposition to the peaceful and systematic transfer of responsibility of the State, successful performance of the functions of the National Convention, building of a peaceful and modern development State, the State Law and Order Restoration Council hereby enacts the following Law:—

Chapter I Title and Definition

1. This Law shall be called **The Law Protecting the Peaceful and Systematic Transfer of State Responsibility and the Successful Performance of the Functions of the National Convention against Disturbances and Oppositions.**

2. The following expressions contained in this Law shall have the meanings given hereunder:--

(a) "National Convention" means the National Convention being convened by the National Convention Convening Commission formed by the State Law and Order Restoration Council under Order No. 13/92 Dated 2 October, 1992;

(b) "Functions of the National Convention" means the functions being carried out by the National Convention.

(c) "Organization" means an organization and its subordinate organizations formed with the participation of a large number of persons. This expression also includes a political party registered in accordance with the Political Parties Registration Law.

Chapter II Prohibitions

3. No one and no organization shall violate either directly or indirectly any of the following prohibitions:--

(a) inciting, demonstrating, delivering speeches, making oral or written statements and disseminating in order to undermine the stability of the State, community peace and tranquility and prevalence of law and order;

(b) inciting, delivering speeches, making oral or written statements and disseminating in order to undermine national reconsolidation;

(c) disturbing, destroying, obstructing, inciting, delivering speeches, making oral or written statements and disseminating in order to undermine, belittle and make people misunderstand the functions being carried out by the National Convention for the emergence of a firm and enduring Constitution;

(d) carrying out the functions of the National Convention or drafting and disseminating the Constitution of the State without lawful authorization;

(e) attempting or abetting the violation of any of the prohibitions.

Chapter III Penalties

4. Whoever violates any prohibition contained in section 3 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term of a minimum of (5) years to a maximum of (20) years and may also be liable to fine.

5. If any organization or any person on the arrangement or abetment of any organization violates any prohibition contained in section 3, such organization may be --

(a) suspended for a period to be specified;

(b) abolished; or

(c) declared as an unlawful association under the Unlawful Associations' Law.

6. All funds and property of an organization against which action is taken under section 5 may also be confiscated.

Chapter IV Miscellaneous

7. In prosecuting under section 3 of this Law prior sanction of the Government shall be obtained.

8. Action taken under sections 5 and 6 of this Law shall be carried out by the Ministry of Home Affairs with the consent of the Government shall be obtained.

8. Action taken under sections 5 and 6 of this Law shall be carried out by the Ministry of Home Affairs with the consent of the Government. [in original??- DA]

9. Such orders and directives as may be required under this Law shall be issued by the Ministry of Home Affairs with the approval of the Government.

Sumber: www.jbiblio.org, diakses tanggal 22 Februari 2006

LAMPIRAN 2

The Computer Science Development Law

20th September, 1996

The State Law and Order Restoration Council hereby enacts the following Law: -

CHAPTER 1

Title and Definition

This Law shall be called the Computer Science Development Law.

The following expression contained in this Law shall have the meanings given hereunder :-

- (a) Computer means individually-used small-size machines, commonly-- used medium-size and large-size electronic machinery which can produce the required answers and diagrams by comparative scrutiny of collected data. This expression also includes electronic machinery which is prescribed by notification from time to time by the Ministry of Communications;
- (b) Computer Hardware means the computer, its components and the accessories;
- (c) Computer Software means the computer programme written to give directions as may be necessary to the computer;
- (d) Computer network means the communicating system through satellite or any other technology using the computer;
- (e) Information Technology means the technology by means of which information is transmitted electronically;
- (f) Computer Scientist means the holder of a local or foreign degree, undergraduate diploma or a postgraduate diploma in the field of computer science. This expression also includes a person who is conversant with computer programming;
- (g) Computer Entrepreneur means a person engaged in the business of producing and selling computer hardware or computer software locally or in the business of exporting or importing the same. This expression also includes a person engaged in maintenance service of computers and a person who has established a private computer training course;
- (h) Computer Enthusiast means a person; who is interested in computer science and is studying the same in any manner. This expression also includes a person who is utilizing a computer in any manner;
- (i) Council means the Myanmar Computer Science Development Council formed under this Law;
- (j) Federation means the Myanmar Computer Federation formed under this Law;

CHAPTER II

Objectives

The Objectives of this Law are as follows : -

- (a) to contribute towards the emergence of a modern developed State through computer science;
- (b) to lay down and implement measures necessary for the development and dissemination of computer science and technology;
- (c) to create opportunities for the youth, especially students, to study computer science;
- (d) to study computer science, which is developing internationally and to utilize the same in a manner which is most beneficial for the State;
- (e) to cause extensively development in the use of computer science in the respective fields of work;
- (f) to supervise the import and export of computer software or information.

CHAPTER III

Formation of the Myanmar Computer Science Development Council

The State Law and Order Restoration Council : -

(a) shall form the Myanmar Computer Science Development Council comprising the following persons : -

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Person assigned by the State Law and Order Restoration Council | Chairman |
| 2 | Misters or Deputy Ministers from relevant Ministries | Members |
| 3 | Heads of the relevant government departments and organizations | Members |
| 4 | Suitable Computer scientists | Members |
| 5 | Deputy Minister Ministry of Education | Secretary |

(b) may determine the Deputy Chairman and Joint Secretary if necessary in forming the Council.

The non-governmental Council members are entitled to such remuneration as may be prescribed by the Ministry of Education.

The Department of Higher Education: -

- (a) shall bear the expenses of the Council;
- (b) shall undertake the office work of the Council.

CHAPTER IV

Duties and Powers of the Council

The duties and powers of the Council are as follows : -

- (a) laying down the policy and giving guidance for the development of computer science in the State to keep abreast with the times;

- (b) laying down the policy with respect to the systematic dissemination of utilization of computer science in the State;
- (c) laying down the policy, giving guidance and controlling with respect to computer network;
- (d) making arrangements for the youth, especially students to get the opportunity of studying basic computer science;
- (e) laying down the policy, giving guidance and controlling with respect to information technology;
- (f) supervising and giving guidance with respect to activities of the federation and computer-related associations formed under this Law;
- (g) prescribing the types of computer software and information which are not permitted to be imported or exported.
- (h) laying down measures to cause extensive development in the utilization of computer science in the respective fields of work in the State;
- (i) forming necessary working committees and bodies related to computer science and assigning duties thereto;
- (j) abolishing any computer association formed or existing not in conformity with the provisions of this law or any computer association not functioning in conformity with the provisions of this Law or not in conformity with the constitution of the relevant association;
- (k) laying down and carrying out measures necessary for the attainment of the objectives of this Law.

CHAPTER V

Formation of Computer Associations

The different levels of Computer Enthusiasts' Associations may be formed as follows : -

- (a) Computer Enthusiasts' Basic Association;
- (b) Township Computer Enthusiasts' Association;
- (c) District Computer Enthusiasts' Association;
- (d) State/Divisional Computer Enthusiasts' Association;
- (e) Myanmar Computer Enthusiasts' Association;

(a) The Computer Enthusiasts' Basic Association may be formed with at least seven computer enthusiasts;

(b) The Township Computer Enthusiasts' Association may be formed with representatives chosen by the Computer Enthusiasts' Basic Association in accordance with the stipulations;

(c) The District Computer Enthusiasts' Association may be formed with representatives chosen by the Township Computer Enthusiasts' Association in accordance with the stipulations;

(d) The State/Divisional Computer Enthusiasts' Association may be formed with representatives chosen by the District Computer Enthusiasts' Associations in accordance with the stipulations;

(e) The Myanmar Computer Enthusiasts' Association may be formed with representatives chosen by the State/Divisional Computer Enthusiasts' Association.

The different levels of Computer Scientists' Association may be formed as follows:-

- (a) Township Computer Scientists' Association;
- (b) District Computer Scientists' Association;
- (c) State/Divisional Computer Scientists' Association;
- (d) Myanmar Computer Scientists' Association;

(a) The Township Computer Scientists' Association may be formed with at least seven members of the township;

(b) The District Computer Scientists' Association may be formed with representatives chosen by the Township Computer Scientists' Associations in accordance with the stipulations. In case the Township Computer Scientists' Association has not been formed as yet it may be formed with at least seven members of the District;

(c) The State/Divisional Computer Scientists' Association may be formed with representatives chosen by the District Computer Scientists' Association in accordance with the stipulations. In case the District Computer Scientists' Association has not been formed as yet, it may be formed with at least seven members of the State/Division.

(d) The Myanmar Computer Association may be formed with representatives chosen by the State/Divisional Computer Scientists' Associations in accordance with the stipulations.

The different levels of Computer Entrepreneurs' Association may be formed as follows.

- (a) Township Computer Entrepreneurs' Association;
- (b) District Computer Entrepreneurs' Association;
- (c) State/Division Computer Entrepreneurs' Association;
- (d) Myanmar Computer Entrepreneurs' Association;

(a) The Township Computer Entrepreneurs' Association may be formed with at least seven computer entrepreneurs of the township;

(b) The District Computer Entrepreneurs Association may be formed with representatives chosen by the Township Computer Entrepreneurs Association in accordance with the stipulations. In case the Township Computer Entrepreneurs' Association has not been formed as yet, it may be formed with at least seven computer enthusiasts of the District;

(c) The State/Divisional Computer Entrepreneurs' Association may be formed with representatives chosen by the District Computer Entrepreneurs' Association in

accordance with the stipulations. In case the District Computer Entrepreneurs Association has not been formed as yet, it may be formed with at least seven computer entrepreneurs of the State/Division;

(d) The Myanmar Computer Entrepreneurs' Association may be formed with the representatives chosen by the State/Divisional Computer Entrepreneurs' Association in accordance with the stipulations.

Persons who wish to form an association under section 8, section 10 or section 12 shall, after drawing up the constitution of the association submit to and obtain the approval of the organizational meeting of the association concerned.

The constitution of the association drawn up under section 14, shall contain stipulations in respect of the following: -

- (a) objective of forming the association;
- (b) if the association is formed at the basic level or with members of that level stipulation as to the qualification of its members;
- (c) forming the executive committee and stipulations as to its functions and duties; (d) choosing and sending representative to the one level higher association;
- (e) maintaining a fund and utilization;
- (f) holding meetings;
- (g) other necessary stipulations in accordance with the type of association concerned.

The tenure of the executive committee of the associations formed under section 8, section 10 or section 12 is 2 years from the date of formation.

The associations formed under section 8, section 10 or section 12 are non-governmental organizations without a profit-making motive.

CHAPTER VI

Formation of the Federation

The Council:-

- (a) shall form the Myanmar Computer Federation comprising representatives chosen from the Myanmar Computer Enthusiasts' Association, the Myanmar Computer Scientists' Association and the Myanmar Computer Entrepreneurs Association in accordance with the stipulation;
- (b) may determine the number of members of the Federation as may be necessary;
- (c) shall appoint the Chairman and Secretary of the Federation and assign duties may appoint the Deputy Chairman and Joint Secretary if necessary;
- (d) shall determine the tenure of the persons appointed by it in the federation.

The tenure of members included as representatives of the respective associations in the federation shall be the same as the tenure of the executive committee of the computer associations concerned that has chosen them.

The federation shall determine the business and procedures with respect to the holding of the meeting.

The federation shall set up an office establishment to perform its daily office work.

The federation is a non-governmental organization without profit-making motive.

The federation has the right to use its own name and seal with perpetual succession and the right to sue and to be sued.

CHAPTER VII

Duties and Powers of the Federation

The duties and powers of the federation are as follows:-

- (a) carrying out for the development of computer science in the State to keep abreast with the times.
- (b) conducting research in computer science, giving assistance to the persons conducting research;
- (c) promoting extensive utilization of computer science in the respective fields of work;
- (d) prescribing the syllabi and curricula for computer training schools;
- (e) inspecting teaching in computer training schools as may be necessary so as to determine whether it is up to the standard or not;
- (f) running computer science courses, holding lectures, competitions and organizing study tours;
- (g) holding examinations in computer science, conferring certificates and medals;
- (h) submitting advice to the Council from time to time on the development of computer science;
- (i) giving assistance to manufacturers so as to enhance the quality of computer hardware and computer software;
- (j) giving assistance for production of computer hardware and computer software and for sale inside and outside the country;
- (k) laying down projects on information technology in accordance with the guidance of the Council;
- (l) communicating with international computer organizations;
- (m) making arrangements for holding and dispatching delegates to local and foreign conferences, meetings, workshops, seminars, paper-reading sessions as may be necessary;
- (n) fulfilling a target to devise a system that can use Myanmar Language in the computer;
- (o) tendering advice to government departments and organization which seek advice with respect to computer;
- (p) compiling, publishing and distributing books, papers, periodicals and journals on computer;
- (q) setting up a library to collect books on computer from inside and outside the country;
- (r) carrying out for the youth especially students, to acquire basic computer knowledge and to cause emergence of outstanding computer scientists;
- (s) awarding monetary prize to outstanding computer scientists and inventors;
- (t) recommending to the Council to confer honorary titles and awards on outstanding computer scientists and inventors by the State;
- (u) submitting advice to the Council in order to protect the benefits of computer scientists and inventors;
- (v) forming necessary committees and bodies, and determining the functions and duties those of;
- (w) carrying out tasks with respect to computer science, assigned by the Council.

CHAPTER VIII

Finance

The Federation:-

- (a) shall subsist on its own fund; moreover, it shall undertake responsibility for all its financial matters;
- (b) shall prescribe financial regulations which it is to be abided by;
- (c) has the right to acquire and use grants or loans from any government department or organization, or from any financial institution;
- (d) shall deposit its funds in an account at the bank and shall use them in accordance with the financial regulations;
- (e) shall keep accounts systematically;
- (f) may carry out to increase funds which are not required immediately, in accordance with the financial regulations and may raise funds;
- (g) may accept cash and kind donated locally and from abroad and may make appropriations to computer associations as may be necessary;
- (h) shall deposit its own foreign currency in a separate bank account and is entitled to use the same in accordance with the existing laws, rules and regulation;
- (i) may request assistance, if necessary from the Office of the Auditor- General with respect to book-keeping and auditing of accounts.

CHAPTER IX

Prior Sanction and Licence

- (a) The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may, with the approval of the Council, determine by notification the types of computer to be imported, kept in possession or utilized only with the prior sanction of the Ministry.
- (b) In determining the types of computer under sub-section(a), fax-modem card installed computer which can transmit or receive data shall be primarily targeted.
- (c) In determining the types of computer under sub-section(a), it shall not apply to computers that are used only as aids in teaching, office work or business.

A person desirous of importing, keeping in possession or utilizing the type of computer prescribed in sub-section (a) of section 26 shall apply to the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs in accordance with the stipulations to obtain prior sanction.

A person desirous of setting up a computer network or connecting a link inside the computer network shall apply to the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs in accordance with the stipulations to obtain prior sanction.

The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may, after scrutinizing the applications submitted under section 27 or section 28 in accordance with the stipulations, grant prior sanction or refuse to grant prior sanction.

A person desirous of keeping in possession or utilizing the type of computer prescribed under sub-section (a) of section 26, shall comply with the orders and directives issued from time to time by the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs with respect to issuance of licence, prescribing the term of licence, licence fee and licence conditions.

CHAPTER X

Offences and Penalties

Whoever imports or keeps in possession or utilizes any type of computer prescribed under sub-section(a) of section 26, without the prior sanction of the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years and may also be liable to a fine.

Whoever sets up a computer network or connects a link inside the computer network, without the prior sanction of the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years and may also be liable to a fine.

Whoever fails to comply with a prohibitory order issued by the Council, or the 'Ministry of Education or the Ministry of Communications, Posts and Telegraphs ill respect of the type of computer prescribed under Sub-section(a) of section 26 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine or with both.

Whoever commits any of the following acts using computer network or any information technology shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 7 years to a maximum of 15 years, and may also be liable to a fine:-

(a) carrying out any act which undermines State Security, prevalence of law and order and community peace and tranquillity, national unity, State economy or national culture;

(b) obtaining or sending and distributing any information of State secret relevant to State security, prevalence of law and order and community peace and tranquillity, national unity, State economy or national culture.

Whoever violates any order relating to control issued by the Council under Sub-section(c) and Sub-section (d) of section 7 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both.

Whoever imports or exports any type of computer software or any information prescribed by the Council under sub-section (g) of section 7 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend from a minimum of 5 years to a maximum of 10 years and may also be liable to a fine.

Whoever fails to comply with an order abolishing any computer association, issued by the Council under sub-section (j) of section 7 shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine or with both.

Whoever attempts or conspires to commit any offence under this law or abets in the commission of such offence shall, on conviction be punished with the same penalty prescribed in this Law for such offence.

The Court shall, in ordering a penalty for any offence under this Law, confiscate or destroy or dispose of the exhibits relevant to the offence in accordance with the stipulations.

CHAPTER XI Miscellaneous

With respect to transferring computer technology, it shall be done in accordance with the provisions of Chapter VII of the Science and Technology Development Law.

In instituting legal proceedings under the Law, prior sanction of the Ministry of Home Affairs shall be obtained.

In order to carry out the provisions of this Law:

- (a) The Ministry of Education may, with the approval of the Government; issue such rules and procedures may be necessary;
- (b) The Council or the Ministry of Education may issue such orders and directives as may be necessary;
- (c) The Ministry of Communications, Posts and Telegraphs may issue such orders and directives as may be necessary.

Sumber: <http://www.myanmar.com/gov/laws/computerlaw.html>, diakses tanggal 22 Februari 2006

LAMPIRAN 3**Foreign Investment of Permitted Enterprises up to November 1999
(by Country and Region) (US \$ in million)**

| Sr.No | Sector | Permitted Enterprises | |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | No. | Approved Amount |
| 1. | Singapore | 68 | 1504.146 |
| 2. | United Kingdom * | 34 | 1371.723 |
| 3. | Thailand | 46 | 1252.453 |
| 4. | Malaysia | 25 | 587.169 |
| 5. | U.S.A | 16 | 582.065 |
| 6. | France | 3 | 470.370 |
| 7. | The Netherlands | 5 | 238.835 |
| 8. | Indonesia | 10 | 238.797 |
| 9. | Japan | 22 | 232.880 |
| 10. | Philippines | 2 | 146.667 |
| 11. | Hong Kong | 22 | 131.851 |
| 12. | Republic of Korea | 21 | 102.388 |
| 13. | Australia | 14 | 82.080 |
| 14. | Austria | 2 | 72.500 |
| 15. | Canada | 12 | 37.831 |
| 16. | Peoples Republic of China | 11 | 31.921 |
| 17. | Panama | 1 | 29.101 |
| 18. | Germany | 1 | 15.000 |
| 19. | Denmark | 1 | 13.370 |
| 20. | India | 1 | 4.500 |
| 21. | Bangladesh | 2 | 2.957 |
| 22. | Israel | 1 | 2.400 |
| 23. | Macau | 1 | 2.400 |
| 24. | Sri Lanka | 1 | 1.000 |
| | | 322 | 7154.404 |

*Inclusive of enterprises incorporated in British Virgin Islands, Bermuda Islands and Cayman Island.

Sumber: www.irrawaddy.org, update Januari 2003, diakses tanggal 29 Desember 2005.

LAMPIRAN 4

**Foreign Investment of Permitted Enterprises
up to 1999 November
(by Sector) (US \$ in million)**

| Sr.No | Sector | Permitted Enterprises | |
|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | No. | Approved Amount |
| 1. | Oil and Gas | 46 | 2303.123 |
| 2. | Manufacturing | 123 | 1492.308 |
| 3. | Hotel and Tourism | 41 | 1042.411 |
| 4. | Real Estate | 18 | 997.140 |
| 5. | Mining | 49 | 522.246 |
| 6. | Livestock and Fisheries | 20 | 283.372 |
| 7. | Transport and Communication | 13 | 275.387 |
| 8. | Industrial Estate | 3 | 193.113 |
| 9. | Construction | 1 | 17.267 |
| 10. | Agriculture | 3 | 14.351 |
| 11. | Other Services | 5 | 13.686 |
| | | 322 | 7154.404 |

Sumber: www.irrawaddy.org, update Januari 2003, diakses tanggal 29 Desember 2005.